



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012



Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011. Laporan ini merupakan bagian dari upaya Kemdikbud dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Kemdikbud seperti tertuang dalam Penetapan Kinerja Kemdikbud tahun 2011. Capaian kinerja yang disajikan berupa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam 9 (sembilan) program Kemdikbud yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian 61 sasaran strategis. Dengan tercapainya target dalam sasaran strategis diharapkan akan mendorong tercapainya lima misi Kemdikbud yaitu:

1. meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan;
2. meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan;
3. meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan;
4. meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan
5. meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, secara umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dengan baik. Pada tahun 2011 Kemdikbud melaksanakan sembilan program pembangunan pendidikan. Program-program tersebut belum mencakup fungsi kebudayaan, karena program dan anggaran fungsi tersebut untuk tahun 2011 masih ada di Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif. Kinerja yang telah dicapai Kemdikbud dapat dilihat dari tingkat capaian IKU, dimana sebanyak 57 IKU telah melebihi target, 31 IKU mencapai target, dan 45 IKU belum dapat mencapai target. Contoh capaian kinerja yang melampaui target antara lain:

1. APM SD/SDLB/paket A mencapai 85.58%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 83.01%;
2. APK SMP/SMPLB/Paket B sebesar 75.41% melebihi target yang ditetapkan sebesar 73.28%;
3. APK SMA/SMLB/SMK/Paket C sebesar 68% melebihi target yang ditetapkan sebesar 64.6%;
4. APK PT dan PTA usia 19-23th sebesar 27.01% melebihi target yang ditetapkan sebesar 25.10%;
5. Persentase Kab/Kota yang menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan sebesar 48.7% melebihi target yang ditetapkan sebesar 23%.

Selain kinerja tersebut di atas, Kemdikbud juga telah berhasil menyelesaikan peta jalan “road map” reformasi birokrasi di lingkungan kementerian.

Di pihak lain, Kemdikbud menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun – tahun mendatang, seperti membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, tercapainya opini WTP dari BPK dalam bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Kemdikbud, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disemua jenjang pendidikan. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan ini, Kemdikbud berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2011. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan nasional pada tahun-tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita. Amin.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2012

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Mohammad Nuh

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, menyatakan bahwa nomenklatur Kementerian Pendidikan Nasional mulai tanggal 18 Oktober 2011 berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nasional
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Di bawah ini struktur organisasi Kemdikbud sesuai Permendiknas Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud.

Gambar 1.1a Struktur Organisasi Kemdikbud

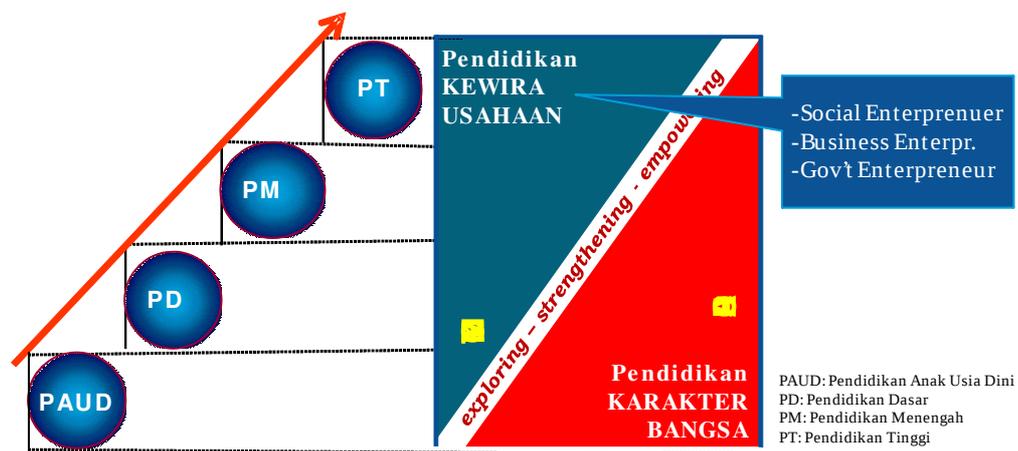
Gambar 1.1b Struktur Organisasi Kemdikbud (lanjutan)

Kemdikbud telah menyusun organisasi dan tata kerja seperti diatur pada Permendiknas Nomor 1 Tahun 2012 yang meliputi:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
6. Direktorat Jenderal Kebudayaan
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Penelitian dan Pengembangan
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
11. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
12. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
13. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
15. Staf Ahli Bidang Hukum
16. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan
17. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional
18. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
19. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi pendidikan.

Mengacu pada Undang--Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010--2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) tahun 2005--2025, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025. Kemdikbud menjabarkan RPPNJP menjadi empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005--2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010--2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015--2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020--2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Dengan adanya pergeseran orientasi dari berdasarkan sisi pasokan (*supply oriented*) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (*demand oriented*), Kemdikbud telah merencanakan pembangunan pendidikan secara komprehensif dengan cara memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. Ilustrasi pembangunan pendidikan secara komprehensif dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.2 Pembangunan Pendidikan Komprehensif
(Sumber: Renstra Kemdikbud 2010-2014)

Rencana Pembangunan Pendidikan I (2005--2009) dengan fokus peningkatan kapasitas dan modernisasi telah selesai dilaksanakan Kemdikbud sampai pada akhir tahun 2009. Banyak capaian yang telah dihasilkan sampai dengan tahun 2011 seperti APM SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 85.58%, APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 75.41%, APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C sebesar 68%, APK PT/PTA termasuk UT sebesar 27.01% dan lain-lain. Meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan dari 5 (lima) misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; tetapi masih banyak tantangan-tantangan dalam bidang pendidikan yang harus dihadapi maupun diselesaikan di masa datang, seperti memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Education for All (EFA)* dan *Education for Sustainable Development (EfSD)*, akuntabilitas

pengelolaan di bidang keuangan (diperolehnya WTP), pendidikan karakter, layanan pendidikan di daerah terpencil, perbatasan, terluar, daerah bencana, dan lain-lain.

Guna melanjutkan pembangunan pendidikan yang belum tercapai pada rencana pembangunan pendidikan I (2005--2009) dan juga untuk merealisasikan rencana pembangunan II yang berfokus pada penguatan pelayanan, Kemdikbud telah menyusun rencana strategis 2010--2014. Layanan pendidikan yang difokuskan pada: **tersedianya** pendidikan secara merata diseluruh pelosok nusantara; **terjangkaunya** pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat; **berkualitas/bermutu dan relevan** pendidikan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; **setara** bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan berkualitas, menjamin **kepastian** bagi warga negara indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Sejalan dengan pemberian layanan dalam bidang pendidikan, Kemdikbud berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kemdikbud. Reformasi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat mendukung tercapainya efisiensi nasional khususnya dalam bidang pendidikan. Reformasi yang dilaksanakan Kemdikbud mencakup 8 (delapan) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (layanan satuan pendidikan, layanan peserta didik, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan substansi pendidikan). Reformasi tersebut juga dirancang untuk dapat melaksanakan 5 (lima) misi Kemdikbud yaitu Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan, dengan cara seefisien dan seefektif mungkin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemdikbud ini memuat capaian kinerja yang berhasil dicapai dari kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Kemdikbud selama tahun 2011. Capaian-capaian kinerja tersebut di ukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Ketercapaian IKU-IKU tersebut akan mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai mana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud 2010-2014. Selain pencapaian kinerja dari PK tersebut, Laporan akuntabilitas kinerja Kemdikbud tahun 2011 juga melaporkan capaian kinerja bidang pendidikan yang berasal dari kontrak kinerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Presiden Republik Indonesia dan capaian Reformasi Birokrasi Internal (RBI) selama tahun 2011.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA KEMDIKBUD

A. PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan tercapainya pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun beberapa rencana pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan baik rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam jangka panjang, Kemdikbud telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) Tahun 2005--2025, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005--2025, khususnya tema pembangunan II (2010--2014) dengan fokus pada penguatan pelayanan. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya disesuaikan dengan RPJMN 2010--2014 dan perkembangan kondisi yang akan datang.

RPJMN Tahun 2010--2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya perekonomian. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) Tahun 2010--2014, seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010--2014 dalam penyusunannya telah mengacu pada RPJMN Tahun 2010--2014. Renstra Kemdikbud tahun 2010--2014 yang telah disusun belum memasukkan tujuan strategis, sasaran strategis maupun IKU/IKK dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, karena proses penggabungan kembali ke Kementerian Pendidikan Nasional belum sepenuhnya selesai.

1. Rencana Strategis

Renstra Kemdikbud mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Kemdikbud berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima

tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Didalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra juga menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi hasilnya.

a. **Visi, Misi, dan Tata Nilai Pendidikan Nasional**

Visi yang ingin dicapai Kemdikbud pada tahun 2025 adalah **Menciptakan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)**.

Visi Kemdikbud ini lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan masyarakat dari keterbelakangan menuju kondisi masyarakat yang modern dan beradab.

Dari sisi hasil, visi Kemdikbud menekankan pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konsep manusia seutuhnya itu meletakkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Potensi yang dikembangkan mencakup tiga aspek paling elementer. Pertama, aspek afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Kedua, aspek kognitif, yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menguasai teknologi. Ketiga, aspek psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis.

Terkait hal itu, maka pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan manusia secara komprehensif. Didalamnya mencakup pengembangan kecerdasan otak kiri yang lebih dikenal dengan kecerdasan intelektual (kemampuan kognitif), dan kecerdasan otak kanan yang akhir-akhir ini dikenal dengan sebutan kecerdasan spiritual, sosial, emosional, estetis, dan kinestetis.

Pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik. Ini merupakan landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses



masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen *Education for All*(EFA) dari UNESCO.

Tabel 2.1 Makna Insan IndonesiaCerdas dan Kompetitif

Makna Insan IndonesiaCerdas		Makna Insan IndonesiaKompetitif
Cerdas Spr	<ul style="list-style-type: none"> menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul 	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersempangatt juang tinggi Mandiri Pantang menyerah Pembangun dan pembina jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovasi dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajaran sepanjang hayat Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas Emosional dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara 	
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif. 	
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Aktualisasi insan adiraga. 	

Dalam periode perencanaan jangka menengah, Kemdikbud menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2014, yaitu:

**“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk
Membentuk
Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”**

Layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan pendidikan yang memiliki indikator sebagai berikut ini.

- 1) Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara
- 2) Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- 3) Kualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri
- 4) Setara bagi warga negara Indonesia memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
- 5) Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mewujudkan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014, Misi Kemdikbud 2010--2014 dikemas dalam “Misi 5K” sebagai berikut.

Tabel 2.2 Misi Kemdikbud

KODE	MISI
M1	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
M2	Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3	Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
M4	Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
M5	Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

Kemdikbud menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010--2014, dari ke enam tata nilai tersebut dipilih tata nilai yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kemdikbud, yaitu: **Melayani Semua Dengan Amanah.**

b. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010--2014

Untuk merealisasikan visi dan misi yang ditetapkan, Kemdikbud menetapkan 7 (tujuh) tujuan strategis dan 61 sasaran strategis selama tahun 2010--2014. Tujuan dan sasaran strategis tersebut disusun agar dapat memberikan gambaran atau ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi secara lebih jelas dan terukur.

Tujuan strategis Kemdikbud 2010--2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014. Dengan memperhatikan rumusan misi Kemdikbud tahun 2010--2014, tujuh tujuan strategis yang disusun Kemdikbud tahun 2010--2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Tujuan Strategis

KOD	TUJUAN STRATEGIS
E	
T1	Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
T2	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
T3	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
T4	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.
T5	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
T6	Terwujudnya bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS.
T7	Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1) Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T1

Tabel 2.4 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T1

KOD	SASARAN STRATEGIS
E	
S1.1	Meningkatnya APK PAUD nasional mencapai 45.05%.
S1.2	Meningkatnya kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%.
S1.3	Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak.

2) Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T2

Tabel 2.5 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T2

KOD	SASARAN STRATEGIS
E	
S2.1	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83.57%.
S2.2	Menurunnya APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0.7%.
S2.3	Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76.53%
S2.4	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58.17%.
S2.5	Menurunnya APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 1%.
S2.6	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan
S2.7	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, meningkatnya angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya 97%.
S2.8	Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat 94%.

- S2.9 Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi.
- S2.10 Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B.
- S2.11 Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran.
- S2.12 Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI.
- S2.13 Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI.
- S2.14 Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat.

Tabel 2.5 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T2 (Lanjutan...)

KOD E	SASARAN STRATEGIS
S2.15	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat.
S2.16	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32.
S2.17	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 94%, dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar.
S2.18	Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.

3) Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T3

Tabel 2.6 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T3

KOD E	SASARAN STRATEGIS
S3.1	Meningkatnya APK nasional melampaui 70,7%.
S3.2	Sekurang-kurangnya 95.5% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B.
S3.3	Sekurang-kurangnya 95.5% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B.
S3.4	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan.
S3.5	Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI.
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat.
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008.
S3.8	Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran.
S3.9	Sekurang-kurangnya 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan.
S3.10	Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan.
S3.11	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK

- mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan.
- S3.12** Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1,69 % untuk jenjang pendidikan menengah.
- S3.13** Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95%.
- S3.14** Seluruh satuan pendidikan SMA/SMLB/MA/MAK menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.
-

4) Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T4

Tabel 2.7 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T4

KOD E	SASARAN STRATEGIS
S4.1	Meningkatnya APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%.
S4.2	Sekurang-kurangnya 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008.
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B.
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES.
S4.5	Sekurang-kurangnya 94% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2.
S4.6	Sekurang-kurangnya 15% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3.
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi.
S4.8	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 0.19%
S4.9	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 0.8%.
S4.10	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104 %.
S4.11	Seluruh Perguruan Tinggi menerapkan pembelajaran yang membangun karakter dan kewirausahaan.

5) Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T5

Tabel 2.8 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T5

KOD E	SASARAN STRATEGIS
--------------	--------------------------

- S5.1 Sekurang-kurangnya 20% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi.
 - S5.2 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan.
 - S5.3 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi *parenting education*.
-

6) Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T6

Tabel 2.9 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T6

KOD E	SASARAN STRATEGIS
S6.1	Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan.
S6.2	Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional.
S6.3	Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala.
S6.4	Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa Indonesia.

7) Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T7

Tabel 2.10 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T7

KOD E	SASARAN STRATEGIS
S7.1	Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012
S7.2	Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79.
S7.3	Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan.
S7.4	Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar.

8) Sasaran Strategis Gabungan

Selain sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuh tujuan strategis diatas, Kemdikbud juga menetapkan tiga sasaran strategis gabungan. Penetapan sasaran strategis gabungan bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) manusia Indonesia. Berikut ketiga sasaran strategis gabungan.

Tabel 2.11 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis gabungan

KOD E	SASARAN STRATEGIS
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%.
SG.2	Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun.
SG.3	Meningkatnya tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 95,8%.

c. Program dan Kegiatan Pendukung

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kemdikbud 2010--2014, pada tahun 2011 Kemdikbud masih melaksanakan sembilan Program Pembangunan Pendidikan, yaitu:

Tabel 2.12 Program Kemdikbud

KOD E	PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
P1	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
P2	Program Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
P3	Program Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
P4	Program Pendidikan Tinggi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
P5	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P6	Program Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan
P7	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
P8	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
P9	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal

1) **Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal**

Program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal merupakan program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian dua tujuan Kementerian, yaitu:

- a. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1)
- b. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).



Kemdikbud melaksanakan program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, dengan menetapkan enam kegiatan pendukung, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal maupun UPT yang berada dibawah tanggung jawabnya. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal adalah:

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
- 2) Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD-NI
- 3) Penyediaan Layanan PAUD
- 4) Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
- 5) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
- 6) Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

2) **Program Pendidikan Dasar**

Program Pendidikan Dasar merupakan program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Program ini dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan kedua (T2), yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Kemdikbud telah menetapkan lima kegiatan yang mendukung Program Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat Direktorat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan pendukung dalam program pendidikan dasar.

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikdas
- 2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
- 3) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
- 4) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB
- 5) Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar.



3) **Program Pendidikan Menengah**

Program pendidikan menengah adalah program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan ketiga

(T3), yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis dalam program pendidikan menengah, Kemdikbud telah menetapkan 5 (lima) kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat yang ada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pendidikan menengah adalah:

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Menengah
- 2) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA
- 3) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
- 4) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB
- 5) Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah.

4) **Program Pendidikan Tinggi**

Program pendidikan tinggi merupakan program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Kementerian keempat (T4), yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional, dan berkesetaraan di semua provinsi.

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis dalam program pendidikan tinggi, Kemdikbud telah menetapkan sembilan kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pendidikan tinggi adalah:

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- 2) Layanan Tridarma di Perguruan Tinggi
- 3) Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi
- 4) Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
- 5) Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik
- 6) Pengembangan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan
- 7) Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu

- 8) Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama
- 9) Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

5) **Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan**

Program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) maupun UPT yang berada dibawah tanggungjawabnya. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya empat tujuan strategis Kemdikbud, yaitu:

- a. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota (T1)
- b. Terjaminnya Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2)
- c. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3)
- d. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis dalam program pendidikan pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan, Kemdikbud telah menetapkan enam kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPSDM dan PMP dan tiga pusat Eselon II pada Badan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan adalah:

- 1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan
- 2) Peningkatan penjaminan mutu pendidikan
- 3) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik
- 5) Penjaminan mutu pendidikan
- 6) Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan.

6) **Program Penelitian dan Pengembangan**

Program penelitian dan pengembangan merupakan satu dari Sembilan program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Badan Penelitian dan Pengembangan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya lima tujuan strategis Kemdikbud, yaitu:

- a. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1)
- b. Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2)
- c. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3)
- d. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan di Semua Provinsi (T4)
- e. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Kemdikbud telah menetapkan empat kegiatan pendukung pada program penelitian dan pengembangan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan dan tiga pusat eselon II pada badan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program penelitian dan pengembangan adalah:

- 1) Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi
- 2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud
- 3) Penyempurnaan Kurikulum dan Sistem Pembelajaran
- 4) Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan.

7) **Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Program pengembangan dan pembinaan bahasa merupakan satu dari sembilan program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Kemdikbud keenam (T6), yaitu terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS.

Kemdikbud telah menetapkan tiga kegiatan pendukung pada program pengembangan dan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan dan dua Pusat eselon II dalam Badan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengembangan dan pembinaan bahasa adalah:

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
- 2) Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
- 3) Pembinaan Bahasa dan Sastra.

8) **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud**

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemdikbud merupakan program Kemdikbud yang pelaksanaannya berada di Sekretariat Jenderal. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program yang ada di setiap unit utama dan mendukung tercapainya tujuan strategis penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T6).

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kemdikbud, Kementerian telah menetapkan sepuluh kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro dan Pusat. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kemdikbud adalah:

- 1) Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian;
- 2) Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian;
- 3) Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama Luar Negeri;
- 4) Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas;
- 5) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian yang Andal;
- 6) Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi;
- 7) Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan;
- 8) Peningkatan Layanan Prima di Bidang Informasi Dan Kehumasan;

- 9) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran dan E-Administrasi;
- 10) Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PJJ) di Asia Tenggara.

9) **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdikbud**

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemdikbud merupakan program kementerian yang pelaksanaannya berada di Inspektorat Jenderal. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T7).

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran strategis dalam program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemdikbud, Kementerian telah menetapkan enam kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan lima Inspektorat dalam Inspektorat Jenderal. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemdikbud.

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen;
- 2) Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Wilayah I;
- 3) Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Wilayah II;
- 4) Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Wilayah III;
- 5) Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Wilayah IV;
- 6) Audit Investigasi.

2. **Rencana Kinerja Tahunan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2014 seperti tertuang dalam Renstra Kemdikbud 2010-2014, Kemdikbud telah menyusun rencana kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut adalah rencana kinerja tahunan Kemdikbud tahun 2011 yang dikelompokkan ke dalam sembilan program Kementerian.

A. **Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Tabel 2.13 Program PAUDNI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)	
S1.1 Meningkatnya APK PAUD (TK,KB,TPA,SPS) nasional mencapai 45,05%		1 APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	33,67 %
		2 Lembaga PAUD yang berakreditasi	2,5%
		3 Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Program PAUD-NI	50%

Tabel 2.13 Program PAUDNI (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)	
		4 Persentase PTK PAUD-NI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	20,41 %
		5 Persentase PTK PAUD-NI Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	1,38%
S5.1 Sekurang-kurangnya 20% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi		1 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	5,0%
		2 Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup	13%
		3 Persentase PKBM Berakreditasi	50%
S5.2 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan		1 Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	23%
S5.3 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi <i>parenting education</i>		1 Persentase Kab/Kota Yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education	10%
SG.3 Menurunnya tingkat literasi nasional usia \geq 15 tahun 4.2%		1 Persentase Penduduk Buta Aksara Usia > 15 Tahun	4,8%
		2 % Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Minimal 10 TBM	46,0%

B. Program Pendidikan Dasar

Tabel 2.14 Program DIKDAS

Sasaran	Indikator	Target
---------	-----------	--------

Strategis		Kinerja	2011	
(1)	(2)	(3)		
S2.1	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83,57%	1	APM SD/SDLB/Paket A	83,01 %
S2.2	Menurunnya APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0.7%	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,3%

Tabel 2.14 Program DIKDAS (Lanjutan...)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)		
S2.3	Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76,53%	1	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	73,28 %
S2.4	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58,17%	1	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	56,80 %
S2.5	Menurunnya APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 1%	1	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,6%
S2.7	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, meningkatnya angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya 97%	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,3%
		2	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,6%
		3	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan	93%
S2.8	Meningkatnya angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB ke sekolah menengah sekurang-kurangnya 94%	1	Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	89%
S2.9	Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70,9% SMP/SMPLB diakreditasi	1	Persentase SD/SDLB Berakreditasi	53%
		2	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	33,7%
S2.10	Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B	1	Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B	46%
		2	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B	50%
S2.11	Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60%	1	Persentase SD Menerapkan e-Pembelajaran	22%

	SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran	2	Persentase SD memiliki fasilitas internet	15%
		3	Persentase SMP Menerapkan e-Pembelajaran	30%
		4	Persentase SMP memiliki fasilitas internet	30%
S2.1 2	Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI	1	Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI	50,8%
		2	Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	173

Tabel 2.14 Program DIKDAS (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
(1)	(2)	(3)		
S2.1 3	Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI	1	Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI	56%
		2	Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	173
S2.1 4	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat	1	Persentase guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	46%
		2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%
S2.1 5	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;	1	Persentase guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	83%
		2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%
S2.1 6	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;	1	Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	5%

		2 Rasio Guru Terhadap Siswa SD	1:31
		3 Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	5
		4 Rasio Guru Terhadap Siswa SMP	1:34
S2.1 7	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 94% . dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar	1 Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,3%
		2 Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan	93%

Tabel 2.14 Program DIKDAS (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)	
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;	1 Rasio kesetaraan gender SD/SDLB	97.4 %
S7.4	Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar	1 Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM	75%
		2 Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM	60%
		3 Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	5%
		4 Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	5%
		5 Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai SPM	35%
SG. 1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1 APM SD/SDLB/Paket A	83,01
		2 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	73,28
		3 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	56,80

C. Program Pendidikan Menengah

Tabel 2.15 Program DIKMEN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011
(1)	(2)	(3)
S3.1	Meningkatnya APK nasional melampaui 70.7%,	1 APK SMA/SMLB/SMK/Paket C 64,6 %
S3.2	Sekurang-kurangnya 95.5% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B	1 Persentase SMA/SMLB Berakreditasi 76,8 %
		2 Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B 27,5 %
		3 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan lokal 19%
		4 Rasio guru terhadap siswa SM 1:29

Tabel 2.15 Program DIKMEN (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011
(1)	(2)	(3)
S3.3	Sekurang-kurangnya 95.5% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B	1 Persentase SMK Berakreditasi 76,8 %
		2 Persentase SMK Berakreditasi Minimal B 24,0 %
		3 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal 58%
		4 Rasio guru terhadap siswa SM 1:29
S3.5	Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI	1 Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMA SBI/RSBI 38,8 %
		2 Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMK RSBI/SBI 64%
		3 Nilai total tertimbang medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan menengah 24
		4 Persentase sekolah menengah dengan rasio guru terhadap siswa antara 1:20 sampai dengan 1:32 48%
		5 Persentase kab/kota yang memiliki rasio pengawas SM minimal 1:15 90%
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;	1 Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 82,8 %
		2 Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 89,5 %
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008	1 Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 44,2 %

S3.8	Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran	1 Persentase SMA/SMALB yang memiliki e-perpustakaan	15%
		2 Persentase SMA/SMALB yang memiliki lab.komputer	45,4%
		3 Persentase SMK yang memiliki e-perpustakaan	40%
		4 Persentase SMK yang memiliki laboratorium multimedia	78%

Tabel 2.15 Program DIKMEN (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)	
S3.9	Sekurang-kurangnya 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan	1 Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	27,5%
S3.10	Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan	1 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	58%
		2 Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	27,5%
S3.12	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1.69 % untuk jenjang pendidikan menengah	1 Persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA	1,86%
S3.13	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95%	1 Rasio kesetaraan gender SMA/SMK/SMLB	81
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%	1 APK SMA/SMLB/SMK/Paket C	64,6%

D. Program Pendidikan Tinggi

Tabel 2.16 Program DIKTI

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011
(1)	(2)	(3)	
S4.1	Meningkatnya APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%	1 APK PT dan PTA Usia 19-23 Tahun *)	25,10 %
		2 APK Prodi Sains Natural Dan Teknologi (Usia 19-23 Tahun)	5%
		3 Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	15%
S4.2	Sekurang-kurangnya 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008	-	-

Tabel 2.16 Program DIKTI (Lanjutan...)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011
(1)	(2)	(3)	
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	1 Persentase Prodi Terakreditasi	91%
		2 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	70,9%
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES	1 Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia	5%
		2 Jumlah PT Otonom	150
		3 Jumlah PT Beropini WTP	9
S4.5	Sekurang-kurangnya 94% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2	1 Persentase Dosen Berkualifikasi S-2	67,5%
S4.6	Sekurang-kurangnya 15% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3	1 Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	10,5%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)		
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi	1	Persentase Dosen Bersertifikat	36%
S4.8	Meningkatnya persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 0.19%	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional	0,16%
		2	Jumlah HAKI Yang Dihasilkan	95%
S4.9	Meningkatnya persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 0.8%	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional	0,5%
S4.10	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104 %	1	Rasio Kesetaraan Gender PT	107,9 %
		2	Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi dan S-1	21%
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	25,10 %
		2	APK Prodi Sains Natural Dan Teknologi (Usia 19-23 Tahun)	5%

E. Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Tabel 2.17 Program BSDMP dan PMP

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)		
S1.2	Meningkatnya Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85%	1	Persentase Guru Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik Minimal S-1/D-4	-

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target 2011</i>
	bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%	2 Persentase Guru Bersertifikat Pendidik 44,8 %
		3 Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan 40%
		4 Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik 20%
		5 Tersedianya jenis penghargaan bagi PTK 5%
		6 Persentase kasus pendidik dan tenaga kependidikan yang ditangani 40%
		S2.6 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan
	2 Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan 100%	

Tabel 2.16 Program DIKTI (Lanjutan...)

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target 2011</i>
(1)	(2)	(3)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011		
			3	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	45,9 %
			4	Jumlah kumulatif pegawai Kemdikbud yang mengikuti diklat	50%
S2.1 4	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat;		1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	44,8
			2	Persentase pendidik yang telah disupervisi kerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	20
			3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	-
S2.1 5	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;		1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	44,8 %
			2	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	40%
S3.4	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan		1	Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	25%
			2	Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%
			3	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	45,9 %
			4	Jumlah kumulatif pegawai Kemdikbud yang mengikuti diklat	50%

Tabel 2.16 Program DIKTI (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)		(2)	(3)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;	1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	44,8%
		2	Persentase satuan Pendidikan menengah yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	40%
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	1	Persentase satuan Pendidikan tinggi yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	40%

F. Program Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.18 Program Balitbang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
(1)	(2)	(3)		
1	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	1	Persentase sekolah/madrasah diakreditasi (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB)	59,04%
		2	Persentase prodi dan Institusi PT diakreditasi	15,70%
		3	Persentase program/satuan PNF di akreditasi (PAUD, Paket A, B, C, Paket C Kejuruan, LPK, PKBM)	1,24%
		4	Jumlah peraturan turunan SNP yang dikembangkan dan disempurnakan	7
		5	Jumlah peserta didik yang dinilai kompetensinya sesuai SNP	12.589.932
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan Kemdikbud	1	Jumlah peraturan perundang-undangan	5
		2	Jumlah informasi dan publikasi kelitbang	4

Tabel 2.18 Program Balitbang (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)	
3	Meningkatnya hasil penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional	1 Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis penelitian	21
		2 Jumlah daerah yang bergabung dalam jaringan kerjasama penelitian	5
		3 Jumlah judul hasil penelitian yang diterbitkan dan didesiminasikan.	20
4	Meningkatnya kualitas kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan	1 Jumlah model kurikulum dan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif dan menghasilkan lulusan kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa.	47
		2 Persentase provinsi dan kab/kota yang mengembangkan kurikulum pada tingkat daerah.	98%
		3 Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum secara mandiri	40%
		4 Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N Total = 885 Jilid Mapel)	76,8%
5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Jumlah PTK yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	8000
		2 Jumlah soal yang disusun untuk bank soal untuk berbagai kepentingan penilaian pendidikan	193.900
		3 Jumlah model penilaian pendidikan	75

G. Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tabel 2.19 Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011
(1)	(2)	(3)
S6.1	Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan	1 Persentase Bahasa Daerah Terpetakan (N Total = 746) 65%
S6.2	Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional	1 Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional 5%
S6.3	Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala	1 Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan Secara Berkala 2
		2 Persentase Kabupaten/Kota Yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 12%
S6.4	Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran bahasa Indonesia	1 Jumlah Negara Memiliki Pusat Pembelajaran bahasa Indonesia 38
		2 Jumlah Pengembangan Pusat Pembelajaran BIPA di Luar Negeri 10

H. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud

Tabel 2.20 Program Setjen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)	
S7.1	Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1 Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	85%
		2 Laporan Keuangan Unit-Unit Utama Terintegrasi/ Terkonsolidasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%
S7.2	Meningkatnyaskor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1 Skor LAKIP Kementerian	77
		2 Persentase Satker UPT Pusat di Daerah Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	30%
		3 Persentase Satker di Lingkungan Unit Utama Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	100%
		4 Persentase Unit Utama Yang Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja	75%
		5 Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat Kehadiran Pegawainya Tidak Kurang Dari 98%	95%
		6 Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja Diterapkan di Lingkungan Kementerian	-
S7.3	Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan	1 Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Kementerian	95,5 %
		2 Persentase Realisasi Anggaran Kementerian	95,5 %

Tabel 2.20 Program Setjen (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011	
(1)	(2)	(3)	
	3	Persentase Anggaran Yang Tidak Diblokir	95%
	4	Persentase Satker/Unit Kerja Kementerian Terkoneksi Secara Daring (Online)	95%
	5	Tingkat Penerapan E-Administrasi di Lingkungan Kementerian (Persen)	70%
	6	Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Unit Kerja Terkoneksi ke Sistem Pembelajaran Daring (Online)	15%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011
(1)	(2)	(3)
	7 Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Pendidikan Yang Ditindaklanjuti	100%
	8 Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan	20%
	9 Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data	49
	10 Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD Yang Terhubung Dalam Jaringan Pendataan	50%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011
(1)	(2)	(3)
	11 Persentase Masyarakat (Peserta Didik, Orang Tua, Tenaga Pendidik, Satuan Pendidikan, Dunia Industri, Media dan Publik, Pendidikan Daerah, Rekanan, dan Pelajar dan Mahasiswa Asing) Yang Memahami Tentang Kebijakan Pendidikan	77%

I. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Tabel 2.21 Program Itjen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011
(1)	(2)	(3)
S7.1	Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1 Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara > 500 juta 15%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011
		2 Persentase Satker di Lingkungan Kemdikbud Memiliki SPI 80%
		3 Persentase Penyelesaian Temuan Audit 75,1%
S7.2	Meningkatnyaskor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1 Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya 75%

B. PERJANJIAN KINERJA

Kemdikbud menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK) tingkat Kementerian yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. PK yang disusun mengacu pada Renstra 2010--2014 dan RKT tahun 2011. Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Berikut adalah penetapan kinerja Kemdikbud tahun 2011.

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Anggaran 3.665.771.000.000		
S1.1	Meningkatnya APK PAUD (TK,KB,TPA,SPS) nasional	1 APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS) 33,67%

	mencapai 45,05%	2	Lembaga PAUD yang berakreditasi	2,5%
		3	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Program PAUD-NI	50%
		4	Persentase PTK PAUD-NI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	20,41%
		5	Persentase PTK PAUD-NI Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	1,38%
S5.1	Sekurang-kurangnya 20% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi	1	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	5,0%
		2	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup	13%
		3	Persentase PKBM Berakreditasi	50%
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan	1	Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	23%
S5.3	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi <i>parenting education</i>	1	Persentase Kab/Kota Yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education	10%
SG. 3	Menurunnya tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 4.2%	1	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia > 15 Tahun	4,8%
		2	Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Minimal 10 TBM	46,0%

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (*Lanjutan...*)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
Program Pendidikan Dasar, Anggaran 17.203.228.647.000				
S2.1	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83,57%,	1	APM SD/SDLB/Paket A	83,01%
S2.2	Menurunnya APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0.7%	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,3%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S2.3	Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76,53%	1	APK SMP/SMPLB/Paket B	73,28%
S2.4	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58,17%	1	APM SMP/SMPLB/Paket B	56,80%
S2.5	Menurunnya APS Kelompok Usia 13-15 Tahun mencapai 1%	1	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,6%
S2.7	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, meningkatnya angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya 97%	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,3%
		2	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,6%
		3	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan	93%
S2.8	Meningkatnya Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB ke sekolah menengah sekurang-kurangnya 94%	1	Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	89%
S2.9	Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi	1	Persentase SD/SDLB Berakreditasi	53%
		2	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	33,7%
S2.1 0	Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B	1	Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B	46%
		2	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B	50%
S2.1 1	Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran	1	Persentase SD Menerapkan e-Pembelajaran	22%
		2	Persentase SD memiliki fasilitas internet	15%
		3	Persentase SMP Menerapkan e-Pembelajaran	30%
		4	Persentase SMP memiliki fasilitas internet	30%

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S2.1 2	Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI	1	Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI	50,8%
		2	Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional	173

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S2.1 3	Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI	1	tingkat pendidikan dasar Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI	56%
		2	Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	173
S2.1 4	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat	1	Persentase guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	46%
		2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%
S2.1 5	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;	1	Persentase guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	83%
		2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%
S2.1 6	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;	1	Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	5%
		2	Rasio Guru Terhadap Siswa SD	1:31
		3	Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	5%
		4	Rasio Guru Terhadap Siswa SMP	1:34

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S2.1 7	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 94 %, dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,3%
		2	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan	93%
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender	1	Rasio kesetaraan gender SD/SDLB	97.4%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
	dalam pendidikan;			
S7.4	Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar	1	Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM	75%
		2	Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM	60%
		3	Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	5%
		4	Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	5%
		5	Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai SPM	35%
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1	APM SD/SDLB/Paket A	83,01
		2	APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	73,28
		3	APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	56,80
Program Pendidikan Menengah, Anggaran 8.405.414.000.000				
S3.1	Meningkatnya APK nasional melampaui 70.7%,	1	APK SMA/SMLB/SMK/ Paket C	64,6%
S3.2	Sekurang-kurangnya 95.5% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B	1	Persentase SMA/SMLB Berakreditasi	76,8%
		2	Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B	27,5%
		3	Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan lokal	19%

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
		4	Rasio guru terhadap siswa SM	1:29
S3.3	Sekurang-kurangnya 95.5% SMK berakreditasi, dan 30%-nya	1	Persentase SMK Berakreditasi	76,8%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011			
S3.5	berakreditasi minimal B; Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI;	2	Persentase SMK Berakreditasi Minimal B	24,0%	
		3	Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	58%	
		4	Rasio guru terhadap siswa SM	1:29	
		1	Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMA SBI/RSBI	38,8%	
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;	2	Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMK RSBI/SBI	64%	
		3	Nilai total tertimbang medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan menengah	24%	
		4	Persentase sekolah menengah dengan rasio guru terhadap siswa antara 1:20 sampai dengan 1:32	48%	
		5	Persentase kab/kota yang memiliki rasio pengawas:SM minimal 1:15	90%	
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008	1	Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	82,8%	
		2	Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	89,5%	
S3.8	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008	1	Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	44,2%	
S3.8		Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran	1	Persentase SMA/SMALB yang memiliki e-perpustakaan	15%
			2	persentase SMA/SMALB yang memiliki lab.komputer	45,4%
		3	Persentase SMK yang memiliki e-perpustakaan	40%	

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S3.9	Sekurang-kurangnya 70% Lulusan SMK Bekerja pada	4	Persentase SMA/SMALB yang memiliki laboratorium multimedia	78%
		1	Persentase SMK Berkemitraan Dengan	27,5%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011	
S3.1 0	Tahun Kelulusan Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan	1	Dunia Usaha dan Dunia Industri persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	58%
		2	Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	27,5%
S3.1 2	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1.69 % untuk jenjang pendidikan menengah	1	persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA	1,86% %
S3.1 3	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95%	1	Rasio kesetaraan gender SMA/SMK/SMLB	81
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%	1	APK SMA/SMLB/SMK/Paket C	64,6%
Program Pendidikan Tinggi, Anggaran 32.261.944.000.000				
S4.1	Meningkatnya APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn*)	25,10%
		2	APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	5%
		3	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	15%
S4.2	Sekurang-kurangnya 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008	-	-	-

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011	
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	1	Persentase Prodi Terakreditasi	91%
		2	Persentase Prodi PT Berakreditasi	70,9%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES		Minimal B	
		1	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia	5
		2	Jumlah PT Otonom	150
		3	Jumlah PT Beropini WTP	9
S4.5	Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2	1	Persentase Dosen Berkualifikasi S-2	67,5%
S4.6	Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3	1	Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	10,5%
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi	1	Persentase Dosen Bersertifikat	36%
S4.8	Meningkatnya persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 0.19%	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional	16%
S4.9	Meningkatnya persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 6.5%	2	Jumlah HAKI Yang Dihasilkan	95
		1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional	0,5%
S4.1 0	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104 %	1	Rasio Kesetaraan gender PT	107,9%
		2	Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi dan S-1	21%

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
SG. 1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn*)	25,10%
		2	APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	5%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Anggaran 3.258.473.896.000				
S1.2	Meningkatnya kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%	1	Persentase Guru Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik Minimal S-1/D-4	59,60%
		2	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	44,8%
		3	Persentase satuan pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	40%
		4	Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	20%
		5	Tersedianya jenis penghargaan bagi PTK	5%
		6	Persentase kasus pendidik dan tenaga kependidikan yang ditangani	40%
S2.6	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	1	Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	25%
		2	Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
		3	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	45,9%
		4	Jumlah kumulatif pegawai Kemdikbud yang mengikuti	50%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S2.1 4	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat;	1	diklat Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	44,8
		2	Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	20
		3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	-
S2.1 5	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;	1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	44,8%
		2	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	40%
S3.4	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	1	Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	25%
		2	Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%
		3	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	45,9%
		4	Jumlah kumulatif pegawai Kemdikbud yang mengikuti diklat	50%

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S3. 6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;	1	Persentase guru bersertifikat pendidik	44,8%
		2	Persentase satuan pendidikan menengah yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	40%
S4. 3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	1	Persentase satuan Pendidikan tinggi yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	40%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
Program Penelitian dan Pengembangan, Anggaran 1.311.983.929.000				
1	Meningkatnya standar mutu dan pelaksanaan akreditasi	1	Persentase sekolah/madrasah diakreditasi (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/ MAK, SLB)	59,04%
		2	Persentase prodi dan Institusi PT diakreditasi	15,70%
		3	Persentase program/satuan PNF di akreditasi (PAUD, Paket A, B, C, Paket C Kejuruan, LPK, PKBM)	1,24%
		4	Jumlah peraturan turunan SNP yang dikembangkan dan disempurnakan	7
		6	Jumlah Peserta didik yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	12.589.932
		2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan Kemdikbud	1
3	Meningkatnya hasil penelitian untuk perumusan kebijakan nasional	2	Jumlah informasi dan publikasi kelitbangan	4
		1	Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis penelitian	21
		2	Jumlah daerah yang bergabung dalam jaringan kerjasama penelitian	5
		3	Jumlah judul hasil penelitian yang diterbitkan dan didesiminasikan.	20

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
4	Meningkatnya kualitas kurikulum dan sistem pembelajaran	1	Jumlah model kurikulum dan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif dan menghasilkan lulusan kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa.	47

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011		
			2	Persentase provinsi dan kab/kota yang mengembangkan kurikulum pada tingkat daerah.	98%
			3	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum secara mandiri	40%
			4	Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N Total = 885 Jilid Mapel)	76,8%
5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan		1	Jumlah PTK yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	8000
			2	Jumlah soal yang disusun untuk bank soal untuk berbagai kepentingan penilaian pendidikan	193.900
			3	Jumlah model penilaian pendidikan	75
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Anggaran 153.621.300.000					
S6.1	Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan		1	Persentase Bahasa Daerah Terpetakan (N Total = 746)	65%
S6.2	Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional		1	Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional	5%
S6.3	Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala		1	Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan Secara Berkala	2
			2	Persentase Kabupaten/Kota Yang Terbina Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	12%

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011		
S6.4	Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia	1	Jumlah Negara Memiliki Pusat Pembelajaran bahasa Indonesia	38
		2	Jumlah Pengembangan Pusat Pembelajaran BIPA di Luar Negeri	10
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Anggaran 1.265.496.519.000				
S7.1	Terwujudnya Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1	Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	85%
		2	Laporan Keuangan Unit-Unit Utama Terintegrasi/Terkonsolidasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%
S7.2	Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1	Skor LAKIP Kementerian	77
		2	Persentase Satker UPT Pusat di Daerah Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	30%
		3	Persentase Satker di Lingkungan Unit Utama Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	100%
		4	Persentase Unit Utama Yang Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja	75%
S7.3	Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan	5	Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat Kehadiran Pegawainya Tidak Kurang Dari 98%	98%
		6	Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja Diterapkan di Lingkungan Kementerian	-
		1	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Kementerian	95,5%
		2	Persentase Realisasi Anggaran Kementerian	95,5%
		3	Persentase Anggaran Yang Tidak Diblokir	95%
4	Persentase Satker/Unit Kerja Kementerian Terkoneksi Secara Daring (Online)	95%		
5	Tingkat Penerapan E-Administrasi di Lingkungan Kementerian (Persen)	70%		

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdikbud (Lanjutan...)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2011	
		6	Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Unit Kerja Terkoneksi ke Sistem Pembelajaran Daring (Online)	15%
		7	Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Pendidikan Yang Ditindaklanjuti	100%
		8	Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan	20%
		9	Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data	49
		10	Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD Yang Terhubung Dalam Jaringan Pendataan	50%
		11	Persentase Masyarakat (Peserta Didik, Orang Tua, Tenaga Pendidik, Satuan Pendidikan, Dunia Industri, Media dan Publik, Pendidikan Daerah, Rekanan, dan Pelajar dan Mahasiswa Asing) Yang Memahami Tentang Kebijakan Pendidikan	77%
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdikbud, Anggaran 210.900.000				
S7.1	Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan	1	Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500 juta	15
		2	Persentase Satker di Lingkungan Kemdikbud Memiliki SPI	80
		3	Persentase Penyelesaian Temuan Audit	75,1
S7.2	Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1	Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya	75
	Tercapainya kontrak kinerja antara Presiden dengan Mendiknas dalam bidang pendidikan	1	Diukur dengan target kinerja sesuai dengan Perpres tentang Prioritas Pembangunan Diknas Tahun 2011 yang disepakati dengan Presiden	
	Terwujudnya reformasi birokrasi di Kemdiknas	1	Diukur dengan target kinerja sesuai dengan pentahapan dalam agenda RBI Diknas	
	Terwujudnya layanan pendidikan di daerah bencana	1	Diukur dengan tingkat layanan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal pada daerah bencana tahun 2011	

Untuk melaksanakan sembilan program dan merealisasikan penetapan kinerja Kementerian, selama tahun 2011 total pagu anggaran yang digunakan Kemdikbud sebesar sejumlah Rp. 68.146.864.600.000,-

C. KONTRAK KINERJA MENTERI DENGAN PRESIDEN

Kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri Pendidikan Nasional adalah target minimal yang diamanahkan kepada Kemdikbud selama lima tahun ke depan. Kontrak Kinerja menetapkan target yang terukur dalam satuan waktu tertentu dan menjadi arah yang ingin dicapai, sebagai landasan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemdikbud.

Kontrak Kinerja tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap tahun yang ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Nasional. Berikut adalah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang menjadi tanggung jawab Kemdikbud.

1. RENCANA PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN TERKAIT BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2011

a. Inpres No. 3 Tahun 2010

Tabel 2.23 Rencana Pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2010

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI		
Peningkatan akses terhadap SD dan pendidikan lanjutannya	Jumlah Unit TK-SD satu atap yang dibangun	500 unit TK-SD satu atap.
	Jumlah Unit SD-SMP satu atap yang dibangun	400 unit SD-SMP satu atap
Penyelenggaraan Pendidikan keaksaraan fungsional	Tersedianya pelayanan pendidikan non formal dan pendidikan khusus serta pelayanan khusus (siswa)	93.000 siswa
Penyediaan Taman Bacaan masyarakat (TBM)	Jumlah sasaran pengentasan buta aksara (usia 15 tahun ke atas)	555.000 orang (usia 15 tahun ke atas) buta aksara terentaskan.
	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dikembangkan di daerah.	500 unit TBM dikembangkan di 33 provinsi

b. Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2011

Tabel 2.24 Rencana Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2011

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
--------------	-----------------------	---------------------

Pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang bebas korupsi	Sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang transparan dan akuntabel secara on line	Terciptanya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang bebas dari korupsi
---	---	--

c. Hasil Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011

Tabel 2.25 Rencana Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011
Prioritas Nasional 2: Pendidikan

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi		
Peningkatan sistem manajemen BOS	Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen penyaluran BOS melalui transfer daerah	1) Tersusunnya jumlah sasaran BOS SD/SMP pada Februari 2011; 2) Tersusunnya juklak BOS melalui SD/SMP pada Februari 2011; 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi BOS 2011 per triwulan 4. Tersusunnya konsep (PP/Keppres) penyaluran dana BOS berdasarkan evaluasi triwulan II
Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah melalui pembelian hak cipta Penyaluran beasiswa bagi murid-murid yang berprestasi	Makin terjangkaunya buku ajar yang murah dan bermutu bagi siswa dari seluruh kalangan ekonomi Tersalurkannya beasiswa prestasi bagi murid SMP	Tercapainya 100% (300 judul) buku teks pelajaran SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan SMK yang telah dibeli hak ciptanya. Tersalurkannya beasiswa prestasi kepada 30.300 murid SMP dengan tepat waktu dan tepat jumlah paling lambat Desember 2011
Rehabilitasi gedung sekolah	Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen penyaluran DAK melalui transfer daerah	Diterimanya laporan DAK dari 445 Kabupaten/Kota
Regulasi Pemerataan distribusi guru	Tersedianya guru bagi seluruh jenjang pendidikan	Terbitnya SEB yang mendukung adanya pemerataan guru di dalam satu provinsi

Tabel 2.25 Rencana Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011
Prioritas Nasional 2: Pendidikan (*Lanjutan...*)

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
Regulasi Pemerataan distribusi guru Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan Penyempurnaan	Tersedianya guru bagi seluruh jenjang pendidikan Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan termiskin, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS untuk peningkatan gizi Implementasi uji coba	Terbitnya SEB yang mendukung adanya pemerataan guru di dalam satu provinsi Tercapainya 1.200.000 Siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan termiskin, dan kepulauan yang menerima PMTAS secara teratur. Target bulan 12 sejumlah 108 Hari Makan Anak (HMA). Tercapainya 100% pelaksanaan uji coba

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	kurikulum dan metode pembelajaran aktif	kurikulum di 250 satuan pendidikan; diterimanya revisi/masukan/perbaikan sehingga kurikulum siap untuk mulai diimplementasikan secara luas
Pemberdayaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan profesional yang berkesinambungan	Persentase Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK dan Pengawas yang sudah mengikuti pelatihan yang berfokus pada hal yang bersifat praktis	Tercapainya 7,80 % (20.050 kepala sekolah dan pengawas) dari seluruh tenaga kependidikan di tingkat SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti program pelatihan profesional yang berkesinambungan paling lambat bulan Desember 2011 (7,80% untuk tiap tingkatan pendidikan)
Percepatan sertifikasi guru dalam jabatan	Persentase guru TK/SD, SMP, SMA/SMK dan Pengawas yang lulus sertifikasi guru.	Tercapainya 100% (300.000 guru dan pengawas) di tingkat TK/SD SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti program sertifikasi paling lambat bulan Desember 2011
Peningkatan Keselarasan Pendidikan dengan Dunia Usaha melalui Pendidikan Kewirausahaan di SMK dan PT	Jumlah SMK dan PT yang telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship serta pelaksanaan uji coba	Tercapainya 50 PT dan 260 SMK yang telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship, paling lambat Desember 2011
Penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di sekolah	Persentase satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Tercapainya 30% (setara 8.960 sekolah) dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMP dan 60% (setara 6.682 sekolah) dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMA yang telah menerapkan pembelajaran berbasis TIK, paling lambat Desember 2011
Pemantauan dan pemberian insentif serta dukungan bagi siswa berbakat peserta olimpiade ilmiah internasional dan kompetisi internasional lainnya	Jumlah siswa berbakat (baik peserta olimpiade internasional dan kompetisi tingkat tinggi lainnya) yang telah mendapat insentif dan dukungan dari pemerintah	100% peserta olimpiade ilmiah internasional dan kompetisi Internasional lainnya yang telah mendapat insentif dan dukungan dari pemerintah

Tabel 2.26 Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011
Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
Penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga		
Penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah	Jumlah peserta didik jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sasaran beasiswa miskin	Tersalurkannya beasiswa untuk: a. Target 2.040.000 siswa SD/SDLB dari masyarakat berpendapatan rendah; b. Target 961.849 siswa SMP/ SMPLB dari masyarakat berpendapatan rendah; c. Target 308.124 siswa SMA dari masyarakat berpendapatan rendah; d. Target 140.558 siswa SMK dari masyarakat berpendapatan rendah; e. Target 67.000 mahasiswa dari masyarakat berpendapatan rendah

Tabel 2.27 Target Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011
Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik		
Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik	Tersedianya pendidik dan tenaga pendidikan yang menerima tunjangan khusus	Diterimanya tunjangan khusus pada 44.000 orang pendidik dan tenaga pendidikan pada Desember 2011

2. RENCANA PELAKSANAAN KONTRAK KINERJA ANTARA MENTERI DAN PRESIDEN TAHUN 2011

Tabel 2.28 Target Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja waktu	Target 2010	Target 2011
1.	Memastikan tersusunnya Renstra Kementerian 2009-2014	Des. 2009	100%	---
2.	Penyediaan jaringan internet di 17.500 sekolah	Jan 2011	17.500 sek	---
3.	Peningkatan kemampuan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah: 30.000 Pengawas Sekolah tahun 2010; 20.050 kepala sekolah dan pengawas sekolah pada tahun 2011; dan diikuti dengan 200.000 Kepala Sekolah sampai 2014	2010-2014	30.000 PS 30.000 Kepsek	Desember 2011 tercapainya 7,80 % (20.050 kepek dan pengawas) dari seluruh tenaga kependidikan SMP, SMA/SMK yang mengikuti program pelatihan
4.	Peningkatan akses pendidikan dengan:	TA	65.000	Target 67.000 mhs dari masyarakat berpendapatan rendah

	- Beasiswa pendidikan tinggi	2010/2011	mhs	
	- Beasiswa 10.000 siswa SMA berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu		10.000 siswa	(Pemenang lomba2)
5.	Memastikan penetapan kebijakan khusus bagi masyarakat daerah terdepan dan terluar melalui pemberian tunjangan khusus bagi guru	Jan. 2010	46.300 guru	Diterimanya tunjangan khusus pada 44.000 orang PTK pada Desember 2011
6.	Memastikan peningkatan:	Okt. 2014		83,01%
	- APM Sekolah Dasar dari 95% (2009) menjadi 96% pada tahun 2014			
	APM SMP dari 73% (2009) menjadi 76 % pada tahun 2014		55,97%	56,80%
	APK SMA dari 69% (2009) menjadi 85 % pada tahun 2014		61,8%	64,6%

Tabel 2.28 Target Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (Lanjutan...)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja waktu	Target 2010	Target 2011
7	Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS	2012	Pembentukan Tim Manajemen BOS (100%)	Pembentukan Tim Manajemen BOS (100%)
			Buku Panduan BOS ter kirim (100%)	Buku Panduan BOS ter kirim (100%)
			Jlh dana triwulan 1 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 1 SD (100%), SMP (100%)
			triwulan 2 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 2 SD (100%), SMP (100%)
			triwulan 3 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 3 SD (100%), SMP (100%)
			triwulan 4 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 4 SD (100%), SMP (100%)
	Penurunan harga buku standar di SD dan Sekolah Menengah 30-50%	2012	220 judul	Tercapainya 100% (300 judul) buku teks pelajaran SD/SMP/SMA/ SMK sederajat, dan yang

				dibeli hak ciptanya
	Penyediaan Internet ber-content pendidikan di Sekolah Menengah dan terus diperluas hingga SD		20% SMP dan 40% SMA	Tercapainya 30% (setara 8.960 sekolah) dari SMP dan 60% (setara 6.682 sekolah) dari SMA yang telah menerapkan TIK, Desember 2011
8	Memastikan peningkatan APK Perguruan Tinggi dari 18% (2009) menjadi 25 % pada tahun 2014	Okt. 2014	22,8%	25,10%
9	Memastikan penerapan metodologi pendidikan tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem UAN	2011		

Tabel 2.28 Target Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (Lanjutan...)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja waktu	Target 2010	Target 2011
10	Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014	2014		
11	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul. • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance. • Mendorong peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran. • Mendorong peran Dewan Pendidikan di Kabupaten. 	Okt. 2014		
12	<p>Penataan ulang Kurikulum Sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah, dengan diantaranya memasukkan pendidikan kewirausahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Nasional • Kurikulum Daerah • Kurikulum sekolah 	Okt. 2014		Tercapainya 100% pelaksanaan uji coba kurikulum di 250 satuan pendidikan; diterimanya revisi/masukan/perbaikan kurikulum
13	Memastikan peningkatan kualitas	Okt. 2014		Tercapainya 100% (300.000 guru

	<p>guru, pengelolaan dan layanan sekolah melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remediasi kemampuan mengajar guru. - Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar. - Sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK. 			<p>dan pengawas) TK/SD SMP, SMA/SMK yang sudah mengikuti program sertifikasi, Desember 2011</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka luas kerjasama PTN-lembaga pendidikan internasional 			48 kerja sama
	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES. - Perbandingan guru:murid di SD/MI 1:32 dan di SMP/MTS 1:40. 			<p>5 PT</p> <p>Perbandingan guru:murid di SD/MI 1:20 sampai 1:28 dan SMP/MTS 1:20 sampai 1:32</p>

Tabel 2.28 Target Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (*Lanjutan...*)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja waktu	Target 2010	Target 2011
14	<p>Memastikan integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat insidental atau kepada kelompok marginal. - Program keluarga harapan. - Bantuan pangan. - Jaminan sosial bidang kesehatan 	Mulai 2010 dan menjadi program nas. mulai 2011-2012		
	Beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah.			<p>Target siswa SD 4.006.947 (gabungan APBN dan APBN-P - SD LB 83.100 siswa</p> <p>Target 1.028.212 siswa SMP, ditambah APBN-P 504.430 siswa, jadi jumlah 1.532.642 siswa SMP.SMPLB 19.492 siswa</p> <p>Target 308.124 siswa SMA; Target 140.558 siswa SMK</p>
	Pendidikan anak usia dini (PAUD).	Sd bulan Desember 2014		PAUD Terpadu 500 lembaga
	Parenting education.	Mulai 2010-2014		10% Kab/kota menyelenggarakan <i>parenting education</i>
15	Memastikan pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang pendidikan	Paling lambat mulai 2011.		Tercapainya 1.200.000 Siswa TK dan SD yang menerima

	yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan pasca konflik.			PMTAS secara teratur
16	Memastikan pengentasan daerah tertinggal sedikitnya 50 Kabupaten.	Okt. 2014	7 Kab	3 Kab
17	Mengkaji ulang dan mengusulkan perbaikan kebijakan, peraturan dan proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan umum.	Paling lambat Juni 2010		Terbitnya SEB yang mendukung adanya pemerataan guru di dalam satu provinsi
18	Mencapai sasaran-sasaran RENSTRA 2009-2014	Sesuai target waktu		Mengukur pencapaian IKU dan IKK
19	Pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI	Paling lambat Lap. Keu. 2011		Terciptanya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan BOS dengan pola desentralisasi yang bebas dari korupsi

3. RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

Tabel 2.29 Target Sasaran Prioritas RKP 2011

No.	Sasaran Prioritas	Target 2011
	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 th keatas	7,75 th
	Menurunnya angka buta aksara penduduk 15 th keatas	5,17%
	Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A	95,3%
	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A	83,01%
	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTS/Paket B	74,7%
	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B	56,8%
	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C	76,0%

Meningkatnya APK SMA/SMK/Paket C	
Meningkatnya APK PT usia 19-23 th	25,10%
Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat	

Tabel 2.30 Target Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas RKP 2011

	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2011
I	PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR			
1	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota	APM SD/SDLB	84,74%
			Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran	22,00%
2	Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	27.973.000
		Membatkannya gizi siswa TK dan SD melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan	Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS	1.200.000

Tabel 2.30 Target Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas RKP 2011 (Lanjutan...)

	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2011
3	Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP	Tercapainya Keluasan dan pemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota	APM SMP/SMPLB	60,02%
			Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK	34,80%
4	Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SMP/SMPLB	Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	9.965.000
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM	Persentase komite sekolah yang berfungsi efektif	80,00%
			Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui dewan pendidikan	meningkat
II		PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH		
1	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	APK SMK	29,60%
			Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	44,20%
			Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	60,00%
2	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	APK SMA/SMLB nasional	37,00%
			Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	50,00%
III		PROGRAM PENDIDIKANTINGGI		
1	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi	Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan	APK PT usia 19-23 thn	25,10%
			Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES	5
2	Penyediaan Layanan Kelembagaan	Tersedianya Keluasan dan Kemerataan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya Saing Internasional	Jumlah PT mengembangkan kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri	48

Tabel 2.30 Target Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas RKP 2011 (Lanjutan...)

	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2011
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian di lingkungan Ditjen Dikti dan di perguruan tinggi (PT)	Persentase PT BHMN bersertifikat ISO 9001:2008	100,00%
			Persentase PTN (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008	54,00%
			Persentase politeknik negeri	52,00%

	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2011
			bersertifikat ISO 9001:2008	
			Persentase PTS (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008	28,00%
			Persentase PTS (politeknik/akademi) bersertifikat ISO 9001:2008	21,00%
IV		PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
1	Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota	Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:20 sampai 1:28	51,20%
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMP 1:20 sampai 1:32	50,50%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di berbagai bidang	40,00%
3	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Tenaga Kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota	Persentase kepala SD yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	30,00%
			Persentase pengawas SD yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	50,00%
			Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	30,00%
			Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	50,00%

Tabel 2.30 Target Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas RKP 2011 (Lanjutan...)

	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2011
			Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	30,00%
			Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi	50,00%

	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2011
			yang berkualifikasi menurut kab/kota	
4	Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota	Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun	20
			Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi tenaga kependidikan per tahun	20
			Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi PTK-PNF per tahun	20
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN PMP			
1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik			36.75% 1.015.288
2	Persentase Kepala Sekolah Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan			25.0% N=60.169
3	Persentase Pengawas Sekolah Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan			100% N=23.588

D. REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

1. Konsep Reformasi

- Reformasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional dirancang untuk dapat melaksanakan lima misi Kemdikbud yaitu Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian, dengan cara seefisien dan seefektif mungkin.

- Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat mendukung tercapainya efisiensi nasional dalam bidang pendidikan. Efisiensi dapat dicapai bila Kemdikbud bekerja secara efisien (efisiensi internal) dan pemangku kepentingan pendidikan dapat memperoleh layanan dari Kemdikbud dengan cara yang efisien juga (efisiensi eksternal).
- Tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai bila semua kegiatan Kemdikbud dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak menyisakan sedikitpun celah untuk lengah dalam pemberian layanan terbaik kepada semua pemangku kepentingan.

2. Lingkup Reformasi

Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh Kemdikbud mencakup:

- Reformasi yang berorientasi pada perbaikan kondisi internal, yang diistilahkan sebagai Reformasi Birokrasi, dan
- Reformasi yang berorientasi pada perbaikan layanan kepada pihak eksternal yang diistilahkan sebagai Reformasi Layanan.

Sesuai dengan arahan dari Menpan, reformasi birokrasi internal di Kemdikbud mencakup:

- Manajemen Perubahan
- Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Penataan dan Penguatan Organisasi
- Penataan Tata Laksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- Penguatan Pengawasan
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (layanan satuan pendidikan, layanan peserta didik, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan substansi pendidikan).

Sedangkan reformasi Layanan Pendidikan dilaksanakan dengan bertumpu pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga layanan dapat diberikan dari mana saja, kapan saja, dengan menggunakan media apa saja.

3. Pendekatan Reformasi

Gambar 2.1. Konsep Reformasi Birokrasi Kemdikbud

Reformasi birokrasi Kemdikbud, sesuai arahan MenPAN-RB, menekankan pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (layanan satuan pendidikan, layanan peserta didik, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan substansi pendidikan). Dalam penataan dan penguatan SDM, dilakukan melalui manajemen perubahan budaya kerja melalui perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak.

Gambar 2.2. Reformasi layanan Kemdikbud

Reformasi Layanan Kemdikbud dilakukan melalui rekayasa ulang proses layanan menjadi berfokus pada publik (yang dilayani), mengedepankan peran fungsi layanan (bukannya unit kerja), dengan berbasis pada informasi yang diperlukan untuk memberikan layanan (bukan dokumen fisiknya), serta menekankan pentingnya berbagi informasi dan aktivitas sehingga tidak perlu terjadi pengulangan proses dan pendataan. Semuanya ini dilakukan melalui penguatan dan penataan peran SDM dan penyediaan dukungan sistem berbasis TIK.

4. Agenda Reformasi

Berikut adalah rencana kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemdikbud yang akan dilakukan selama tahun 2011 yang mencakup 8 (delapan) area perubahan:

1. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Penguatan organisasi UPT dan badan pendukung
2. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a. Analisis jabatan dan beban kerja
 - b. Peningkatan kompetensi
 - c. Pemeringkatan dan remunerasi
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- a. Pembangunan sistem peraturan perundang-undangan
4. Program Penataan Tata Laksana
- a. Rekayasa proses, simplifikasi dan integrasi prosedur
 - b. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
 - c. Pembangunan sistem pengelolaan barang milik Negara
 - d. Perencanaan sistem akuntansi dan keuangan
 - e. Implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kinerja
 - f. Perencanaan pengembangan sistem manajemen dokumen
 - g. Pembangunan Pangkalan Data PT
 - h. Perencanaan pengorganisasian data Kemdiknas
 - i. Pengembangan pusat layanan prima pendidikan nasional
5. Program Penguatan Pengawasan
- a. Penyusunan *database* pengawasan
6. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- a. Manajemen kinerja individu
 - b. Perencanaan ulang sistem pengelolaan kinerja organisasi
7. Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- a. Peningkatan Layanan Peserta Didik
 - Sistem perizinan
 - Sistem penjaminan bersekolah
 - Sistem penyaluran beasiswa

b. Peningkatan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Sistem penyediaan dan pendistribusian PTK
- Sistem pendataan PTK
- Sistem penyaluran beasiswa
- Sistem perhitungan angka kredit dan pengelolaan mutasi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi

c. Peningkatan Layanan Satuan Pendidikan

- Integrasi sistem perizinan, sistem pengakreditasi dan sistem penyaluran Hibah dan pemantauannya (Dikdas, Dikmen)
- Pengembangan standar pendidikan
- Sistem pemetaan sekolah, daya tampung, dan cakupan layanan

d. Peningkatan Layanan Substansi Pendidikan

- Sistem pembelajaran dan berbagi materi
- Implementasi pendidikan karakter, kewirausahaan
- Integrasi materi e-pembelajaran (kurikulum sampai dengan UN)
- Penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja

8. Program Manajemen Perubahan

Penerapan Budaya Kerja dan Manajemen Perubahan Sesuai Dengan Tata Nilai Kemdikbud.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMDIKBUD

Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2011, Kemdikbud berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Kemdikbud dari Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2011. Selain capaian kinerja dari penetapan kinerja, dalam bab ini juga diuraikan capaian kinerja dari kontrak kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Presiden dan capaian reformasi birokrasi serta capaian kinerja Kementerian lainnya dalam bidang pendidikan.

A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pada tahun 2011 Kemdikbud menetapkan sembilan program pembangunan pendidikan seperti tercantum dalam perencanaan kinerja. Pengelompokan program pembangunan pendidikan disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan manajemen. Program dukungan manajemen yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Kesembilan program tersebut meliputi :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
2. Program Pendidikan Dasar
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Tinggi
5. Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Program Penelitian dan Pengembangan

7. Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Kemdikbud berkewajiban untuk merealisasikan target-target kinerja secara bertahap setiap tahunnya, sehingga capaian kinerja program tersebut dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Berikut adalah capaian kinerja dari penetapan kinerja tahun 2011 yang diperjanjikan. Uraian dari capaian penetapan kinerja Kemdikbud 2011 tersebut terbagi atas masing-masing program di sembilan unit utama di lingkungan Kemdikbud.

1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL

Capaian program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung dua tujuan strategis, yaitu:

1. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T1);
2. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Ketercapaian dua tujuan strategis tersebut dapat dilihat dari keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapainya. Daya serap anggaran dan Ketercapaian IKU program PAUDNI dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Daya Serap Anggaran Program PAUDNI

Program	Anggaran	%		
		Pagu	Realisasi	
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	3.655.771.153.000	2.991.650.531.000	89.08	

Tabel 3.2 Capaian IKU Program PAUDNI

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2010	Tahun 2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
S1.1	Meningkatnya APK PAUD (TK,KB,TPA,SPS) nasional mencapai 45,05%	1	APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	29,6%	21,42%	33,67%	29.6%	87.91
		2	Lembaga PAUD yang berakreditasi	0,5%	0,17%	2,5%	23,38%	935.2
		3	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Program PAUD-NI	40%	0%	50	50%	100
		4	Persentase PTK PAUD-NI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	11,75%	11,75%	20,41	19,59%	96
		5	Persentase PTK PAUD-NI Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	1,36%	10%	1,38	1,20%	87
S5.1	Sekurang-kurangnya 20% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi	1	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	2%	3,45%	5,0	5,48%	109.6
		2	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup	12%	11,42%	13%	8,17%	62.85

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2010	Tahun 2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
		3	Persentase PKBM Berakreditasi	40%	0%	50	81%	162
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan	1	Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	14%	15,69%	23	48,7%	211.7
S5.3	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi parenting education	1	Persentase Kab/Kota Yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education	-	8,35%	10	20,42%	204.2

Tabel 3.2 Capaian IKU Program PAUDNI (Lanjutan...)

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2010	Tahun 2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
SG.3	Menurunnya tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 4.2%	1	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia > 15 Tahun	5,0%	4,79%	4,8	4,59%	104.38
		2	% Kabupaten/ Kota Yang Telah Memiliki Minimal 10 TBM	34%	25%	46,0	36%	78.3

1. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan APK PAUDNI, yaitu dari 21,42% menjadi 29,6%. Peningkatan APK ini tergambar dari peningkatan jumlah lembaga PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS) pada tahun 2010 berjumlah 114.888 lembaga menjadi 132.942 lembaga. Peningkatan jumlah lembaga ini menggambarkan pula bahwa persentase kecamatan yang menyelenggarakan Program PAUDNI dapat tercapai sesuai target. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat PAUD pada tahun 2011 untuk mendorong peningkatan APK PAUD diantaranya adalah pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diberikan kepada 1.912.322 anak. Diharapkan dengan adanya BOP tersebut dapat mendorong keberlanjutan lembaga-lembaga PAUD dalam memberikan layanan yang maksimal. Untuk perluasan akses dan layanan pada tahun 2011 selain diberikan bantuan dana rintisan Program PAUD juga mulai disosialisasikan PAUD terpadu yang diujicobakan di 10 kabupaten di wilayah kluster IV.
2. Untuk lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2011 dapat dicapai 23,38%. Pencapaian ini diperoleh dari kontribusi TK dengan jumlah

lembaga yang telah mendapatkan akreditasi program dan BAN SM sejumlah 29.116 lembaga. Sedangkan untuk lembaga PAUD Nonformal (KB,TPA dan SPS) baru 84 lembaga.

Pada tahun 2011 ini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini telah memberikan bantuan kepada 485 lembaga untuk mendorong lembaga PAUD Nonformal memperoleh akreditasi dari BAN PNF. Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong akreditasi lembaga PAUD adalah melakukan pendampingan kepada lembaga melalui kerjasama dengan organisasi mitra.

3. Persentase kecamatan yang menyelenggarakan program PAUDNI dapat mencapai target.
4. Persentase PTK PAUDNI yang mengikuti Peningkatan Kompetensi dari target 20,41% karena keterbatasan ketersediaan anggaran pada tahun 2011 hanya dapat menjangkau 19,59 %.
5. Jumlah model percontohan PAUDNI yang dikembangkan di tingkat regional pada tahun 2011 mencapai 53 model dari target 45 model yang ditetapkan. Pencapaian ini dikarenakan P2PNFI dan BPPNFI sebagai UPT Ditjen PAUDNI mendapat alokasi anggaran yang lebih, sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi. Alokasi tersebut dipergunakan untuk mengembangkan model.
6. Persentase lembaga PAUDNI yang mendapatkan pengendalian mutu pada tahun 2011 mencapai 6% dari target 6% yang ditetapkan.
7. Pencapaian persentase PTK PAUDNI memperoleh penghargaan dan perlindungan dari yang ditargetkan 1,36% hanya dapat dicapai 1,20%. Ketidak tercapaian target IKU ini disebabkan karena adanya efisiensi dana pada awal tahun 2011. Sebagian anggaran yang tersedia untuk kegiatan advokasi dan bantuan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bentuk perlindungan hukum dialihkan menjadi pemberdayaan Orsosmas guna pembinaan PTK PAUDNI.
8. Upaya untuk mendorong tercapainya target akreditasi kursus, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menyiapkan dan meningkatkan mutu lembaga kursus melalui penilaian kinerja terhadap lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang dinilai kinerjanya pada tahun ini sebanyak 1.500 LKP atau sekitar 10,34% dari total lembaga kursus dan pelatihan yang ada saat ini. Dengan hasil penilaian kinerja LKP diharapkan dapat mendorong percepatan proses

akreditasi LKP. Jumlah LKP yang terakreditasi programnya hingga akhir September tahun 2011 sebanyak 767 atau sekitar 5,48% dari total LKP yang ada, sedangkan target yang diakreditasi sebesar 5% yang berarti telah melebihi target Renstra.

9. Jumlah peserta program PKH masih belum memenuhi target rencana strategis yang ditetapkan yaitu 13% atau 201.416 orang dari angka lulus SMP tidak melanjutkan, putus sekolah menengah atau sederajat, dan lulus Sekolah Menengah atau sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sekitar 1.500.000 orang (data PSP Balitbang Diknas 2008/2009). Jumlah peserta program PKH hanya terealisasi sebesar 8,17% atau 122.573 orang dari 119.919 orang pada tahun ini. Ketidak tercapaian target sasaran peserta program PKH ini dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun ini, hanya mampu menampung 119.919 orang meskipun realisasinya melebihi target sasaran.
10. Pencapaian target kabupaten/kota yang menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan pada tahun 2011 telah mencapai 48,7% atau sebanyak 244 kab/kota telah melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Pencapaian target yang terlampaui pada tahun 2011 disamping dialokasikan penyelenggaraan PUG Bidang Pendidikan pada Kab/Kota yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 sebanyak 6 Kab, tahun 2009 sebanyak 12 Kab/Kota, tahun 2010 sebanyak 42 kab/kota dan tahun 2011 sebanyak 54 Kab/Kota serta didukung oleh fasilitasi dari setiap propinsi untuk membentuk Pokja Kab/kota sebanyak 2 Kab/Kota per propinsi.
11. Pencapaian persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education (pendidikan keorangtuaan) pada tahun 2011 telah mencapai 20,24% dari target 10%. Hal tersebut dimungkinkan sebagai akibat positif dari penambahan anggaran untuk kegiatan pendidikan keorangtuaan melalui anggaran biaya tambahan (APBN-P) baik pada tahun 2010 maupun tahun 2011.
12. Pencapaian persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun telah lebih dari yang ditargetkan yaitu sebesar 4,59% artinya jumlah penyandang buta aksara mengalami penurunan lebih dari target sebesar 0,21%.
13. Pencapaian persentase PKBM berakreditasi tidak dapat kami sampaikan capaiannya karena yang melakukan penilaian akreditasi adalah BAN-PNF bukan Ditjen PAUDNI. Oleh karena itu, kami sedang mengusulkan perubahan untuk IKU pada tahun 2011, menjadi persentase PKBM

bernomor induk lembaga (NILEM) karena Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2011 telah melakukan pendataan dan hasilnya adalah sebanyak 81% PKBM telah memiliki nomor induk.

14. Persentase Kabupaten/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM, dari target 35% telah dapat melampaui dengan capaian sebesar 36%.
15. Pencapaian persentase PKBM berakreditasi tidak dapat kami sampaikan capaiannya karena yang melakukan penilaian akreditasi adalah BAN-PNF bukan Ditjen PAUDNI. Oleh karena itu, kami sedang mengusulkan perubahan untuk IKU pada tahun 2011, menjadi persentase PKBM bernomor induk lembaga (NILEM) karena Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2011 telah melakukan pendataan dan hasilnya adalah sebanyak 36% PKBM telah memiliki nomor induk.

2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Program pendidikan dasar merupakan program yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud untuk mendukung tujuan strategis kedua (T2) yaitu: Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Ketercapaian tujuan strategis kedua (T2) dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam program pendidikan dasar tersebut dapat diukur dari ketercapaian beberapa Indikator Kinerjanya. Daya serap anggaran dan Ketercapaian IKU program pendidikan dasar dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Daya Serap Anggaran Program Pendidikan Dasar

Program	Anggaran	%		
		Pagu	Realisasi	
Pendidikan Dasar		17.203.228.647	15.735.022.717	91,47

Tabel 3.4 Capaian IKU Program Pendidikan Dasar

Sasaran	Indikator Kinerja	2010	2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
S2.1	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83,57%.	1	APM SD/SDLB/Paket A	82,94%	85.31%	83,01	85,58	103
S2.2	Menurunnya APS Kelompok Usia 7-12	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB	1,5%	1.65%	1,3	0.84	154.8

S2.3	Tahun mencapai 0.7% Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76,53%	1	Putus Sekolah APK SMP/SMPLB/ Paket B	71,98%	72.46%	73,28	75,41	103
S2.4	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58,17%	1	APM SMP/SMPLB/Paket B	55,97%	54.98%	56,80	56,07	99
S2.5	Menurunnya APS Kelompok Usia 13-15 Tahun mencapai 1%	1	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,8%	2.49/ 2.33	1,6	1,57	102
S2.7	Menurunnya angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, meningkatnya angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya 97%	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%	1.65%	1,3	0.84	154.8
		2	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1.8%	2.49	1,6	1,57	102
		3	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan	91%	76%	93	93	100
S2.8	Meningkatnya angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB ke sekolah menengah sekurang-kurangnya 94%	1	Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	88%	97.01%	89	96.2	108
S2.9	Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi	1	Persentase SD/SDLB Berakreditasi	45%	75.8%	53	58	109
		2	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	21,3%	70.9%	33.7	52	154

Tabel 3.4 Capaian IKU Program Pendidikan Dasar (Lanjutan...)

Sasaran	Indikator Kinerja	2010	2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
S2.10	Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B	1	Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B	28%	53. 61%	46	36	78
		2	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B	30%	-	50	24,6	49
S2.11	Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran	1	Persentase SD Menerapkan e-Pembelajaran	16%	16%	22	21,6	98
		2	Persentase SD memiliki fasilitas internet	10%	10%	15	22,2	148
		3	Persentase SMP Menerapkan e-Pembelajaran	20%	20%	30	34,6	115
		4	Persentase SMP memiliki fasilitas internet	20%	20%	30	42,6	142
S2.12	Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI	1	Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI	39,4%	37. 36%	50,8	54,5	107

S2.13	Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI	2	Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	160	12	173	206	119
		1	Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI	33%/ 50%	72.64%/ 36.01%	56	58	104
		2	Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	160	12	173	206	119
S2.14	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat	1	Persentase guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	36%	35%	46	46	100
		2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%	Tunjangan khusus = 34.560 org ; Tunjangan Fungsional = 293.215 org Tunjangan profesi = 148.509 org	100	99,98	99.98

Tabel 3.4 Capaian IKU Program Pendidikan Dasar (Lanjutan...)

Sasaran	Indikator Kinerja	2010	2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
S2.15	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;	1	Persentase guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	77%	76	83	81	98
		2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%	100%	100%	99,98	99.98
S2.16	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;	1	Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%	3%	5%	11	220
		2	Rasio Guru Terhadap Siswa SD	1:33	1:32	1:31	1:30	Tercapai
		3	Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%	3%	5%	21	420
		4	Rasio Guru Terhadap Siswa SMP	1:34	1:34	1:34	1:32	Tercapai
S2.17	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%	1.65%	1,3%	0.84	154.8

S5.2	meningkatnya angka melanjutkan minimal 94 % dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar	2	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan pendidikan	91%	76%	93%	93	100
		1	Rasio kesetaraan gender SD/SDLB	97,2%	97.03%	97,4%	97,5	100.10
S7.4	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan; Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar	1	Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM	60%	60%	75%	75	100
		2	Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM	55%	55%	60%	75	125
		3	Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%	3%	5%	11	220
		4	Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%	3%	5%	21	420
		5	Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai SPM	25%	25%	35%	35	100

Tabel 3.4 Capaian IKU Program Pendidikan Dasar (Lanjutan...)

Sasaran	Indikator Kinerja	2010	2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1	APM SD/SDLB/Paket A	82,94%	85.31%	83,01%	85,58	103
		2	APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	71,98%	72.46	73,28%	75,41	103
		3	APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	55,97%	86.79	56,80%	56,07	99

Dari tabel pengukuran kinerja diatas, terdapat 4 (empat) IKU yang mencapai target 100%,19 IKU yang melebihi target, dan 6 IKU yang belum mencapai target. Terhadap ketidaktercapaian/ketercapaian IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) “meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83.01%”. Realisasi mencapai 85,31% melebihi target yang telah ditetapkan. Ketercapaian target ini didukung oleh kegiatan Bantuan Operasional Sekolah dengan sasaran 27.225.299 siswa. Subsidi operasional Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan khusus SDLB

dengan sasaran 112 lembaga yang meliputi 99.724 siswa. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD dengan sasaran 2.040.800 siswa di 33 provinsi. Rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB SD, yang mencakup 21.500 ruang kelas.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) “menurunnya angka putus sekolah kelompok usia 7-12% mencapai 1.3%”. Realisasi angka putus sekolah 0.84% melampaui target yang telah ditetapkan, dengan presentase sebesar 154.8%. Menurunnya angka putus sekolah tersebut didukung oleh adanya program retrieval dan remedial sebanyak 21.030 siswa. Selain itu di beberapa daerah bencana alam telah dilakukan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 1.123 ruang.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) “meningkatnya angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya 97%”. Realisasi terhadap persentase lulusan Sekolah Dasar yang melanjutkan mencapai 93% sesuai target yang ditetapkan. Tingkat kesadaran untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dipacu melalui capaian output berupa pembinaan pendidikan karakter bangsa dalam bentuk pembinaan akhlak mulia di 200 sekolah, pembinaan kewarganegaraan di 710 sekolah, pendidikan estetika 530 sekolah, pendidikan kesehatan jasmani 334 sekolah, pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan pembangunan berkelanjutan sebanyak 33 sekolah, pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah sebanyak 421 lembaga.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) “sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70,9% SMP/SMPLB diakreditasi”. Kinerja sasaran mencapai 110% untuk SD/SDLB dari target yang ditetapkan 53% terealisasi 58%. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi mencapai 104% yang ditargetkan 50% terealisasi 52%. Ketercapaian target ini melalui: Subsidi rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB SD, sebanyak 450 ruang, pembinaan klub olahraga SD mencakup 99 SD, pembangunan ruang perpustakaan dan PSB SD yang mencakup sasaran 198 SD.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) “sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB diakreditasi”. Target persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B adalah sebesar 46%, namun hanya terealisasi 36%. Output pendukung sasaran tersebut adalah Peningkatan Standar Kelulusan 318 sekolah, Standar Proses dan Penilaian 9.800 sekolah. Kegagalan capaian sebesar 10% disebabkan oleh tidak tercapainya target sasaran. Sementara itu untuk SMP/SMPLB target 33% terealisasi 24,6%.

Output pendukung sasaran tersebut adalah mendorong penerapan KTSP di 3.039 sekolah. Kegagalan 5,4% disebabkan oleh masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai pada sebagian besar sekolah.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota yang memiliki SD RSBI/SBI”. Target kabupaten/kota memiliki SD RSBI/SBI adalah 50,8% dengan capaian kinerja melampaui yaitu sebesar 54,5%. Adapun upaya peningkatan capaian tersebut melalui penambahan SD RSBI/SBI sebanyak 60. Untuk memacu tumbuhnya RSBI/SBI telah dilakukan pembinaan SDSN sebanyak 1.895 sekolah. Sementara itu nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar dengan target 173 dapat mencapai 206. Ketercapaian ini antara lain disebabkan oleh perolehan medali pada cabang-cabang kompetisi internasional.
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota yang memiliki SMP RSBI/SBI”. Target kabupaten/kota memiliki RSBI/SBI adalah 56% capaian sasaran sebesar 58% Sasaran ini dicapai melalui subsidi rintisan dan pembangunan SMP bertaraf internasional (RSBI) baru terhadap 311 sekolah, dan pembinaan SMP SSN sebanyak 2.443 sekolah. Sementara itu nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar dengan target 173 dapat mencapai 206. Ketercapaian ini antara lain disebabkan oleh perolehan medali pada cabang-cabang kompetisi internasional.
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Sekurang-kurangnya 82% guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat. Presentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi Akademik S-1/D-4 mencapai 100%. Dari sasaran target 46% tercapai sejumlah tersebut. Sementara itu, persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan 100% yang didukung melalui pemberian tunjangan khusus sebanyak 44.076 orang, tunjangan fungsional 269.007 orang, tunjangan profesi 101.511 orang, tunjangan kualifikasi sebanyak 164.274 orang, dan tunjangan lainnya 182 orang.
9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekurang-kurangnya 98% guru SMP/SMPLB berkualitas S-1/D-4 dan 90% bersertifikat. Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S-1/D-4 ditargetkan sebesar 83%, namun hanya terealisasi 81 persen. Kendala dalam mencapai jumlah guru sesuai dengan kualifikasi tersebut adalah karena sebagian besar guru yang

belum sertifikasi memiliki kualifikasi akademik SMA. Sementara itu untuk memenuhi persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan sebesar 100% tercapai 99,99%.

10. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekurang-kurangnya 60% kab/kota telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:20 sampai 1:28 dan SMP 1:20 sampai 1:32. Sasaran persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM adalah 5% tercapai 11%. Peningkatan capaian melebihi target yang ditentukan tersebut adalah dengan dilaksanakannya pembangunan laboratorium IPA sebanyak 600 ruang, pembangunan perpustakaan 500 unit, dan pembinaan KTSP pada 3.039 sekolah. Sedangkan rasio guru terhadap siswa SD adalah sebesar 1:31 tercapai melebihi target tersebut yaitu 1:30. Sementara itu untuk persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap murid sesuai SPM adalah 21% melebihi target yang ditetapkan sebesar 5%. Dengan demikian rasio guru terhadap siswa SMP juga melampaui target yaitu 1:32 dari target 1:34.
11. Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95% dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidikan dasar. Sasaran persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah adalah sebesar 1,30%. Realisasi angka putus sekolah sebesar 0.84%. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan layanan akses dan mutu untuk pendidikan di daerah perbatasan, terpencil dan tertinggal sebanyak 335 sekolah. Sementara itu yang melanjutkan ditargetkan sebesar 93%, tercapai sebesar 93%. Kendala dalam mendorong jumlah lulusan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi adalah antara lain masih terdapatnya 120 kabupaten/kota dengan hasil ujian nasional rendah.
12. Indikator Kinerja Utama (IKU) rasio kesetaraan gender SD/SDLB adalah 97,4% dan terealisasi 97,5% dengan persentase capaian sebesar 100.1%. IKU tersebut digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari sasaran “sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan”.
13. Indikator Kinerja Utama (IKU) Seluruh kab/kota telah melaksanakan SPM pendidikan dasar. Jumlah kab/kota tahun 2011 adalah 495 lembaga, adapun sasaran persentase SD/SDLB memenuhi SPM adalah 75% dan tercapai angka tersebut. Persentase SMP/SMPLB memenuhi SPM mencapai 75% melampaui sasaran sebesar 60%. Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM adalah 11% melampaui

target yang 5%. Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM adalah 21% melampaui target yang 5%. Persentase kab/kota yang memiliki tenaga kependidikan sesuai SPM adalah 35% sesuai target yg ditetapkan.

14. Indikator Kinerja Utama (IKU) APM SD/SDLB/Paket A tingkat realisasi target ini sebesar 85.58%, dari target yang ditetapkan sebesar 83.01%; untuk pendidikan dasar APK SD telah melampaui target yaitu 104%, Sementara jenjang APK SMP/SMPLB/Paket B baru mencapai 75,41%, dari target yang ditetapkan sebesar 73.28%. kedua IKU tersebut untuk mendukung tercapainya sasaran APK pada pendidikan dasar pada sasaran “meningkatnya APK gabungan pendidikan pendidikan dasar, menengah dan tinggi sekurang-kurangnya 86.3%”.

3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Program pendidikan menengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud, untuk mendukung tujuan strategis ketiga (T3) yaitu: Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Ketercapaian tujuan strategis ketiga (T3) dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam program pendidikan menengah tersebut dapat di ukur/di lihat dari ketercapaian beberapa Indikator Kinerjanya. Daya serap anggaran dan Ketercapaian IKU program pendidikan menengah dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Daya Serap Anggaran Program Pendidikan Menengah

Program	Anggaran	%	
		Pagu	Realisasi
Pendidikan Menengah		8.405.414.000.000	7.248.688.000.000 86.24

Tabel 3.6 Capaian IKU Program Pendidikan Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010		2011		%		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
S3.1	Meningkatnya APK nasional melampaui 70.7%,	1	APK SMA/SMLB/SMK/ Paket C	61,8%	65%	64,6	68	105.3
S3.2	Sekurang-kurangnya 95.5% SMA/SMLB	1	Persentase SMA/SMLB	70,7%	82.8%	76,8	82.42	104.6

	berakreditasi, dan 40%-nyanya berakreditasi minimal B	Berakreditasi							
		2	Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B	23,4%	41.2%	27,5	50.45	183.4	
		3	Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan lokal	12,0%	20%	19	23.34	122.8	
		4	Rasio guru terhadap siswa SM	1:28	1:28	1:29	1:20 (SMA)	145	
							1:15 (SMK)	193.3	
S3.3	Sekurang-kurangnya 95.5% SMK berakreditasi, dan 30%-nyanya berakreditasi minimal B;	1	Persentase SMK Berakreditasi	70,7%	63.09%	76,8	74.89	97.51	
		2	Persentase SMK Berakreditasi Minimal B	22%	36%	24,0	40.93	170.5	
		3	Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	49%	49%	58	55.32	95.38	
		4	Rasio guru terhadap siswa SM	1:28	1:28	1:29	1:20 (SMA)	145	
							1:15 (SMK)	193.3	
S3.5	Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI;	1	Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMA SBI/RSBI	28,4%	42.25%	38,8	40.84	105.3	
		2	Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMK RSBI/SBI	62%	66.45%	64	66.45	103.8	

Tabel 3.6 Capaian IKU Program Pendidikan Menengah (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%					
		Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7			
		3	Nilai total tertimbang medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan menengah		22	31	24	29	120.8
		4	Persentase sekolah menengah dengan rasio guru terhadap siswa antara 1:20 sampai dengan 1:32		46%	50.4%	48	47.5	98.96
		5	Persentase kab/kota yang memiliki rasio pengawas:SM minimal 1:15		85%	85%	90	100	111.1

S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;	1	Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	77.1%	91.79%	82,8	91.90	110.99
		2	Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	87,6%	86.75%	89,5	87.33	97.03
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008	1	Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	25,6%	8%	44,2	24.41	55.22
		2	Jumlah SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001/2008	316	316	612	373	60.95
S3.8	Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran	1	Persentase SMA/SMALB yang memiliki e-perpustakaan	10%	6.5%	15	15	100
		2	persentase SMA/SMALB yang memiliki lab.komputer	24.5%	61%	45,4	63.86	140.7
		3	Persentase SMK yang memiliki e-perpustakaan	20%	32%	40	40	100
		4	Persentase SMA/SMALB yang memiliki laboratorium multimedia	70%	70%	78	118.35	151.7
S3.9	Sekurang-kurangnya 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan	1	Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	23.4%	60%	27,5	77	280

Tabel 3.6 Capaian IKU Program Pendidikan Menengah (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
S3.1 0	Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan	1	persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	49%	49%	58	53.68	95.38
		2	Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	23.4%	48%	27,5	77	280
S3.1 2	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka	1	persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA	1.93%	1.90%	1,86	1.86	100

	melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1.69 % untuk jenjang pendidikan menengah							
S3.1 3	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95%	1	Rasio kesetaraan gender SMA/SMK/SMLB	77%	23.4%	81	81.80	101
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%	1	APK SMA/SMLB/SMK/ Paket C	61,8%	65%	64,6	68	105.3

Sesuai dengan tabel pengukuran kinerja di atas, dari 24 IKU yang ada dalam program pendidikan menengah terdapat 18 IKU yang telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan dan 6 IKU belum dapat mencapai target.

Secara rinci ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase SMK Berakreditasi

Target tahun 2011 adalah sebesar 76,8% dan hasil capaiannya sebesar 74,89%, pada indikator ini target tidak terpenuhi hal tersebut diakibatkan pada tahun 2011 Direktorat pembinaan SMK tidak mengalokasikan anggaran untuk melakukan akreditasi sekolah SMK secara langsung, karena pelaksanaan akreditasi SMK dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Akreditasi Nasional sekolah dan Madrasah. Penyebab lainnya adalah keterbatasan asesor yang memahami tentang bidang keahlian yang ada di SMK. Namun demikian Direktorat Pembinaan SMK telah melaksanakan sosialisasi program kepada dinas pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota untuk lebih intensif melakukan pembinaan dalam rangka memenuhi kriteria penilaian akreditasi sekolah SMK. Direktorat pembinaan SMK juga telah memfasilitasi pelatihan asesor bekerjasama dengan Badan Akreditasi nasional (BAN S/M).

2. Persentase sekolah menengah dengan rasio guru terhadap siswa antara 1:20 sampai dengan 1:32

Target tahun 2011 adalah sebesar 48% dan hasil capaian sebesar 47,5%. Penyebab ketidakcapaian target ini adalah persoalan distribusi. Diantaranya masih terdapat ketimpangan penyelenggaraan pendidikan di daerah perkotaan dengan daerah terpencil dan terisolir. Umumnya sekolah-

sekolah di perkotaan ketersediaan guru tidak mengalami permasalahan bahkan melebihi rasio guru terhadap siswa. Sebaliknya, daerah terpencil masih banyak kekurangan guru. Dari segi kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat mengintervensi masalah distribusi guru secara langsung, karena hal ini kebijakan desentralisasi pendidikan. Diharapkan dimasa yang akan datang akan dilakukan pemetaan dengan lebih seksama dan mensosialisasikan kepada pengelola pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah agar kecukupan rasio antara siswa dan guru dapat terpenuhi secara seimbang.

3. Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4

Target tahun 2011 adalah sebesar 90% dan realiasi sebesar 87,33%. Capaian indikator ini tercapai 97,03%. Ketidaktercapaian target ini disebabkan 1) perubahan jumlah satuan pendidikan yang signifikan; 2) banyaknya guru swasta yang mengangkat guru honorer yang tidak memenuhi kualifikasi S-1/D4. 3) Kurangnya minat guru untuk melanjutkan pendidikan S-1/D4, khusus guru-guru yang menjelang usia pensiun. Tindaklanjut Direktorat P2TK Ditjen. Dikmen tahun 2011; 1) memberikan bantuan beasiswa kualifikasi untuk guru-guru SMK S-1/D-4; 3) mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah agar tidak mengangkat guru yang belum berkualifikasi S-1/D-4 dan mempersiapkan dan mengangkat guru bantu pengganti pensiun.

1. Presentase SMK bersertifikat ISO 9001 : 2000/9001 : 2008

Tahun 2011 target SMK bersertifikat ISO 44,2% (4.351 sekolah), tercapai 24,41% (2410 sekolah) dari 9875 jumlah SMK. Ketercapaian indikator ini hanya 55,22%. Penyebab ketidacapaian target ini adalah keterbatasan alokasi dana yang disediakan guna mendukung tercapainya SMK bersertifikasi ISO. Untuk tahun berikutnya, pembiayaan SMK agar bersertifikat ISO dapat dilakukan dan disediakan secara bersama-sama baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Direktorat Pembinaan SMK telah melakukan pelatihan kepada SMK yang sudah bersertifikat ISO untuk memandu SMK lainnya yang belum mendapatkan sertifikat ISO, sehingga lebih dari 50 % SMK telah menerapkan prinsip-prinsip ISO, walau belum mendapatkan sertifikat ISO dari lembaga yang berwenang mensertifikasi ISO.

4. Presentase SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001 : 2000/9001 : 2008

Target tahun 2010 berjumlah 316 SMA/SMLB tercapai sebesar 100%. Tahun 2011 target SMA/SMLB bersertifikat ISO sebanyak 612

SMA/SMLB, sedangkan realisasi hanya tercapai 373 (363 SMA dan 10 SMLB). Capaian kinerja untuk indikator ini hanya mencapai 60,95%). Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan keterbatasan alokasi dana yang disediakan guna mendukung tercapainya SMA/SMLB yang bersertifikasi ISO sesuai target yang diharapkan. Sebaiknya pembiayaan SMA/SMLB bersertifikat ISO harus disediakan secara bersama-sama baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu, peran dan kepedulian pemerintah daerah perlu terus didorong.

5. Prosentase Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal

Ditargetkan pada tahun 2011 untuk SMK berbasis keunggulan lokal mencapai 58% (288 sekolah) sedangkan realisasinya mencapai 55,32% (267 sekolah). Capaian indikator ini tercapai 92,55%. Ketidaktercapaian target ini disebabkan karena peran dari masing-masing pemerintah daerah belum maksimal utamanya dalam mendukung pendidikan berbasis keunggulan lokal. Padahal pendidikan saat ini perlu diarahkan pada multi skill. Untuk itu, model pembelajaran SMK berbasis keunggulan lokal ini harus banyak dilakukan dalam bentuk praktek dan bekerjasama dengan dunia usaha. Untuk itu, faktor kejelian dari pemerintah daerah untuk melihat potensi dan keunggulan lokal daerahnya masing-masing dalam mengembangkan pendidikan yang berbasiskan keterampilan dan keahlian. Di sisi lain pemetaan keunggulan lokal harus dapat dilaksanakan, sehingga memudahkan pembinaan dan pencapaian target kinerja.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaian realisasi target kerjanya telah mencapai target dan melebihi 100% adalah sebagai berikut:

1. APK SMA/SMALB/SMK/Paket C

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah pada tahun 2011 mencapai 68%. Capaian ini melebihi dari apa yang telah ditargetkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 64,66%. Terjadi peningkatan APK Sekolah Menengah sebesar 3,34% yang tersebar di 33 propinsi. Program yang mendukung peningkatan APK meliputi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK/SMLB. Selain program pembangunan USB SMA/SMK/SMLB, untuk peningkatan dan perluasan daya tampung ruang kelas, rehabilitasi ruangan sekolah serta pemberian Bantuan Khusus Murid Miskin dan BOMM Sekolah Menengah.

2. Prosentase SMA/SMALB Berakreditasi

Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 70,7% sedangkan realisasinya mencapai 82,8%. Sedangkan target tahun 2011 sebesar 76,8% dan realisasi tercapai 82,42%. Ketercapaian indikator kinerja ini adalah 104,59%. Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Pembinaan SMA dan hasil koordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah, diperoleh jumlah SMA yang sudah terakreditasi baik A, B dan C sebanyak sekitar 9.540 sekolah (82,42%) dari jumlah SMA secara keseluruhan sebanyak 11.575 SMA negeri dan swasta.

3. Prosentase SMA/SMALB Berakreditasi Minimal B

Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 23,4% sedangkan realisasinya mencapai 41,2%. Tahun 2011 target ditetapkan 27,5% realisasi 50,45%. Ketercapaian target SMA/SMALB berakreditasi melebihi yang ditentukan yaitu sebesar 183,45%. Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Pembinaan SMA, jumlah SMA terakreditasi minimal B sebanyak 5.473 SMA.

4. Prosentase Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan lokal

Ditargetkan pada tahun 2011 untuk SMA berbasis keunggulan lokal mencapai 19% sedangkan realisasinya mencapai 23,34% (116 sekolah).

5. Rasio Guru Terhadap Siswa SMA

Target tahun 2011 target rasio guru SMA adalah 1:29, realisasinya tercapai 1:20 (145%). Hal ini menggambarkan jumlah guru SMA yang ada sekarang sudah memenuhi rasio ideal guru/siswa SMA 1:21. Target tahun 2010 adalah sebesar 1:28, tercapai 100%. Sedangkan untuk tahun 2011 target rasio guru SMK adalah 1:29, realisasinya tercapai 1:15 (193,3%). Hal ini menggambarkan capaian kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun dari sisi jumlah guru sendiri guru SMK untuk tahun 2011 ini kelebihan guru, karena rasio ideal guru/siswa SMK 1:21.

6. Prosentase SMK Berakreditasi Minimal B

Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 22% sedangkan realisasinya mencapai 36%. Tahun 2011 target ditetapkan 24% realisasi 40,93%. Ketercapaian target SMK berakreditasi melebihi yang ditentukan yaitu sebesar 170,54%. Pada indikator ini terjadi peningkatan pemahaman para

pengelola sekolah melalui sistem evaluasi diri yang sangat membantu pihak sekolah untuk mempersiapkan sistem pembelajaran di sekolah. Hal ini juga didukung oleh penganggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Indikator ini juga didukung melalui program rehabilitasi bangunan dan revitalisasi peralatan. Berdasarkan data yang ada pada BAN SM, jumlah SMK terakreditasi minimal B sebanyak 2.159 SMK.

7. Persentase Kab/Kota minimal memiliki 1 SMA SBI/RSBI

Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 28,4% sedangkan realisasinya mencapai 42,25%. Sampai dengan tahun 2010, jumlah kabupaten/kota yang sudah memiliki SMA SBI/RSBI minimal 1 SMA sebanyak 134 kabupaten/kota (62,33%) dengan asumsi jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia berdasarkan data terbaru sebanyak 497 kabupaten/kota. Tahun 2011 target SMA SBI/RSBI 38,8%, realisasi 40,84%. Capaian kinerja tercapai 105,25%. Namun dibandingkan tahun 2010 capaian realisasi SMA SBI/RSBI mengalami penurunan kurang lebih 2%, hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pembanding kab/kota.

8. Presentase Kab/Kota memiliki minimal 1 SMK RSBI/SBI

Target tahun 2010 sebesar 62% dan tercapai sebesar 66,45%, total kabupaten/kota tahun 2010 adalah 486 kab/kota, jumlah kabupaten/kota yang memiliki RSBI sebanyak 218 Kab/Kota, dengan jumlah SMK RSBI sampai dengan 2011 sebanyak 352 SMK. Tahun 2011 ditargetkan SMK RSBI 64%, realisasi 66,45% dimana program pengembangan SMK RSBI untuk tahun 2011 hanya untuk mereview capaian kinerja SMK RSBI sehingga ke depannya sesuai dengan tuntutan UU Sisdiknas akan dilakukan pemerataan di setiap kab/kota SMK RSBI.

9. Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan menengah.

Tahun 2010 target yang ditetapkan 22 medali, sedangkan realisasi tercapai 31 medali. Sedangkan target tahun 2011 target medali yang ditetapkan 24 medali, realisasi tercapai 29 medali (120,83%), dengan rincian 11 medali perunggu, 3 medali emas (olimpiade fisika dan kimia tingkat SMA) dan 15 medali perak.

10. Presentase Kab/Kota yang memiliki rasio pengawas:SM 1:15

Target 2011 ditetapkan 90% realisasi tercapai 100%, dengan jumlah pengawas sekolah menengah 5.851 orang dan jumlahsekolah 23.404, maka perbandingan pengawas 1:4. Adapun yang memenuhi standar kualifikasi pengawas minimal pendidikan S2 sesuai dengan Permendiknas No. 12 Tahun 2007, sebanyak 946 orang.

11. Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4

Target tahun 2011 adalah sebesar 82,8% dan realisasi tercapai 91,90%. Capaian indikator kinerja sebesar 110,99%. Keberhasilan ini disebabkan oleh meningkatnya motivasi dan peran guru yang berkualifikasi di bawah S1/D4 dalam rangka melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4. Selain itu adanya program sertifikasi pendidik menjadikan rangsangan bagi pendidik guna melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

12. Jumlah SMA/SMALB yang memiliki e-perpustakaan

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2011 menetapkan target 15% dari jumlah SMA secara keseluruhan (11.306 SMA) yaitu sebanyak 1.696 SMA. Realisasinya ini tercapai 100%.

13. Jumlah SMA/SMALB yang memiliki Laboratorium Komputer

Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 24,5% sedangkan realisasinya 61%. Ketercapaian target SMA/SMALB yang memiliki Laboratorium Komputer melebihi yang ditentukan yaitu sebesar 239,21%. Sampai dengan tahun 2010, jumlah SMA yang memiliki laboratorium komputer sebanyak 6.897 SMA atau sebanyak 61% dari jumlah keseluruhan sebanyak 11.306 SMA yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun 2011 target 45,4 realisasi 63,86 (7220 SMA). Ketercapaian target SMA/SMALB yang memiliki laboratorium komputer 140,66%.

14. Presentasi SMK yang memiliki e-perpustakaan

Target tahun 2011 sebesar 40% dengan angka ketercapaian 40% sesuai targetnya. Ketercapaian ini dilakukan dengan pengembangan SMK Pusat Layanan TIK yang terdapat di setiap Kab/Kota, sehingga sosialisasi untuk target ini tidak mengalami kendala dalam pencapaiannya. Di samping itu, adanya bantuan PC, Netbook dan LCD alah dalam upaya mendukung SMK untuk memiliki e-Perpustakaan.

15. Jumlah SMA/SMALB yang memiliki Laboratorium Multimedia

Target pada tahun 2010 mencapai 70% sedangkan realisasinya 70%. Sedangkan target tahun 2011 ditetapkan sebesar 78% (9339 sekolah) realisasi 118,35% (14.171 sekolah).

16. Presentase SMK berkemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri

Target pada tahun 2010 sebanyak 23,4% dengan capaian sebesar 60%. Tahun 2011 target 27,5% terealisasi 77%. Ketercapaian melebihi target ini dikarenakan SMK diwajibkan melakukan kemitraan dengan DU/DI dalam melakukan ujian kompetensi bagi kelulusan siswanya. Pencapaian target tersebut juga didukung oleh instansi industri yang semakin membutuhkan lulusan SMK dari berbagai bidang studi keahlian yang dimiliki oleh SMK dengan harapan lulusan SMK secara langsung dapat berhubungan dengan industri untuk menawarkan keahlian yang dimiliki sehingga terjadi kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan lulusan yang dimiliki oleh SMK.

17. Persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA

Target yang ditetapkan sebesar 1,86% dengan capaian sebesar 1,86%. Hal ini menggambarkan semua peserta didik yang putus sekolah dari SMA/SMK/MA telah melanjutkan ke Paket C.

18. Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar 81% dan realisasi tercapai 81,81%. Ketidaktercapaian indikator tersebut dapat dilihat dari perbandingan laki-laki dan perempuan dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang tidak seimbang dengan perbandingan antara laki dan perempuan dari jumlah siswa sekolah. Berdasarkan data SMA/SMK/SMLB tahun 2011, dari 8.582.537 jumlah siswa sekolah menengah laki-laki 45% perempuan 55%. Sedangkan jumlah usia penduduk 16-18 tahun 12.628.600 orang, jumlah laki-laki hanya 39% dan perempuan 61%. Hal ini mengandung makna bahwa kesetaraan gender sudah seimbang.

4. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Program pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud untuk mendukung tujuan strategis keempat (T4), yaitu: Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program pendidikan tinggi dapat di lihat/di ukur dari ketercapaian IKU yang ada dalam program pendidikan tinggi tersebut. Daya serap anggaran dan Ketercapaian IKU program pendidikan tinggi dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Daya Serap Anggaran Program Pendidikan Tinggi

Program	Anggaran	%		
		Pagu	Realisasi	
Pendidikan Tinggi		32.261.944.000	28.599.094.000	86,24

Tabel 3.8 Capaian IKU Program Pendidikan Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
S4.1	Meningkatnya APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	22,8%	23,88%	25,10%	27,01%	107,6
		2	APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	4.1%	5,74%	5%	8,06%	161,2
		3	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	10%	7.30%	15%	11,46%	76,4
S4.2	Sekurang-kurangnya 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008	1	-			-	-	

S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	1	Persentase Prodi Terakreditasi	82%	72%	91%	72,6%	79,7
		2	Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	67,8%	62,0%	70,9%	56,15%	79,2
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES	1	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia	3	4	5	3	60
		2	Jumlah PT Otonom	50	20	150	21	14
		3	Jumlah PT Beropini WTP	7	6	9	18	200
S4.5	Sekurang-kurangnya 94% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2	1	Persentase Dosen Berkualifikasi S-2	62,5%	62%	67,5%	67,4%	99,8

Tabel 3.8 Capaian IKU Program Pendidikan Tinggi (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010		2011		%		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
S4.6	Sekurang-kurangnya 15% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3	1	Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	9,5%	9,5%	10,5%	13,5%	128,5
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi	1	Persentase Dosen Bersertifikat	23%	21,9%	36%	34,5%	95,8
S4.8	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional	15%	17,2%	16%	27%	168,75

	0.19%	2	Jumlah HAKI Yang Dihasilkan	75	76	95	134	141,1
S4.9	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 0.8%	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional	0,4%	0,75%	0,5%	0,7%	140
S4.10	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104 %	1	Rasio Kesetaraan gender PT	111,8 %	108,9%	107,9%	103,54%	104,21
		2	Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi dan S-1	19%	18,7%	21%	18,11%	86,2
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	22,8%	23,88%	25,10%	27,01%	107,6

Pada tahun 2011 program pendidikan tinggi yang dilaksanakan telah merealisasikan anggaran sebesar 28.599.094.000,- dari pagu anggaran sebesar 32.261.944.000,- dengan presentase daya serap sebesar 88.6%. Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tabel diatas, dari 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 sasaran strategis yang ada pada program pendidikan tinggi hanya ada 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% sedangkan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya realisasi capaian target kinerjanya melebihi 100%.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Jumlah PT Otonom”

Dalam upaya peningkatan status kelembagaan perguruan tinggi menuju perguruan tinggi otonom ditargetkan pada tahun 2011 adalah 150 perguruan tinggi yang berstatus otonom, tetapi dalam realisasi capaiannya hanya 21 perguruan tinggi yang berstatus otonom. Ketidaktercapaian dalam pelaksanaan target tersebut yaitu pasca diberlakukannya Amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2010 yang membatalkan undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Pembatalan ini menyebabkan ketiadaan payung hukum bagi perguruan tinggi yang pada saat itu telah menjadi BHMN dan BHP, sekaligus tertutupnya perguruan tinggi yang telah mengusulkan untuk menjadi PT BHP. Capaian sebanyak 21 perguruan tinggi yang dimaksudkan pada laporan ini merupakan perguruan tinggi yang telah memperoleh penetapan sebagai Badan

Layanan Umum, dimana perguruan tinggi tersebut diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan khususnya dana yang diperoleh dari masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2011 ini jumlah Perguruan Tinggi pengusul untuk mendapatkan penetapan sebagai Perguruan Tinggi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum sebanyak 9 Perguruan Tinggi yaitu : Universitas Terbuka, Universitas Tadulako, Politeknik Negeri Malang, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Pendidikan Ganesha, serta Universitas Negeri Padang. Namun demikian sampai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun baru 1 (satu) Perguruan Tinggi pengusul yaitu Universitas Terbuka yang telah mendapatkan penetapan sebagai Satker BLU dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011. 8 (Delapan) Perguruan Tinggi lainnya masih dalam proses revisi untuk mendapatkan penetapan sebagai PT PK- BLU sedangkan 7 PT eks BHMN menunggu revisi PP 23 yang saat ini masih di Kemhum dan HAM. Sehingga pada Tingkat Eselon I Ditjen. Dikti terdapat 21 Satuan Kerja dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Prodi Terakreditasi”
Capaian Indikator Utama (IKU) persentase prodi terakreditasi, pada tahun 2011 ditargetkan mencapai 91% sedangkan realisasinya adalah 72.6%. Kecepatan penambahan program studi dengan pelaksanaan tambahan program studi yang diakreditasi menyebabkan secara prosentase capaian kinerjanya menurun. Upaya terus dilaksanakan untuk mencapai target tersebut dengan mendorong PT mengajukan usulan untuk diakreditasi dan memfasilitasi Badan Akreditasi Nasional (BAN.) untuk lebih banyak melaksanakan akreditasi di perguruan tinggi.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B”
Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase prodi PT berakreditasi minimal B pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 70.9% dan realisasinya adalah sebesar 56.15%. Rendahnya target yang dicapai tahun 2011 diakibatkan adanya penurunan kualitas program studi secara umum. Upaya yang dilakukan adalah membatu pembiayaan bagi perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya termasuk sarana yang dibutuhkan melalui program hibah kompetisi baik PTN maupun PTS, dan pemberian hibah bagi PTS sehat melalui peningkatan kualitas institusi dan program studi.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Jumlah Perguruan Tinggi Masuk Top 500 Dunia”

Dalam konteks internasionalisasi dan mensejajarkan perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi lain di dunia, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan mutu dan daya saing, Pemerintah telah memberikan dukungan kepada perguruan tinggi untuk masuk dalam sistem pemeringkatan *Times Higher Education Supplement* (THES). Pada tahun 2010 pemerintah menargetkan 5 perguruan tinggi masuk dalam 500 besar dunia sebagai Indikator Kinerja Utama, Pada tahun 2010, pemeringkatan yang dilakukan oleh THES sudah tidak ada lagi. Pemeringkatan yang ada berdasarkan *QS World* Ranking menampilkan 3 perguruan tinggi masuk 500 besar yaitu Universitas Indonesia, UGM, dan ITB. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas ini dengan pengalokasian dana hibah WCU bagi perguruan tinggi yang masuk 500 besar dunia dan 200 besar Asia.



5. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Rasio Mahasiswa Vokasi”

Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk rasio mahasiswa vokasi terhadap total mahasiswa vokasi dan S1 ditargetkan mencapai 21% sedangkan realisasinya adalah 18.11%, Penurunan kinerja ini lebih banyak ini diakibatkan adanya kebijakan terutama untuk pendidikan guru yang mensyaratkan minimal berpendidikan Sarjana yang sebelumnya dapat memiliki Program Diploma 2 (D2). Upaya ke depan dalam meningkatkan proporsi jumlah mahasiswa vokasi dilakukan dengan membuka pendidikan tidak hanya program D3 tetapi juga

program D1. Usaha ini akan terus dilakukan mengingat kebutuhan lapangan pekerjaan yang tersedia.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Dosen Berkualifikasi S-2”

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.10 ditargetkan sebesar 67.5% dan realisasinya 67.4% Ketidaktercapaian jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 disebabkan sebagian dosen yang direncanakan dapat menyelesaikan Studi S2-nya dalam 2 tahun pada kenyataannya tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, sebagian peserta mengundurkan diri dengan alasan keluarga, dan terkendala dosen S1 yang belum mempunyai jabatan fungsional sebagai prasyarat studi lanjut S2 sehingga komulatif jumlah dosen berkualifikasi S2 menjadi tidak tercapai juga.

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Dosen Bersertifikat”

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.12 ditargetkan sebesar 36.0 % dan realisasinya 34.5%. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena dari rencana Sertifikasi 24.000 dosen sampai dengan tahun 2011 (dosen + guru besar), jumlah dosen yang lulus sertifikasi hanya mencapai 18.429 dosen. Untuk kedepan akan lebih disempurnakan mekanisme sertifikasi agar kuota sertifikasi tahun 2012 sebanyak 13.500 dapat tersertifikasi semuanya, sehingga target dosen bersertifikat pada tahun 2012 dapat dicapai dengan baik.

8. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa”

Capaian untuk persentase mahasiswa penerima beasiswa ditargetkan pada tahun 2011 adalah mencapai 15% dari total mahasiswa dan realisasi sampai dengan akhir Desember sebesar 11.46%. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri serta pemerintah daerah untuk secara langsung dalam membantu mahasiswa miskin memperoleh beasiswa. Untuk kedepan selain menambah jumlah kuota mahasiswa miskin yang mendapatkan beasiswa diharapkan ada partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha dan industri serta pemerintah daerah untuk secara langsung dalam membantu mahasiswa miskin memperoleh beasiswa

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaian realisasi target kinerjanya melebihi 100% adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) “APK PT dan PTA Usia 19-23 Tahun” Pencapaian Angka Partisipasi Kasar usia 19-23 tahun pada tahun 2011 mencapai 27.01%. Capaian ini melebihi dengan apa yang telah ditargetkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 25.11%, hal ini disebabkan bertambahnya program studi, adanya peningkatan pada pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh, dan peningkatan mahasiswa pada program studi yang diminati masyarakat.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Rasio Kesetaraan Gender PT” Pencapaian Indikator Kinerja Utama untuk rasio kesetaraan gender pada tahun 2011 mencapai 103,54% dari target yang ditetapkan sebesar 107.3%. Capaian ini mengartikan bahwa jumlah partisipasi mahasiswa perempuan jika dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki masih lebih tinggi, namun telah mulai mencapai keseimbangan Program studi yang menyumbangkan kontribusi terbesar untuk kinerja ini berasal dari program studi kependidikan, sejalan dengan program peningkatan kualifikasi guru dimana guru lebih banyak diminati perempuan.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Jumlah PT Beropini WTP” Target PT Beropini WTP tahun 2011 adalah 9 dan terealisasi 18 PT. Tahun 2011 ada 19 Satuan Kerja Baik PT BHMN maupun PT PK - BLU yang Laporan Keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini 18 (Delapan Belas) Satker beropini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yaitu :

- a) Universitas Indonesia
- b) Universitas Gajah Mada
- c) Universitas Airlangga
- d) Universitas Sumatera Utara
- e) Universitas Pendidikan Indonesia
- f) Institut Teknologi Bandung
- g) Institut Pertanian Bogor
- h) Universitas Hasanuddin
- i) Universitas Negeri Semarang
- j) Institut Teknologi 10 Nopember
- k) Universitas Sebelas Maret
- l) Universitas Negeri Yogyakarta

- m) Universitas Negeri Gorontalo
- n) Universitas Haluoleo
- o) Universitas Diponegoro
- p) Universitas Brawijaya
- q) Universitas Negeri Malang
- r) Universitas Jenderal Soedirman

Capaian ini dihasilkan karena hampir semua satuan kerja yang wajib diaudit oleh auditor independen, laporan keuangannya sudah memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) “APK Prodi Sains Natural dan Teknologi (Usia 19-23 Tahun)”

Ditargetkan pada tahun 2011 mencapai 5.0% sedangkan realisasinya adalah sebesar 8.06% peningkatan ini merupakan keberhasilan dari upaya peningkatan program revitalisasi MIPA. Pertanian dan perbaikan sarana dan prasarana program studi teknik.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Dosen Berkualifikasi S-3”

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.11 ditargetkan sebesar 10.5 % dan realisasinya 13.5% artinya persentase jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Capaian ini dihasilkan dari beasiswa S3 untuk dosen baik dalam dan luar negeri.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional”

Pada Tahun 2011 target capaian indikator kinerja dosen dengan publikasi nasional 16% dengan realisasi 27%. Capaian ini didukung oleh beberapa penelitian seperti hibah penelitian, intensif buku ajar, workshop manajemen jurnal, akreditasi jurnal ilmiah, pelatihan penulisan artikel ilmiah, pengembangan referensi ilmiah nasional GARUDA dan ekspose hasil penelitian.

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional”.

Realisasi Jumlah Total Dosen dengan Publikasi Internasional pada tahun 2010 adalah: 1263 dosen (0.75%). Meskipun jumlah tersebut telah memenuhi target, namun kemungkinannya masih banyak yang melaksanakan publikasi internasional secara mandiri ke luar negeri yang belum terinventarisir oleh Dit. Litabmas karena tidak dilaporkan. Di samping itu masih banyak dosen WNI yang mengajar atau belajar di Luar Negeri, bersama karya-karya terbarunya dipublikasikan di luar negeri. Berdasarkan data hasil pemetaan Dit. Litabmas yang dilaksanakan tahun 2010, jumlah publikasi Internasional Perguruan Tinggi seluruh Indonesia tercatat 3213 judul, dengan rata-rata 3 penulis per judul, maka jumlah dosen dengan publikasi internasional mencapai 9639 dosen, atau sekitar 6% dosen kita telah melaksanakan publikasi internasional. Sehingga target 1,2% untuk Tahun 2010 telah tercapai.

Pada Tahun 2011 tidak terdapat program pemetaan kinerja penelitian perguruan tinggi, sehingga capaian indikator dosen dengan publikasi internasional, hanya diperhitungkan dari inventarisasi pada program insentif penulis artikel pada jurnal internasional sebanyak 255 dosen, dan hasil penginternasionalan 23 jurnal sebanyak 966 dosen, sedangkan pada penelitian kerjasama luar Negeri juga dipastikan akan menghasilkan publikasi internasional namun kebanyakan masih dalam proses. Target capaian kinerja kumulatif dosen dengan publikasi internasional pada Tahun 2011 adalah 0,5% (atau 643 dosen), sedangkan realisasi kumulatif pada tahun 2011 mencapai 1221 dosen atau 0,7 % (jumlah dosen tahun 2011 = 168590 orang).

Capaian ini didukung oleh beberapa kegiatan seperti pelatihan penulisan artikel di jurnal internasional, intensif artikel pada jurnal internasional, bantuan seminar luar negeri, pengadaan jasa langganan e-journal, dan akselerasi pemanfaatan e-journal pengembangan HKI dan publikasi.

8. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Jumlah HAKI Yang Dihasilkan”

Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan sifatnya kumulatif target capaian sampai dengan Tahun 2011 adalah 95 paten, telah terealisasi 134 paten. Pengertian HKI di sini hanya terhitung Paten. Padahal pengertian Hak kekayaan Intelektual sebenarnya ada Hak Cipta, Hak Pemuliaan Varietas, Hak Merk Industri, Hak Desain Logo, dan lain-lain. Jika hanya paten, maka ditinjau dari segi proses tayangnya terdapat masa tunggu sanggah minimal 3 (tiga) tahun, sehingga penyelesaiannya bisa melebihi 4 tahun anggaran, bahkan 7

atau 10 tahun. karena terkait dengan lembaga yang berkompeten memproses paten baik Dalam maupun Luar Negeri. Dit. Litabmas berkaitan dengan output kinerja penelitian berbasis paten, sifatnya hanya memfasilitasi proses untuk perolehan paten, sehingga perlu dipertimbangkan, mengenai indikator kinerja secara proporsional. Pada masa depan seharusnya ada pengembangan kebijakan program lebih lanjut misalnya sinergi antar lembaga yang terprogram secara integratif, guna meningkatkan perolehan HKi baik paten maupun hak kekayaan intelektual lainnya, untuk meningkatkan daya saing bangsa. Capaian ini dihasilkan dari beberapa kegiatan seperti memfasilitasi dosen yang mempunyai karya ilmiah yang berpotensi HKi (Uber HKi), workshop manajemen sentra HKI-PT, pemanfaatan hasil penelitian, penyempurnaan paten yang prosesnya belum selesai (hearing paten) dan penghargaan bagi penemu/inventor luar biasa,

5. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud. Program ini dilaksanakan untuk mendukung 4 (empat) tujuan strategis Kemdikbud, yaitu:

- a. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota (T1);
- b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T2);
- c. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T3);
- d. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5);

Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat dari ketercapaian

IKU yang ada dalam program tersebut. Daya serap anggaran dan Ketercapaian IKU program pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Daya Serap Anggaran Program BPSDMP dan PMP

Program	Anggaran	%		
		Pagu	Realisasi	
PendidikanPengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan	3.258.473.896.000.	3.163.119.3802.202	89.90	

Tabel 3.10 Capaian IKU Program BSDMP dan PMP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2010	2011						
			Target (%) Dalam PK	Target (%) Perubahan BPSDMP &PMP	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7			
S1.2	Meningkatnya kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%	1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	28.50%	44,8	36.75	34.84	94.81	
			2	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	Baru diprogram kan tahun 2011	40	8	0	0
			3	Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	Baru diprogram kan tahun 2011	20	20	Sosialisasi dan ToT	-
			4	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan	IKU tambahan BPSDMP dan PMP	-	45.93	57.95	126.17

S2.6	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	5	profesionalisme berkelanjutan Persentase tenaga kependidikan lainnya yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	IKU tambahan BPSDMP dan PMP	-	3	3.46	115.33
		1	Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	15.6%	25	25	14,42	57.68

Tabel 3.10 Capaian IKU Program BSDMP dan PMP (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2010	2011					
			Target (%) Dalam PK	Target (%) Perubahan BPSDMP & PMP	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7		
S2.14	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat;	2	Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%	100	100	44.39	44.39
		3	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	13.1%	45,9	45.93	57.95	126.17
		4	Jumlah kumulatif pegawai Kemdikbud yang mengikuti diklat	3680 org	50	5725 org	4.348	75.95
		1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	28.50%	44,8	36.75	34.84	94.81
		2	Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	Baru diprogramkan tahun 2011	20	20	Sosialisasi dan ToT	-
		3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang mengikuti peningkatan kompetensi dan	IKU tambahan BPSDMP dan PMP	-	3	3.46	115.33

S2.15	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;	profesionalisme berkelanjutan						
		1 Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	28.50%	44,8	36.75	34.84	94.81	
		2 Persentase satuan Pendidikan dasar yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	7.9%	40	20	14.83	74.16	
		3 Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	Baru diprogramkan tahun 2011	20	20	Sosialisasi dan ToT	-	

Tabel 3.10 Capaian IKU Program BSDMP dan PMP (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2010	2011						
			Target (%) Dalam PK	Target (%) Perubahan BPSDMP & PMP	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7			
			4	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	IKU tambahan BPSDMP dan PMP	-	3	3.46	115.33
S3.4	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan		1	Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	15.6%	25	25	14.42	57.68
			2	Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%	100	100	44.39	44.39
			3	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	13.1%	45,9	45.93	57.95	126.17
			4	Jumlah kumulatif pegawai Kemdikbud yang mengikuti diklat	3680 org	50	5725 org	4.348	75.95

S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 80% bersertifikat;	1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	28.50%	44,8	36.75	34.84	94.81
		2	Persentase satuan Pendidikan menengah yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	30.80%	40	20	17.05	85.26
		3	Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	Baru diprogramkan tahun 2011	20	20	Sosialisasi dan ToT	-

Tabel 3.10 Capaian IKU Program BSDMP dan PMP (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2010	2011					
			Target (%) Dalam PK	Target (%) Perubahan BPSDMP & PMP	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7		
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	4	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	IKU tambahan BPSDMP dan PMP	-	3	3.46	115.33
			1		Persentase satuan Pendidikan tinggi yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	Baru diprogramkan tahun 2011	40	15

Untuk melaksanakan program pengembangan SDM dan Penjaminan mutu pendidikan telah BPSDMP dan PMP telah mengalokasikan pagu anggaran sebesar 3.258.473.896.000.-, dari anggaran tersebut BPSDMP dan PMP telah berhasil merealisasikannya sebesar 3.163.119.380.202 atau sebesar 89.90%.

Sesuai hasil pembahasan dengan DPR, tahun 2011 total IKU Badan PSDMP dan PMP menjadi 11 IKU, hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan satu IKU yaitu “Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Berkelanjutan”.

Sertifikasi guru adalah program utama yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, yaitu reformasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Sampai dengan akhir tahun 2010, yaitu

tahun keempat pelaksanaan sertifikasi guru masih dibawah tanggungjawab Direktorat Jenderal PMPTK, persentase guru yang bersertifikat pendidikan sebanyak 26,75%.

Penyelenggaraan sertifikasi guru pada tahun 2011 dibagi dalam 3 pola, yaitu Penilaian Portofolio (PF), Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung (PSPL), dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Pola PF dilaksanakan dengan memberikan penilaian terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Pola PSPL diberlakukan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki: 1) kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam pendidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpunmata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling, dengan golongan minimal IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; 2) golongan serendah-rendahnya IV/c atau memenuhi angka kredit kumulatif setara golongan IV/c. Sedangkan pola PLPG dilaksanakan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih langsung PLPG, tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG, dan tidak lulus penilaian portofolio.

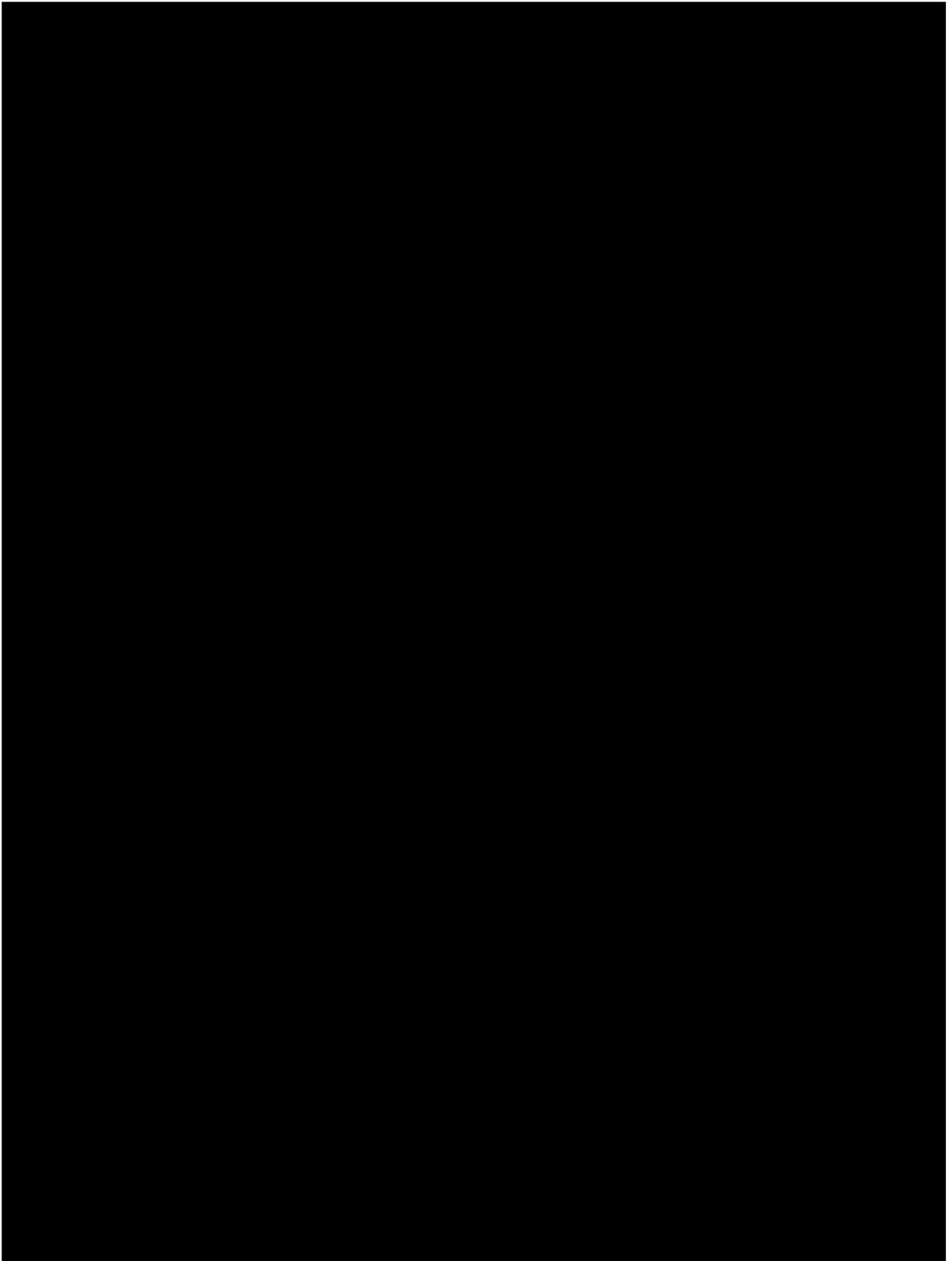
Tahun 2011 adalah tahun kelima pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam jabatan, dan Badan PSDMP dan PMP sebagai pengganti Ditjen PMPTK diberikan amanat untuk melanjutkan pelaksanaannya. Sampai dengan akhir tahun 2011, dari keseluruhan kuota guru yang disertifikasi sejumlah 1.101.552 orang, kuota yang terpenuhi sebanyak 1.075.497 orang dengan jumlah kelulusan sampai dengan tahun 2011 mencapai 1.019.355 orang atau 34,84% dari target yang ditetapkan 36,75% dari total guru sebanyak 2.925.676. Sehingga kinerja sasaran seritifikasi guru sampai dengan tahun 2011 mencapai 94,81%.

Secara konsep program sertifikasi sudah dirancang dengan baik, namun dalam pelaksanaannya muncul beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja, antara lain pola rekrutmen di tingkat daerah yang belum sesuai dengan petunjuk teknis Kemdikbud, belum adanya peningkatan kinerja yang signifikan dari guru yang sudah bersertifikat, dan tidak terpenuhinya persyaratan minimal jam mengajar tatap muka sejumlah 24 jam per minggu. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan mencegah distorsi dalam pelaksanaan sertifikasi guru, Badan PSDMP dan PMP memberlakukan pola rekrutmen calon peserta sertifikasi secara *online* dengan penetapan peserta berbasis NUPTK.

Tabel 3.11 Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2011

NO	PROVINSI	KUOTA PORTOFOLIO	KUOTA PLPG	TOTAL KUOTA REVISI *
1	DKI Jakarta	120	11,799	11,919
2	Jawa Barat	399	39,559	39,958
3	Jawa Tengah	339	33,643	33,982
4	DI. Yogyakarta	64	6,456	6,520
5	Jawa Timur	451	44,626	45,077
6	N. Aceh Darussalam	84	8,378	8,462
7	Sumatera Utara	235	23,665	23,900
8	Sumatera Barat	85	8,589	8,674
9	R i a u	63	6,468	6,531
10	J a m b i	48	4,880	4,928
11	Sumatera Selatan	98	9,834	9,932
12	Lampung	93	9,358	9,451
13	Kalimantan Barat	64	6,540	6,604
14	Kalimantan Tengah	40	4,086	4,126
15	Kalimantan Selatan	53	5,365	5,418
16	Kalimantan Timur	57	5,803	5,860
17	Sulawesi Utara	33	3,381	3,414
18	Sulawesi Tengah	27	2,717	2,744
19	Sulawesi Selatan	121	12,173	12,294
20	Sulawesi Tenggara	37	3,771	3,808
21	Maluku	23	2,282	2,305
22	B a l i	72	7,065	7,137
23	Nusa Tenggara Barat	59	6,053	6,112
24	Nusa Tenggara Timur	59	8,435	8,494
25	Papua	23	2,341	2,364
26	Bengkulu	31	3,293	3,324
27	Maluku Utara	13	1,276	1,289
28	Banten	81	8,314	8,395
29	Bangka Belitung	11	1,183	1,194
30	Gorontalo	13	1,329	1,342
31	Kepulauan Riau	18	1,766	1,784
32	Papua Barat	10	1,014	1,024
33	Sulawesi Barat	16	1,618	1,634
	JUMLAH	2,940	297,060	300,000

Tabel 3.12 Peta Kelulusan Sertifikasi Guru s.d. Tahun 2011



IKU Persentase satuan PAUDNI yang Telah Melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Internal. Sampai dengan tahun 2011, penjaminan mutu pendidikan internal untuk satuan PAUDNI dari target 8% masih belum tercapai. Pada tahun 2011, program ini masih berfokus pada pengembangan model dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

IKU Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Telah Melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Internal. Sampai dengan tahun 2011, penjaminan mutu pendidikan internal untuk satuan pendidikan dasar mencapai 14,83% dari target 20%. Persentase ketercapaian IKU ini sampai dengan tahun 2011 adalah 74,16%.

IKU Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang Telah Melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Internal. Satuan pendidikan menengah yang telah melakukan penjaminan mutu pendidikan internal sampai dengan tahun 2011 mencapai 17,05% dari target 20%, dengan persentase ketercapaian sebesar 85,26%.

IKU Persentase Satuan Pendidikan Tinggi yang Telah Melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Internal. Untuk tahun 2011 IKU ini telah dirubah targetnya menjadi 0%. Perubahan target ini di karenakan adanya kesulitan dalam penetapan kebijakan karena harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Meskipun begitu Badan PSDMP dan PMP telah melakukan tahapan uji coba lapangan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan internal di perguruan tinggi.

Proses pencapaian IKU persentase satuan pendidikan mulai dari PAUDNI sampai dengan pendidikan menengah yang melakukan penjaminan mutu internal diimplementasikan melalui program EDS. Program ini dilaksanakan di 312 kabupaten/kota di 33 propinsi pada sejumlah 29.000 satuan pendidikan yang ditargetkan. Program EDS dilaksanakan dengan menggunakan beberapa strategis berikut: 1) Pendekatan integrasi proses, artinya EDS *online* berbasis sistem Dapodik dari 341.784 satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN, 2) integrasi SDM dengan melibatkan pihak LPMP dan pengawas sebagai fasilitator pendampingan EDS di daerah, 3) pemanfaatan IT melalui instrumen EDS yang mudah digunakan hingga tingkat sekolah, dan 4) instrumen yang digunakan berbasis kuantitatif sehingga mudah dianalisis.

Tabel 3.13 Alur Kerja EDS dan MSPD Online

*sumber: Paparan Rapim Badan PSDMP dan PMP per tanggal 21 Desember 2011

IKU Guru Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi dan Pasal 20 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Badan PSDMP dan PMP diberikan amanat untuk melanjutkan tugas Ditjen PMPTK untuk memfasilitasi terlaksananya pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan agar kompetensi gurusejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Program PKB diarahkan untuk memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang dimiliki guru dengan tuntutan masa depan terkait profesi guru. Sampai dengan tahun anggaran 2011, ketercapaian kinerja program PKB adalah sebesar 126,17% dengan realisasi mencapai 1.301.705 guru atau 57,95% dari target sejumlah 2.762.689 guru atau 45,93%.

IKU Persentase tenaga kependidikan lainnya yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan sampai dengan tahun 2011. Badan PSDMP dan PMP telah melaksanakan diklat bagi 756 tendik lainnya. Untuk program ini, persentase yang dicapai Badan PSDMP dan PMP telah melebihi persentase target akumulatif 3% yang telah ditetapkan dalam renstra, yaitu sebesar 3,46%. Dengan demikian, persentase ketercapaian IKU ini sampai dengan tahun 2011 adalah 115,33%.

IKU Persentase Kepala Sekolah Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2011, realisasi kepala sekolah yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan mencapai 14,42% dari target 25%, disebabkan anggaran tahun 2011 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini belum mendukung pemenuhan target yang ditetapkan. Dengan demikian, ketercapaian program ini sampai dengan tahun 2011 adalah 57,68%.

IKU Jumlah Kumulatif Pegawai Kemdikbud yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Program ini dilaksanakan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur negara. Pada tahun ini, telah dilaksanakan diklat kepemimpinan bagi sejumlah 4.348 dari 5.725 pegawai dengan ketercapaian 75,95%. Angka realisasi tahun 2011 tidak mencapai target disebabkan anggaran yang ditetapkan tidak dapat mendukung pencapaian target tersebut.

IKU Persentase Pendidik yang Dinilai Kinerjanya Sesuai Persyaratan Standar Pendidik. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Guru dan Angka Kreditnya dan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis jabatan Fungsional Guru, Badan PSDMP dan PMP akan melaksanakan proses penilaian kinerja guru (PKG) terhadap guru yang sudah bersertifikat sampai tahun 2010 sejumlah 742.068 orang pada 240.675 sekolah. Pelaksanaan PKG ini diawali dengan pengembangan perangkat sistem penilaian sejak tahun 2009. Untuk memantapkan pelaksanaan PKG, pada tahun 2011, Badan PSDMP dan PMP melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan PKG dan pelatihan (*training on trainers*) dengan menggunakan mekanisme pelatihan dan secara berjenjang yang dimulai dari tim inti nasional atau *National Core Team* (NCT) sejumlah 263 orang, tim inti provinsi atau *Provincial Core Team* (PCT) sejumlah 3.651 orang, dan tim inti kabupaten atau *District Core Team* (DCT) sejumlah 21.414 orang.

6. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Penelitian, Kemdikbud. Program ini dilaksanakan untuk mendukung lima tujuan strategis Kemdikbud, antara lain:

- a. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T1);
- b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T2);
- c. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T3);
- d. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi (T4);

- e. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Keberhasilan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan dapat dilihat/diukur dari ketercapaian beberapa IKU yang ada dalam program tersebut. Daya serap anggaran dan Ketercapaian IKU program penelitian dan pengembangan dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.14 Daya Serap Anggaran Program Balitbang

Program	Anggaran	%		
		Pagu	Realisasi	
Pendidikan penelitian dan pengembangan		907.828.989.000,-	866.616.615.792,-	95,46

Tabel 3.15 Capaian IKU Program Balitbang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	1	Persentase sekolah/madrasah diakreditasi (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/ MAK, SLB)	51%	71.60%	59,04%	65,11%	110
		2	Persentase prodi dan Institusi PT diakreditasi	20%	20%	15,70%	18.85%	120
		3	Persentase program/satuan PNF di akreditasi (PAUD, Paket A, B, C, Paket C Kejuruan, LPK, PKBM)	0,52%	0.35%	1,24%	2%	161
		4	Jumlah peraturan turunan SNP yang dikembangkan dan disempurnakan	7	7	7	8	114
		5	Jumlah Peserta didik yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	12.212.234	12.042.031	12589932	11390859	90
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan Kemdikbud	1	Jumlah peraturan perundang-undangan	5	8	5	5	100
		2	Jumlah informasi dan publikasi kelitbang	4	3	4	4	100

3	Meningkatnya hasil penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional	1	Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis penelitian	15	15	21	21	100
		2	Jumlah daerah yang bergabung dalam jaringan kerjasama penelitian	2	2	5	5	100
		3	Jumlah judul hasil penelitian yang diterbitkan dan didesiminasikan.	5	5	20	20	100
4	Meningkatnya kualitas kurikulum dan sistem pembelajaran dan perbukuan	1	Jumlah model kurikulum dan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif dan menghasilkan lulusan kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa.	40	82	47	47	100

Tabel 3.15 Capaian IKU Program Balitbang (Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	2	Persentase provinsi dan kab/kota yang mengembangkan kurikulum pada tingkat daerah.	97%	97%	98%	98%	100
		3	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum secara mandiri	36%	36%	40%	40%	100
		4	Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N Total = 885 Jilid Mapel)	72,4	72.4%	76,8%	76,8%	100
		1	Jumlah PTK yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	4000	4000	8000	6637	83
		2	Jumlah soal yang disusun untuk bank soal untuk berbagai kepentingan penilaian pendidikan	84.300	84.300	193.900	199100	103
		3	Jumlah model penilaian pendidikan	67	67	75	75	100

Pada tahun 2011, program penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan Balitbang telah merealisasikan anggaran sebesar 1.154.837.294.992,- dari total pagu anggaran sebesar 1.311.983.929.000,- dengan presentase daya serap sebesar 88.02%.

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, dari 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 sasaran strategis yang ada pada program penelitian dan pengembangan digambarkan bahwa ada 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya telah mencapai 100%, serta 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100%, sedangkan 5 indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya realisasi capaian target kinerjanya melebihi 100%.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% adalah sebagai berikut.

1. IKU “Jumlah PTK yang Dinilai Kompetensinya Sesuai dengan SNP”
Capaian Kinerja IKU tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Balitbang sebanyak 8.000 PTK. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran yang tersedia pada DIPA 2011 hanya dapat memenuhi untuk 6.637 PTK.
2. IKU “Jumlah Peserta Didik yang Dinilai Kompetensinya Sesuai Dengan SNP”
Capaian Kinerja IKU tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Balitbang sebanyak 12.589.932 peserta didik. Hal ini disebabkan karena banyaknya calon peserta ujian Paket A, B, dan C tidak mengikuti ujian nasional, sehingga realisasi target 2011 menjadi 11.390.859 peserta didik.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya melebihi 100% adalah sebagai berikut:

1. IKU “Jumlah Soal yang Disusun untuk Bank Soal untuk Berbagai Kepentingan Penilaian Pendidikan”
Capaian Kinerja IKU tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Balitbang sebanyak 193.900 soal (termasuk kaset), terealisasi 199.100 soal (termasuk kaset).
2. IKU “Persentase Sekolah/Madrasah Diakreditasi (TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, SLB)”
Capaian Kinerja IKU tersebut melebihi target yang direncanakan dari target semula 24.878 S/M dengan rincian TK/RA 1.035, SD/MI 2.289, SMP/MTs 545, SMA/MA 573, SMK 422, dan SLB 14 terealisasi 57.757 S/M dengan rincian sebagai berikut TK/RA 10.557, SD/MI 30.167, SMP/MTs 8.380, SMA/MA 3.666, SMK 4.786, dan SLB 201.

3. IKU “Persentase Prodi dan Institusi PT Diakreditasi”

Capaian Kinerja IKU tersebut melebihi target yang direncanakan yaitu 120%, dari 2900 prodi menjadi 3.345 prodi.

4. IKU “Jumlah peraturan turunan SNP yang dikembangkan dan disempurnakan”

Capaian Kinerja IKU tersebut melebihi target yang direncanakan, dari target awal 7 buah peraturan. telah terealisasi sebanyak 8 buah. Hal ini disebabkan karena adanya revisi target pada tahun 2011.

5. IKU “Persentase Program/Satuan PNF Diakreditasi (PAUD, Paket A, B, C, Paket C Kejuruan, LKP, PKBM)”

Capaian Kinerja IKU tersebut melebihi target yang direncanakan dari 850 program/capaian PNF menjadi 1.214 program/satuan.

Kelima IKU tersebut di atas capaian kinerjanya melebihi 100% karena adanya revisi efisiensi anggaran dan APBNP.

7. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Program pengembangan dan pembinaan bahasa merupakan program Kemdikbud dalam rangka melestarikan bahasa dan sastra Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis (T6) Kemdikbud, yaitu: Terwujudnya bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS.

Daya serap anggaran dan Ketercapaian IKU program pengembangan dan pembinaan bahasa dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.16 Daya Serap Anggaran Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Program	Anggaran	%		
		Pagu	Realisasi	
Pendidikan program pengembangan dan pembinaan bahasa	153.621.300.000	137.123.080.703	89,26	

Tabel 3.17 Capaian IKU program pengembangan dan pembinaan bahasa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2010	2011	%			
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6		
S6.1	Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan		1 Persentase Bahasa Daerah Terpetakan (N Total = 746)	67% (499) bahasa daerah	65% (514 bahasa daerah)	74,66% (557 bahasa daerah)	108,20
S6.2	Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional		1 Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional	-	5% (4393 guru)	6,49% (5705 guru)	129,80
S6.3	Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala		1 Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan secara Berkala	1	2	2	100
			2 Persentase Kabupaten/Kota Yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	1% (5 kab/kota)	12%	13.68% (68 Kab/kota)	113,33
S6.4	Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa Indonesia		1 Jumlah Negara Memiliki Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia	35	38	38	100
			2 Jumlah Pengembangan Pusat Pembelajaran BIPA di Luar Negeri	8	10	10	100

Pada tahun 2011, program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra didukung dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 153.621.300.000,-. Dari pagu tersebut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah berhasil merealisasikannya sebesar Rp. 137.123.080.703,-. dengan persentase realisasi sebesar 89,26%. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan pelaksanaan program tersebut terlihat dalam tabel pengukuran kinerja di atas. Berikut analisis ketercapaian IKU Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2011.

1. Terdapatnya tiga IKU yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan dan tiga IKU mencapai target (100%).
2. IKU yang melebihi target adalah IKU Persentase Bahasa Daerah Terpetakan (108,20%), IKU Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional (129,80%), dan IKU Persentase Kabupaten/Kota yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (113,33%).

Pencapaian IKU Persentase Bahasa Daerah Terpetakan melebihi target karena pencarian data di lapangan dilakukan dengan cermat dan efektif. Sementara itu, IKU Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai dengan standar Nasional juga melebihi target karena adanya dukungan berbagai pemangku kepentingan baik legislatif maupun eksekutif dalam program sosialisasi dan tes UKBI untuk para pejabat, pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik melalui alokasi APBN-P 2011. Pencapaian IKU Persentase Kabupaten/Kota yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan melebihi target karena pengoptimalan peran Balai/Kantor Bahasa dalam pemantauan bahasa Indonesia di media luar ruang.

3. IKU yang mencapai target 100% ada tiga, yaitu Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan secara Berkala (2 majalah), Jumlah Negara Memiliki Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia (38 Negara), dan Jumlah Pengembangan Pusat Pembelajaran BIPA di Luar Negeri (10 Pusat Pembelajaran BIPA).

8. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal untuk mendukung tujuan strategis ke tujuh(T7), yaitu: Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Daya serap anggaran dan Ketercapaian IKU program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.18 Daya Serap Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program	Anggaran	%		
		Pagu	Realisasi	
Pendidikan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1.265.496.519.000	1.153.242.163.931	91.13	

Tabel 3.19 Capaian IKU Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%						
		Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7				
S7.1	Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1	Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	80%	80%	85	85	100		
		2	Laporan Keuangan Unit-Unit Utama Terintegrasi /Terkonsolidasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100	100	100		

Tabel 3.19 Capaian IKU Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
(Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
S7.2	Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1	Skor LAKIP Kementerian	76	72.66	77	Predikat "B"	
		2	Persentase Satker UPT Pusat di Daerah Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	20%	20%	30	20	66,66
		3	Persentase Satker di Lingkungan Unit Utama Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	100%	100%	100	100	100
		4	Persentase Unit Utama Yang Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja	50%	50%	75	75	100
		5	Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat Kehadiran Pegawaiinya Tidak Kurang Dari 98%	95%	88.40%	98	83,45	85,15
		6	Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja Diterapkan di Lingkungan Kementerian	-	-	-	-	-
S7.3	Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan	1	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Kementerian	95%	89.29%	95,5	95,5	100
		2	Persentase Realisasi Anggaran Kementerian	95%	92.60%	95,5	95,5	100
		3	Persentase Anggaran Yang Tidak Diblokir	90%	97.25%	95	99.64	104.88
		4	Persentase Satker/Unit Kerja Kementerian Terkoneksi Secara Daring (Online)	95%	80.03%	95	94,6	99,58

Tabel 3.19 Capaian IKU Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
(Lanjutan...)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%					
		Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7			
			5	Tingkat Penerapan	65%	77.18%	70	70	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%					
		Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7			
		6	E-Administrasi di Lingkungan Kementerian (%)		12%	26.96%	15	9,9	66
		7	Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Unit Kerja Terkoneksi ke Sistem Pembelajaran Daring (Online)		90%	90%	100	117,65	117,65
		8	Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Pendidikan Yang Ditindaklanjuti		15%	15%	20	20	100
		9	Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan		33	33%	49	49	100
		10	Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data		40%	39.9%	50	43.6	87.19
		11	Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD Yang Tergabung Dalam Jaringan Pendataan		72%	79.69%	77	77	100
			Persentase Masyarakat (Peserta Didik, Orang Tua, Tenaga Pendidik, Satuan Pendidikan, Dunia Industri, Media dan Publik, Pendidikan Daerah, Rekanan, dan Pelajar dan Mahasiswa Asing) Yang Memahami Tentang Kebijakan Pendidikan						

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemdikbud yang dilaksanakan oleh Setjen telah merealisasikan anggaran sebesar 1.153.242.163.931,- dari pagu sebesar 1.265.496.519.000,- dengan presentase sebesar 91.13%. Berdasarkan tabel pengukuran kinerja diatas, dari 19 IKU yang digunakan Setjen untuk mengukur keberhasilan/kegagalan program yang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) IKU yang realisasi capaiannya melebihi 100%; 10 (sepuluh) IKU yang mencapai target 100%; dan 6 (enam) IKU yang realisasinya belum mencapai target 100%. Sedangkan untuk IKU

“Sistem remunerasi berbasis kinerja diterapkan di lingkungan Kementerian” masih belum dapat dilaksanakan pada tahun 2011. Analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN dengan target 85% dan terealisasi 85% atau persentase tingkat capaian 100%.
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu Jumlah dokumen BMN Kemdikbud dengan target 16 dokumen dan realisasi sampai akhir tahun 2011 adalah 16 dokumen atau persentase realisasi capaian sebesar 100%. Berikut adalah jenis-jenis dokumen BMN Kemdikbud.
 - a) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen BMN Kementerian;
 - b) Penyusunan Daftar Harga Satuan Harga Barang / Jasa Untuk Mendukung SBU dan SBK;
 - c) Dokumen Analisis dan Penyusunan Perencanaan;
 - d) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e) Pelaksanaan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian;
 - f) Bimtek Penyusunan Laporan SIMAK Berjenjang UAPPB Wilayah di Lingkungan Kementerian;
 - g) Evaluasi Data Hasil Tim Penertiban (KPKNL) Pada SIMAK BMN di Lingkungan Kementerian;
 - h) Evaluasi dan Rekonsiliasi Neraca Aset Pada Satker di Lingkungan UAPPB Eselon I di Lingkungan Kementerian;
 - i) Pemutakhiran Data BMN Dalam Rangka Pengsertifikatan Tanah Kementerian;
 - j) Bimtek Pelaksanaan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian;
 - k) Koordinasi Pelaksanaan Pendayagunaan dan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian;
 - l) *Monev* Pendayagunaan dan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian;
 - m) Koordinasi Penyelesaian Masalah Penatausahaan BMN di Lingkungan Kementerian;
 - n) *Updating* Data SIMAK pada UAKPB;
 - o) Penyusunan Laporan SIMAK BMN di Lingkungan Kementerian;
 - p) Dokumen Rekonsiliasi di Lingkungan Kementerian.

2. Laporan keuangan unit-unit utama terintegrasi/terkonsolidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan sasaran target 100%.
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut, didukung oleh indikator sasaran yaitu meningkatnya ketepatan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian, yang meliputi 6 laporan, 8 dokumen, 8 naskah, dan 2.336 orang.

3. Skor LAKIP Kementerian

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2011 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemdikbud berhasil memperoleh predikat **“B” (Baik, perlu sedikit perbaikan)**. Mulai tahun 2011, sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tidak mencantumkan nilai/score. Berikut lima komponen sistem akuntabilitas kinerja yang dievaluasi.

No	Komponen	Bobot Komponen
1	Perencanaan Kinerja	35 %
2	Pengukuran Kinerja	20 %
3	Pelaporan Kinerja	15 %
4	Evaluasi Kinerja	10 %
5	Capaian Kinerja	20 %
Total		100%

Tidak tercapainya IKU ini dikarenakan dalam proses penilaian penerapan SAKIP tingkat Kementerian juga dipengaruhi oleh tingkat penerapan SAKIP di tingkat unit kerja Eselon I nya. Cara penilaiannya adalah 50% nilai SAKIP diambil dari tingkat Kementerian dan 50%-nya lagi diambil dari dua unit kerja Eselon I yang dijadikan sample dalam penilaian. Adanya penurunan nilai SAKIP juga dialami oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia. Penurunan tersebut dikarenakan metode/instrumen evaluasi SAKIP yang digunakan oleh Menpan selalu diperbaharui terus menerus.

4. Persentase satker UPT pusat di daerah yang menerapkan standar ISO 9001:2008 dengan sasaran target 30%.

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu meningkatkan standar layanan birokrasi di semua unit kerja Kemdiknas di tingkat unit pelaksana teknis daerah, perguruan tinggi, dan sekolah menengah kejuruan meliputi 55 UPT, 172 SMK, 36 PT. Secara kuantitatif sasaran tersebut telah mencapai targetsehingga pada tahun 2011 hasil evaluasi akhir terhadap kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan unit-unit yang menerapkan ISO 9001:2008.

5. Persentase satker di lingkungan unit utama yang menerapkan standar ISO 9001:2008 dengan sasaran target 100%.
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu meningkatkan standar layanan birokrasi di semua unit kerja Kemdiknas di tingkat pusat yang meliputi 47 unit kerja eselon II.
Secara kuantitatif sasaran tersebut telah mencapai target sehingga hasil evaluasi akhir terhadap kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan unit-unit yang menerapkan ISO 9001:2008 pada tahun 2011.
6. Persentase Unit Utama Yang Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja, dengan target 75% dan dapat terealisasi 75%, sehingga persentase realisasi capaian sebesar 100%.
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu Persentase Satker di Lingkungan Unit Utama yang Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja, dengan dua output, yaitu Jumlah Dokumen Kelembagaan Organisasi dan Jumlah Dokumen Kinerja Organisasi.
7. Persentase satker yang tingkat kehadiran pegawainya tidak kurang dari 99% (basis: OH).
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu tingkat ketepatan layanan kepegawaian yang mencapai 99,75% dan tingkat absensi PNS kurang dari 2% per tahun. Pada tahun 2011 ini ditargetkan 98% dan realisasinya mencapai 83,45%. Hasil evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya hambatan dikarenakan proses kepegawaian di Biro Kepegawaian sangat tergantung pada unit kerja lain.
8. Sistem remunerasi berbasis kinerja diterapkan di lingkungan Kementerian dengan sasaran target yang belum ditetapkan, namun sampai akhir tahun 2011 kegiatan yang menunjang ketercapaian IKU tersebut sudah mulai dilaksanakan.
9. Persentase Realisasi Program dan Kegiatan
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu Tersedianya Bahan Kebijakan Dalam Rangka Meningkatkan Ketepatan Laporan Pelaksanaan Rencana Dan Program Di Lingkungan Kemdikbud, yang meliputi 30 dokumen dengan anggaran sebesar Rp 4.092.768.000,00 telah terealisasi sebanyak 30 dokumen (100%) dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 4.668.491.000,- (95,23%).
10. Persentase realisasi anggaran kementerian, dengan target sasaran 95,5%

Capaian kinerja untuk sasaran kegiatan tersebut didukung oleh indikator sasaran dengan dokumen rencana pelaksanaan anggaran 14 dokumen dan tercapai 14 dokumen dengan capaian target berbanding capaian *output* (target 14 dokumen dan tercapai 14 dokumen) sebesar 100%. Secara kuantitatif sasaran tersebut telah mencapai target yang direncanakan secara baik dalam pelaksanaannya.

11. Persentase anggaran yang tidak diblokir, dengan sasaran target 95%
Capaian kinerja untuk sasaran ini telah didukung oleh indikator sasaran dokumen perencanaan anggaran sebanyak 41 dokumen. Pada akhir tahun 2011 telah diadakan revisi sebanyak 5 dokumen dan tercapai 99,64% yaitu Rp 679.396.294.000,00 dari anggaran Rp681.867.234.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2011 pelaksanaan kegiatan ini dalam proses pelaksanaan telah melebihi target yang ditetapkan.
12. Persentase satker Kementerian terkoneksi secara daring (*Online*).
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu meningkatnya sistem layanan pada unit-unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), terutama terkait koordinasi, integrasi layanan, serta sharing resources dan informasi antar unit utama Kemdikbud. Pencapaian realisasi sebesar 99,58% dari target capaian di tahun 2011 dikarenakan adanya 5 (lima) dari 916 (sembilan ratus enam belas) satuan kerja pendidikan yang ditargetkan merupakan satuan kerja baru (hasil pemekaran) yang belum memiliki infrastruktur yang memadai.
13. Tingkat penerapan E-Administrasi di lingkungan Kementerian (*Persen*).
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi yang sesuai tugas dan fungsi di masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemdikbud, seperti penerapan SIMKEU, LAPKER, *E-Proc*, *E-Office*. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, dapat dikatakan bahwa penerapan E-administrasi di 350 satuan kerja tidak mengalami hambatan.
14. Persentase satuan pendidikan formal dan unit kerja terkoneksi ke sistem pembelajaran daring (*Online*).
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut, didukung oleh indikator sasaran, yaitu Meningkatnya Sistem Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal sebagai media pembelajaran dalam rangka mendukung perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan mutu pembelajaran dengan memanfaatkan televisi edukasi, radio edukasi, suara radio edukasi, dan rumah belajar melalui

jaringan pendidikan nasional, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran.

Pada tahun anggaran 2011, telah dicapai sebesar 23.178 satuan pendidikan (70,93%) dari jumlah satuan pendidikan yang ditargetkan untuk dikoneksikan melalui Jardiknas, 56 (100%) PTN dari PTN yang ditargetkan untuk dikoneksikan melalui Jardiknas. Selain itu, telah dicapai pula 9.800 (98%) dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang ditargetkan untuk memanfaatkan Rumah Belajar serta 3.964.676 (79,29%) dari user yang ditargetkan untuk mengakses dan memanfaatkan Rumah Belajar. Capaian kinerja lainnya adalah 17.680 satuan pendidikan dapat memanfaatkan Televisi Edukasi dengan memanfaatkan siaran melalui 1 kanal sebanyak 24 jam, juga melalui siaran televisi interaktif melalui kanal 2 sebanyak 8 jam setiap harinya. Untuk siaran televisi edukasi dibutuhkan bahan siaran dan pada tahun 2011 telah diproduksi dan disiarkan sebanyak 687 bahan siaran selain bahan siaran yang diproduksi pada tahun-tahun sebelumnya. Agar siaran Televisi Edukasi dapat dinikmati secara nasional, pada tahun anggaran 2011 Pustekkom bekerja sama dengan TVRI untuk menyiarkan siaran pendidikan sebanyak 260 jam siaran. Selain itu, Pustekkom juga telah bekerja sama bersama dengan TV lokal, TV kabel sebanyak 80 stasiun TV lokal dan TV kabel untuk menyiarkan siaran pendidikan. Selain siaran televisi edukasi yang disiarkan secara konvensional, Pustekkom juga telah menyiarkan melalui TV streaming melalui www.tve.kemdiknas.go.id dan sampai dengan akhir Desember 2011 yang telah mengakses dan memanfaatkan radio streaming ini sebanyak 100.000 pengguna.

Mengingat masih terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan yang memahami TIK untuk pendidikan, maka telah dilakukan bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi tentang pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pendidikan. Pada tahun 2011 ini tenaga pendidik dan kependidikan yang diberikan bimbingan, pelatihan, dan sosialisasi sebanyak 7.559 orang (94,49%) dari yang ditargetkan untuk seluruh Indonesia.

15. Persentase kerja sama bilateral, regional, dan multilateral bidang pendidikan yang ditindaklanjuti.

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu Tersedianya Bahan Kebijakan Dalam Rangka Meningkatkan

Kelancaran Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan, yang meliputi 34 laporan dan 12 bulan layanan dengan anggaran sebesar Rp 8.689.330.000,- telah terealisasi sebanyak 46 dokumen (135,29%) dan 12 bulan layanan (100%), dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 7.881.513.000,- (90,70%).

16. Persentase penyelenggaraan pendataan pendidikan

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh tiga indikator sasaran, yaitu: terpetakannya data Satuan Pendidikan, data Peserta Didik dan PTK dan data Pendidikan Keaksaraan didalam Padati-Web, dengan capaian target 20% ini sesuai dengan yang ditargetkan. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan.

17. Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data

Target capaian kinerja untuk sasaran tersebut adalah tersedianya 10 Naskah Data Statistik dan 39 Naskah Pendayagunaan Data, sehingga persentase capaian target IKU adalah 100%. Berikut adalah jenis-jenis naskah tersebut.

Statistik Pendidikan Nasional sebanyak 10 naskah:

- (1) Statistik TK/ RA/ BA;
- (2) Statistik SD/ MI;
- (3) Statistik SMP/ MTs;
- (4) Statistik SMA/ MA;
- (5) Statistik SMK/ MAK;
- (6) Statistik Pendidikan Menengah (SMP/ MTs, SMA/ MA, dan SMK/ MAK);
- (7) Statistik SLB;
- (8) Statistik Persekolahan (TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, SLB);
- (9) Statistik Pendidikan Tinggi (PTN, PTS, dan PTK);
- (10) Statistik Pendidikan Nonformal (Pendidikan Keaksaraan, PAUD Nonformal, Pendidikan Kesetaraan, serta Kursus dan Kelembagaan).

Analisis dan Pendayagunaan Data Pendidikan Statistik Pendidikan Dasar sebanyak 11 naskah, yakni

- (1) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang TK
- (2) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang SD
- (3) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang SMP
- (4) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang SMA
- (5) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang SMK
- (6) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang PLB
- (7) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang PT
- (8) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang PAUDNI

- (9) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Program Keaksaraan
- (10) *Studi Rate of Return* Pendidikan
- (11) Perencanaan Kebutuhan Guru
- (12) Analisis Penelusuran Daerah dan Sekolah Target Pembinaan untuk Peningkatan Mutu SD/MI
- (13) Analisis Penelusuran Daerah dan Sekolah Target Pembinaan untuk Peningkatan Mutu SMP/MTs.

Analisis dan Pendayagunaan Data Pendidikan Menengah sebanyak 12 naskah, yakni:

- (1) Proses Pembelajaran dalam Angka
- (2) Indikator Kunci Proses Pembelajaran
- (3) Informasi Individu Taman Kanak-kanak Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
- (4) Informasi Individu Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
- (5) Informasi Individu Sekolah Menengah Pertama Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
- (6) Informasi Individu Sekolah Menengah Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
- (7) Informasi Individu Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
- (8) Informasi Individu Pendidikan Luar Biasa Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
- (9) Analisis Penelusuran Daerah dan Sekolah Target Pembinaan untuk Peningkatan Mutu SMA/MA
- (10) Analisis Penelusuran Daerah dan Sekolah Target Pembinaan untuk Peningkatan Mutu SMK
- (11) Sistem Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah
- (12) Efektifitas Penggunaan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SMA.

Analisis dan Pendayagunaan Data Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nonformal sebanyak 6 naskah, yakni

- (1) Analisis SDM PNF
- (2) Analisis SDM PT
- (3) Profil Pendidikan Nonformal
- (4) Profil Pendidikan Tinggi
- (5) Keselarasan Lulusan PT dengan Tuntutan Lapangan Kerja yang Tersedia di Dunia Usaha dan Dunia Industri

- (6) Analisis Disparitas Kualitas Lulusan PT Ditinjau dari Lama Studi dan IPK.

Analisis dan Pendayagunaan Data Pendidikan sebanyak 8 naskah, yakni:

- (1) Penyusunan Indikator Kuantitatif Pendidikan Internasional (*World Education Indicators*) Kemdikbud - Unesco - OECD,
- (2) Penyusunan Naskah Pendayagunaan Data Statistik Pendidikan,
- (3) Analisis Kebijakan Pendayagunaan Pendidikan Untuk Pimpinan.
- (4) Kesiapan LPTK dalam Mendukung Peningkatan Kualifikasi Guru
- (5) Analisis Deskriptif untuk Menjawab Isu dan Permasalahan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang Sedang Berkembang
- (6) Inventarisasi Isu dan Permasalahan yang Terkait dengan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
- (7) Naskah Publikasi Data dan Informasi Pendidikan
- (8) Kesiapan Daerah dalam Menyerap Pendidik Bertaraf Internasional.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan.

18. Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD Yang Tergabung Dalam Jaringan Pendataan.

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh 4 indikator sasaran, yaitu terimplementasinya Sistem Informasi Pendataan Pendidikan (67.77%) tidak tercapainya target dikarenakan mengalami kendala terlambatnya pembukaan blokir. Indikator ini juga terdapat pembiayaan dari PHLN dan RMP sehingga sedikit mengalami kesulitan. Terkoordinasinya SKPD Pendataan Pendidikan (81%), tidak tercapainya target ini dikarenakan ada beberapa SKPD yang tidak bias hadir. Dari 700 SKPD yang ditargetkan hanya 565 SKPD. Terbinanya SKPD Pendataan Pendidikan (100%), dan terintegrasinya Pangkalan Data Pendidikan Daerah (SKPD-Daerah) dengan Pangkalan Data Kemdiknas (100%). Dari 4 sasaran indikator diatas di tahun 2011 ini baru 2 indikator yang tercapai targetnya 100%. Capaian kegiatan ini adalah 87.19%, sehingga belum sesuai dengan yang ditargetkan, berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini mengalami sedikit hambatan.

19. Persentase masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang kebijakan pendidikan, dengan target 77%.

Capaian kinerja untuk sasaran ini telah didukung oleh indikator sasaran 12 dokumen tata laksana dan kepegawaian, 5 dokumen perencanaan dan keuangan, 4 dokumen kerumahtanggaan, 23 terbitan dokumen informasi

pendidikan, 8 dokumen materi kebijakan pendidikan, 8 dokumen kajian pengaduan dan aspirasi. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2011 pelaksanaan kegiatan ini dalam proses pelaksanaan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan.

9. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur merupakan yang pelaksanaannya berada di bawah tanggungjawab Inspektorat Jenderal. Program ini bertujuan untuk mendukung tujuan strategis yang ketujuh(T7), yaitu: Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Daya serap anggaran dan Ketercapaian IKU program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.20 Daya Serap Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Program	Anggaran	%		
		Pagu	Realisasi	
Pendidikan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur		210.900.000	132.054.235	56.12

Tabel 3.21 Capaian IKU Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010	2011	%		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010		2011		%			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi				
S7.1	Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1	Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500 juta	18%	3,38%	15	3,66	24,4	
		2	Persentase Satker di Lingkungan Kemdikbud Memiliki SPI	45%	25,34%	80	79,85	99,8	
		3	Persentase Penyelesaian Temuan Audit	73,3%	47,05%	75,1	63,56	84,6	
S7.2	Meningkatnya Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1	Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya	30,0%	61,15%	75	100	133,3	

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 sasaran strategis yang ada pada program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, ada 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100%. Sedangkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya realisasi capaian target kinerjanya melebihi 100%.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Satker di Lingkungan Kemdikbud Memiliki SPI". Capaian IKU Persentase Satker di Lingkungan Kemdikbud memiliki SPI sebesar 79,85%, capaian ini lebih kecil 0,15% dari yang ditargetkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 80%. Penyebab dari kurangnya capaian ini adalah masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten dari satuan kerja Kemdikbud untuk membentuk unit fungsional Satuan Pengawasan Intern. Inspektorat Jenderal Kemdikbud telah mengupayakan untuk terus mensosialisasikan dan membina satuan kerja agar dapat mempercepat pembentukan unit SPI. Keberadaan SPI pada

satuan kerja sangat penting dalam memacu upaya percepatan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemdikbud karena salah satu rekomendasi BPK untuk memperbaiki kinerja laporan keuangan adalah dengan meningkatkan efektifitas Sistem Pengendalian Internal.

Inspektorat Jenderal saat ini sudah menyelesaikan proses revisi Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern menjadi Permendikbud Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern. Selanjutnya Inspektorat Jenderal akan mengintensifkan sosialisasi dan internalisasi Permendiknas yang baru serta akan terus meningkatkan proses pembinaan teknis kepengawasan internal kepada SPI satuan kerja Kemdikbud melalui workshop, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Penyelesaian Temuan Audit”. Sampai dengan akhir tahun 2011, total temuan audit (Itjen, BPKP dan BPK-RI) adalah sebanyak 40.955 temuan, dan telah ditindaklanjuti sebanyak 26.033 temuan (63,56%). Ketidaktercapaian sebesar 11,54% dari 75,10% yang ditargetkan terjadi karena masih belum cepatnya penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh auditor. Kondisi ini utamanya terjadi pada satuan kerja di daerah otonomi yang kerap melakukan proses mutasi dan promosi, sehingga aparat yang bertanggungjawab untuk menangani tindak lanjut tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara optimal. Namun demikian Inspektorat Jenderal terus melakukan intensifikasi penyelesaian tindak lanjut melalui program monitoring, rapat koordinasi, dan penyelesaian kasus khusus. Diharapkan pada tahun mendatang dapat terbentuk sistem monitoring Itjen atas tindak lanjut rekomendasi temuan hasil audit Itjen, BPK-RI, dan BPKP yang lebih efektif, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian temuan audit.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaian realisasi target kinerjanya melebihi 100% adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya“. Capaian IKU Persentase Unit yang diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya sebesar 100% yang lebih besar 25% dari yang ditargetkan yaitu sebesar 75%. Keterjangkauan audit Itjen yang berfokus pada pembenahan manajemen kantor auditor dengan berbasis pada kinerja merupakan faktor pendukung tercapainya skor LAKIP Kemdikbud sekurang-kurangnya sebesar 79 poin. Audit Itjen akan sangat membantu auditor dalam mengidentifikasi hal-hal yang masih dinilai lemah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang mencakup perencanaan, pengukuran, dan pelaporan. Hal ini benar adanya mengingat skor LAKIP diberikan tidak hanya sekedar kepada menariknya tampilan dan penyajian sistematika LAKIP tetapi sudah sejauhmana SAKIP dapat diimplementasikan secara utuh dan efektif.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500 juta”.Capaian 2011 pada IKU Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500 juta secara harfiah memang terlihat jauh lebih kecil daripada yang ditargetkan. Target sebesar 15% hanya dapat dicapai sebesar 3,66%. Hal ini berarti terdapat kekurangan sebesar 11,34% dan bermakna bahwa persentase pencapaian target hanya 24,40% yang dapat direalisasikan dari target yang ditetapkan. Berbeda dengan IKU pada umumnya yang dari tahun ke tahun ditargetkan capaiannya meningkat, namun pada IKU ini ditargetkan dari tahun ke tahun semakin menurun capaiannya karena apabila di kaji lebih mendalam dari makna IKU tersebut maka sesungguhnya yang terjadi adalah peningkatan akuntabilitas dari auditan. Dari hasil audit tahun 2011 diketahui bahwa hanya ada 9 Auditan (5 Universitas, 1 Politeknik, 2 Unit Kerja Eselon I dan 1 Unit Kerja Eselon II) yang memiliki temuan berkonsekuensi penyetoran ke kas Negara dengan nilai > Rp 500.000.000. Fakta tersebut mencerminkan bahwa auditan sudah lebih tertib dalam mengelola keuangan negara. Dapat pula dinyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan hasil dari pembinaan Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*). Di sisi lain hal ini juga merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan telah berfungsinya pembinaan oleh Satuan Pengawasan Internal yang dibimbing teknis pengawasannya oleh Itjen Kemdikbud. Oleh karena itu capaian tahun 2011 ini sesungguhnya dapat pula dipandang sebagai prestasi bagi Inspektorat Jenderal.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam DIPA 2011 dibagi dalam 4 (empat) pos pengeluaran, yaitu: (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal, (4) Bantuan Sosial (Bansos). Pos pengeluaran belanja pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, misalnya: gaji dan tunjangan-tunjangan. Pos pengeluaran belanja barang yaitu pos pengeluaran yang

meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Pos pengeluaran belanja bansos yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan bantuan sosial kepada penyelenggaraan pendidikan berupa dana: 1) Imbal Swadana; 2) Bantuan Kegiatan Mengajar (BKM); 3) *Safe Guarding*; 4) Lembaga; 5) Beasiswa; 6) Rehabilitasi; 7) Taman Bacaan Masyarakat; 8) Perpustakaan; dan 9) Kursus-kursus, dll.

Alokasi untuk pos-pos pengeluaran tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini,

Grafik 3.1. Persentase pembagian Pos Pengeluaran pada DIPA 2011

Total pagu belanja pada DIPA Kemdikbud tahun 2011 sebesar Rp. 69.183.347.097.000,-. Dari jumlah tersebut Belanja Bantuan Sosial mendapatkan alokasi sebesar 43% atau Rp. 29.887.221.492.000,-; Belanja Pegawai mendapatkan alokasi 11% atau Rp. 7.430.916.066.000; Belanja Barang mendapatkan alokasi 30% atau Rp. 20.513.552.701.000; dan Belanja Modal mendapatkan alokasi 16% atau Rp. 11.351.656.838.000. Dari empat pos belanja tersebut belanja bansos memperoleh alokasi terbesar. Besarnya alokasi belanja bansos tersebut karena Kemdikbud memiliki kebijakan yang memihak pada upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya pada mereka yang berkontribusi pada memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Grafik 3.2. Persentase pembagian Pos Pengeluaran pada DIPA 2011 per unit utama

Anggaran Kemdikbud tahun 2011 sebesar Rp. 69.183.347.097.000,- yang tersebar di sembilan unit utama seperti terlihat dalam grafik di atas digunakan untuk membiayai sembilan program pembangunan pendidikan. Kesembilan program tersebut antara lain: 1) program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal; 2) program pendidikan dasar; 3) program pendidikan menengah; 4) program pendidikan tinggi; 5) program pengembangan SDM pendidikan dan

penjaminan mutu pendidikan; 6) program penelitian dan pengembangan; 7) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra; 8) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan 9) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

1. Realisasi Anggaran

Total anggaran Kemdikbud yang ada dalam DIPA tahun 2011 berjumlah Rp. 69.183.347.097.000,- Realisasi pengeluaran DIPA sampai bulan Desember tahun 2011 adalah Rp. 61.292.254.107.103,-. Sehingga daya serap anggaran Kemdikbud sampai Desember 2011 adalah:

$$\frac{61.292.254.107.103 \times 100\%}{69.183.347.097.000} = \mathbf{88.59\%}$$

Berikut ini grafik realisasi daya serap DIPA 2011 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masing-masing pos pengeluaran.

Grafik 3.3. Persentase pembagian Pos Pengeluaran pada DIPA 2011 per belanja

Dari empat pos anggaran tersebut hanya belanja pegawai yang serapan anggaran pada pos tersebut relatif baik. Daya serap untuk pos belanja pegawai tersebut relatif stabil sepanjang tahun sepanjang tahun 2011. Sedangkan daya serap anggaran untuk pos belanja modal, barang dan bansos masih kurang baik, hal ini terlihat dari penyerapan anggaran yang sangat besar hanya pada akhir tahun anggaran sedangkan pada awal tahun penyerapannya sangat kecil. Rendahnya daya serap anggaran Kemdikbud pada tahun 2011 tersebut dikarenakan antara lain:

1. Operasional pelaksanaan DIPA Kementerian dimulai awal bulan April 2011
2. APBN-P yang terbit pada awal bulan November 2011, sementara batas pengajuan LS sesuai Perdirjen Perbendaharaan No.73/PB/2011 adalah tanggal 19 Desember 2011
3. Minimnya waktu pelaksanaan kegiatan terkait DIPA APBN-P , diterima awal bulan November 2011
4. Tidak cukupnya waktu pelaksanaan lelang, berakibat banyaknya lelang yang gagal dilaksanakan

5. Kebijakan Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam hal pembahasan DIPA revisi dan atau APBN-P serta persyaratan pencairan dana untuk setiap daerah berbeda-beda
6. Terdapat dana blokir (dana yang dibintangi atas anggaran APBN-P yang terbit pada awal bulan November 2011
7. Adanya efisiensi dari pengadaan barang/jasa
8. Terdapat revisi APBN-P yang keliru, seharusnya dialokasikan untuk satker Dinas Pendidikan Banten tapi dialokasikan ke satker Dinas Pendidikan Maluku Utara sehingga tidak dapat direalisasikan oleh dinas pendidikan Maluku Utara senilai Rp. 43.240.560.000,-.

Berikut grafik daya serap untuk sembilan program yang dilaksanakan oleh sembilan unit utama selama tahun 2011.

Grafik 3.4. Pagu dan realisasi per unit utama

Dengan posisi alokasi anggaran demikian maka dapat disimpulkan bahwa alokasi ini sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang antara lain menyebutkan:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; dan
- c. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. CAPAIAN KONTRAK KINERJA MENTERI DENGAN PRESIDEN

Sesuai dengan kontrak kinerja antara Menteri dengan Presiden sebagaimana tertuang dalam Inpres No 1 tahun 2010, Kemdikbud telah merealisasikan kontrak kinerja tersebut dengan baik. Berikut adalah persentase capaian kontrak kinerja secara keseluruhan antara Menteri dengan Presiden sampai dengan tahun 2011.

1. HASIL PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN TERKAIT BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2011

a. Hasil Pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2010

Tabel 3.22 Capaian Pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2010

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Capaian	Keterangan
Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI				
Peningkatan akses terhadap SD dan pendidikan lanjutannya	Jumlah Unit TK-SD satu atap yang dibangun	500 unit TK-SD satu atap.		a. Kepala BAPPENAS sudah menerbitkan surat persetujuan perubahan rencana aksi pembangunan 500 TK-SD satu atap menjadi pembangunan 500 PAUD terpadu pada tanggal 5 Juli 2011.

Tabel 3.22 Capaian Pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2010 (Lanjutan...)

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Capaian	Keterangan
Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI				
				<p>b. Tahun ini UKP4 tidak mau merubah rencana aksi sebelum ada Inpres baru pengganti Inpres lama.</p> <p>c. DIPA 2011 sudah dirubah menjadi pembangunan PAUD terpadu.</p> <p>d. Ditjen PAUDNI telah melaksanakan pembangunan PAUD terpadu dan akhir tahun 2011 diperkirakan targetnya akan tercapai.</p>
	Jumlah Unit SD-SMP satu atap yang dibangun	400 unit SD-SMP satu atap	100 %	Telah disalurkan dana pembangunan SD-SMP Satu Atap termin 2 ESSP dengan jumlah sasaran 400 lokasi.
	Tersedianya pelayanan pendidikan non formal dan pendidikan khusus serta pelayanan khusus (siswa)	93.000 siswa	88%	Telah 29 Provinsi yang sudah 100% Beasiswa tersalurkan dan sudah ada penetapan SK Subsidi. Tersisa 4 provinsi yang belum menyerahkan laporan Beasiswa ke Direktorat PPK-LK Dikdas.

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Capaian	Keterangan
Peningkatan Kebersamaan Penduduk				
Penyelenggaraan Pendidikan keaksaraan fungsional	Jumlah sasaran pengentasan buta aksara (usia 15 tahun ke atas)	555.000 orang (usia 15 tahun ke atas) buta aksara terentaskan.	100%	Telah terlaksananya 100% kegiatan program Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (status bulan November)
Penyediaan Taman Bacaan masyarakat (TBM)	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dikembangkan di daerah.	500 unit TBM dikembangkan di 33 provinsi	105%	Telah ditetapkan 526 lembaga TBM (236 lembaga dengan anggaran pusat dan 290 lembaga dengan anggaran

b. Hasil Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2011

Tabel 3.23 Capaian Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2011

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan % Capaian Keterangan				
Pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang bebas korupsi	Sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang transparan dan akuntabel secara on line	Terciptanya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang bebas dari korupsi	B06 :100%	"Komponen <i>prototype</i> web yang telah selesai dikerjakan meliputi : a. Sistem pelaporan pencairan dana BOS b. Informasi alokasi dana BOS di tiap sekolah c. Sistem pengaduan dari masyarakat d. Forum diskusi terkait dana BOS untuk umum"
			B07 : 108% Pengembangan web sistem pengawasan telah menyelesaikan beberapa bagian komponen laporan. Progres keseluruhan mencapai 70%.	Komponen web skala final yang merupakan pengembangan dari <i>prototype</i> telah selesai dikerjakan meliputi : a. Sistem pelaporan pencairan dana BOS b. Informasi alokasi dana BOS di tiap sekolah
			B08 :106.25%	Pencapaian sudah 85% Komponen web skala final yang merupakan pengembangan dari <i>prototype</i> telah selesai dikerjakan meliputi : a. Sistem pelaporan pencairan dana BOS b. Informasi alokasi dana BOS di tiap sekolah c. Sistem pengaduan dari masyarakat

--	--	--	--	--

Tabel 3.23 Capaian Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2011 (Lanjutan...)

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan % Capaian Keterangan				
			B09 : 145% 1. 200% 2. 93%	1. Kegiatan Workshop Pendataan tersebut dilaksanakan di 4 region dengan mengundang perwakilan dari setiap kabupaten/kota (seluruhnya ada 497 kab/kota) dan provinsi. Data pendukung daftar kab/kota menyusul 2. Pengembangan web telah mencapai progres 93%. Sistem pengawasan BOS sudah diintegrasikan dalam web Kemdikbud dengan alamat www.bos.Kemdikbud.go.id . Saat ini web sudah disosialisasikan ke Tim BOS Prov/Kab/Kota pada kegiatan Workshop Data BOS
			B10 : 102,11%	Pengembangan web telah mencapai progres 97%. Sistem pengawasan BOS sudah diintegrasikan dalam web Kemdikbud dengan alamat www.bos.Kemdikbud.go.id . Komponen web skala final yang merupakan pengembangan dari prototype telah selesai dikerjakan seluruhnya.
			B11: 100 %	Sudah dilaksanakan uji coba di pusat dan daerah dengan alamat website www.bos.Kemdikbud.go.id
			100 %	Kemungkinan pencapaian bisa hijau

c. Hasil Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011

Tabel 3.24 Capaian Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011 Prioritas Nasional 2: Pendidikan

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi				
Peningkatan sistem	Tersusun dan	1) Tersusunnya jumlah sasaran	100%	1. Sasaran BOS SD/SDLB 2011

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
manajemen BOS	teraplikasikannya sistem manajemen penyaluran BOS melalui transfer daerah	BOS SD/SMP pada Februari 2011;		sebesar 27.225.299 siswa, terdiri dari 24.691.869 siswa negeri dan 2.533.430 siswa swasta
		2) Tersusunnya juklak BOS melalui SD/SMP pada Februari 2011;	100%	2. Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011
		3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi BOS 2011 per triwulan	75%	Monitoring evaluasi triwulan IV akan dilakukan pada bulan 12.
		4. Tersusunnya konsep (PP/Keppres) penyaluran dana BOS berdasarkan evaluasi triwulan II	75%	1. Status saat ini adalah pembuatan Peraturan Menteri yang melibatkan 3 kementerian, yaitu Kemdikbud, Kemdagri, dan Kemkeu (Perlu adanya perubahan rencana aksi dari PP/Keppres menjadi Peraturan Menteri) 2. Draft Permen sudah siap
Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah melalui pembelian hak cipta	Makin terjangkau buku ajar yang murah dan bermutu bagi siswa dari seluruh kalangan ekonomi	Tercapainya 100% (300 judul) buku teks pelajaran SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan SMK yang telah dibeli hak ciptanya.		Hasil penilaian buku masih dalam pembahasan ulang di unit-unit terkait. Dari 156 judul buku yang sudah dikeluarkan Permendiknas-nya, hanya 59 judul buku yang layak dibeli. Alasan : 1. antisipasi perubahan kurikulum untuk mapel tertentu 2. tidak semua judul buku dibeli, karena ada batasan aturan bahwa untuk tiap mapel maksimal 5 buku 3. penerbit/pengarang tidak mau dibeli hak ciptanya 4. harga buku turun Kemungkinan pencapaian merah dikarenakan belum bisa dikeluarkan Permendiknas untuk 200 judul. Saat ini pihak Puskurbuk masih mengusahakan secara optimal agar jumlah buku teks yang dialihkan hak ciptanya bertambah jumlahnya.

Tabel 3.24 Capaian Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011 Prioritas Nasional 2: Pendidikan (*Lanjutan...*)

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi				
Penyaluran beasiswa bagi murid-murid yang berprestasi	Tersalurkannya beasiswa prestasi bagi murid SMP	Tersalurkannya beasiswa prestasi kepada 30.300 murid SMP dengan tepat waktu dan tepat jumlah paling lambat Desember 2011	76,64%	Beasiswa Bakat Prestasi dikelola oleh pusat dan daerah melalui kegiatan Dekonsentrasi Provinsi, jumlah siswa yang dikelola pusat 4.497 dan yang dikelola daerah 28.832 sehingga total siswa penerima beasiswa bakat prestasi adalah 33.329 siswa. Jumlah beasiswa yang selesai disalurkan adalah 23.661 siswa (76,64%)
Rehabilitasi gedung sekolah	Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen penyaluran DAK melalui transfer	Diterimanya laporan DAK dari 445 Kabupaten/Kota		Kemungkinan pencapaian menjadi merah, karena: 1. Dana akan diambilkan dari dana UKMP3 untuk monitoring yang belum digunakan

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
	daerah			2. Pihak Direktorat tidak mau melaksanakan dengan alasan bahwa ukuran keberhasilan bukan merupakan tanggung jawab Kemdikbud melainkan tanggungjawab Kemkeu
Regulasi Pemerataan distribusi guru	Tersedianya guru bagi seluruh jenjang pendidikan	Terbitnya SEB yang mendukung adanya pemerataan guru di dalam satu provinsi	100%	Perubahan nomenklatur dari SEB menjadi Peraturan Bersama. Peraturan telah ditandatangani oleh Mendiknas, Menkeu, Menpan, Menag dan Mendagri.
Perbaikan status gizi anak sekolah				
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan	Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan termiskin, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS untuk peningkatan gizi	Tercapainya 1.200.000 Siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan termiskin, dan kepulauan yang menerima PMTAS secara teratur. Target bulan 12 sejumlah 108 Hari Makan Anak (HMA).	54%	Pada bulan Oktober sebesar 58 HMA dan rencana bln Nopember sebesar 50 HM
Penguatan metodologi dan kurikulum				
Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Implementasi uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif	Tercapainya 100% pelaksanaan uji coba kurikulum di 250 satuan pendidikan; diterimanya revisi/masukan/perbaikan sehingga kurikulum siap untuk mulai diimplementasikan secara luas	100%	1. 125 satuan pendidikan telah menerapkan integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum di 16 provinsi (terlampir) 2. telah terpilih 125 satuan pendidikan rintisan tahap ke-2 di 17 provinsi

Tabel 3.24 Capaian Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011 Prioritas Nasional 2: Pendidikan (Lanjutan...)

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
Penguatan pengelolaan sekolah				
Pemberdayaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan profesional yang berkesinambungan	Persentase Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK dan Pengawas yang sudah mengikuti pelatihan yang berfokus pada hal yang bersifat praktis	Tercapainya 7,80 % (20.050 kepala sekolah dan pengawas) dari seluruh tenaga kependidikan di tingkat SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti program pelatihan profesional yang berkesinambungan paling lambat bulan Desember 2011 (7,80% untuk tiap tingkatan pendidikan)	105.32% 1. Kepala sekolah : 103.74% 2. Pengawas : 97.37%"	Telah terlaksana sebanyak total kepala sekolah dan pengawas 21.551 orang dari target 20.050 (masih akan diupdate) 1. Kepala sekolah : 10.644 orang dari target 10.796 orang (103.74%) 2. Pengawas : 10.472 orang dari 10.755 orang (97.37%)
Percepatan sertifikasi guru dalam jabatan	Persentase guru TK/SD, SMP, SMA/SMK dan Pengawas yang lulus sertifikasi guru.	Tercapainya 100% (300.000 guru dan pengawas) di tingkat TK/SD SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti program sertifikasi paling lambat bulan Desember 2011	96%	288.924 guru dan pengawas sekolah telah mengikuti sertifikasi (dari 300.000 guru dan pengawas), terjadi penurunan dikarenakan optimalisasi anggaran Target BPSDM sampai bulan 12 sebanyak 288.546 (terjadi penurunan karena ada optimalisasi anggaran)
Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan				
Peningkatan Keselarasan Pendidikan dengan Dunia Usaha melalui Pendidikan Kewirausahaan di SMK dan PT	Jumlah SMK dan PT yang telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship serta pelaksanaan uji coba	Tercapainya 50 PT dan 260 SMK yang telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship, paling lambat Desember 2011	SMK : 96% PT : 176%	250 SMK dan 88 PT yang telah mengembangkan pendidikan berbasis kewirausahaan.

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
Penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di sekolah	Persentase satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Tercapainya 30% (setara 8.960 sekolah) dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMP dan 60% (setara 6.682 sekolah) dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMA yang telah menerapkan pembelajaran berbasis TIK, paling lambat Desember '11	SMP : 82,7% SMA :70,1%	Status bulan November 2011: SMP: 7.405 sekolah telah menerapkan pembelajaran berbasis TIK dari target akhir tahun 8.960. SMA: 4.682 sekolah telah menerapkan pembelajaran berbasis TIK dari targetakhir tahun 6.682
Pemantauan dan pemberian insentif serta dukungan bagi siswa berbakat peserta olimpiade ilmiah internasional dan kompetisi internasional lainnya	Jumlah siswa berbakat (baik peserta olimpiade internasional dan kompetisi tingkat tinggi lainnya) yang telah mendapat insentif dan dukungan dari pemerintah	100% peserta olimpiade ilmiah internasional dan kompetisi Internasional lainnya yang telah mendapat insentif dan dukungan dari pemerintah		Pemenang Olimpiade Sains Internasional (OSI) sebanyak 96 orang sudah menerima insentif 47 mahasiswa (ongoing) & 5 mahasiswa (baru) mendapat Beasiswa pemenang OSI Total sebanyak 64 mahasiswa

Tabel 3.25 Capaian Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011
Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
Penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga				
Penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah	Jumlah peserta didik jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sasaran beasiswa miskin	Terselurkannya beasiswa untuk: a. Target 2.040.000 siswa SD/SDLB dari masyarakat berpendapatan rendah; b. Target 961.849 siswa SMP/SMPLB dari masyarakat berpendapatan rendah; c. Target 308.124 siswa SMA dari masyarakat berpendapatan rendah; d. Target 140.558 siswa SMK dari masyarakat berpendapatan rendah; e. Target 67.000 mahasiswa dari masyarakat berpendapatan rendah	a. SD/SDLB = ??? b. SMP/SMPLB = 157,4% c. SMA = 98,6%  d. SMK = 95%  e. Mahasiswa = 100% 	Status November 2011 a. belum ada konfirmasi b. Total penerima BSM SMP adalah 1.532.642 siswa, telah tersalurkan 1.513.704 siswa (98,76%) c. Total BSM SMA yang telah tersalurkan 303.950 siswa d. Total BSM SMK yang telah tersalurkan 133.530 siswa e. Bantuan Bidikmisi 50.000 mahasiswa (20.000 on going , 30.000 mahasiswa baru), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) + Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) (bagi yang berpenghasilan rendah) sebanyak 219.251 mahasiswa

Tabel 3.26 Capaian Pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 2011
Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik				
Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik	Tersedianya pendidik dan tenaga	Diterimanya tunjangan khusus pada 44.000 orang pendidik	102,25%	Telah diterbitkan SK sejumlah 44.989 orang

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik	pendidikan yang menerima tunjangan khusus	dan tenaga pendidikan pada Desember 2011		

2. HASIL PELAKSANAAN KONTRAK KINERJA ANTARA MENTERI DAN PRESIDEN TAHUN 2011

Tabel 3.27 Capaian Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja Waktu	Tahun 2010		Tahun 2011		Pencapaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi (sementara)	
1.	Memastikan tersusunnya Renstra Kementerian 2009-2014	Des. 2009	100%	Jan 2010 (100%)	---	---	Telah tercapai di th 2010
2.	Penyediaan jaringan internet di 17.500 sekolah	Jan 2011	17.500 sek	17.500 sek	---	---	Telah tercapai di th 2010
3.	Peningkatan kemampuan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah: 30.000 Pengawas Sekolah tahun 2010; 20.050 kepala sekolah dan pengawas sekolah pada tahun 2011; dan diikuti dengan 200.000 Kepala Sekolah sampai 2014	2010-2014	30.000 PS 30.000 Kepsek		Desember 2011 tercapainya 7,80 % (20.050 kepsek dan pengawas) dari seluruh tenaga kependidikan SMP, SMA/SMK yang mengikuti program pelatihan	21.551 (terdiri dari 10.644 Kepala Sekolah dan 10.472 Pengawas Sekolah)	
4.	Peningkatan akses pendidikan dengan: - Beasiswa pendidikan tinggi	TA 2010/2011	65.000 mhs	65.000 mhs	Target 67.000 mhs dari masyarakat berpendapatan rendah	Bantuan Bidikmisi 50.000 mahasiswa (20.000 on going , 30.000 mahasiswa baru), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) + Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) (bagi yang berpenghasilan rendah) sebanyak 219.251 mahasiswa	

	- Beasiswa 10.000 siswa SMA berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu		10.000 siswa		(Pemenang lomba2)		
--	---	--	--------------	--	-------------------	--	--

Tabel 3.27 Capaian Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (Lanjutan...)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja Waktu	Tahun 2010		Tahun 2011		Pencapaian	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi (sementara)		
5.	Memastikan penetapan kebijakan khusus bagi masyarakat daerah terdepan dan terluar melalui pemberian tunjangan khusus bagi guru	Jan. 2010	46.300 guru		Diterimanya tunjangan khusus pada 44.000 orang PTK pada Desember 2011	Sasaran sebanyak 44.989 orang ditambah 913 orang (APBN-P).	pencapaian 100%;	
6.	Memastikan peningkatan: - APM Sekolah Dasar dari 95% (2009) menjadi 96% pada tahun 2014	Okt. 2014			83,01%	85,58%	SD, SDLB dan paket A	
	- APM SMP dari 73% (2009) menjadi 76 % pada tahun 2014		55,97%		56,80%	56,07%	SMP, SMP LB dan paket B	
	- APK SMA dari 69% (2009) menjadi 85 % pada tahun 2014		61,8%		64,6%			
7	Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS	2012	Pembentukan Tim Manajemen BOS (100%)	Pembentukan Tim Manajemen BOS (100%)	Pembentukan Tim Manajemen BOS (100%)	Pembentukan Tim Manajemen BOS (100%) Terlaksananya monitoring dan evaluasi BOS 2011 per triwulan	Tercapai 100%	
			Buku Panduan BOS terkirim (100%)	Buku Panduan BOS terkirim (100%)	Buku Panduan BOS terkirim (100%)	Tersusunnya juklak BOS SD/SMP pada Feb 2011	Tercapai 100%	
						Tersusunnya jumlah sasaran BOS SD/SMP pd Feb 2011	Tercapai 100%	

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja Waktu	Tahun 2010		Tahun 2011		Pencapaian	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi (sementara)		
							Buku Panduan BOS terkirim (100%)	Tercapai 100%
							Pengesahan PP/Keppres Penyaluran BOS berdasarkan triwulan II	Tercapai 100%

Tabel 3.27 Capaian Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (Lanjutan...)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja Waktu	Tahun 2010		Tahun 2011		Pencapaian	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi (sementara)		
			Jlh dana triwulan 1 SD (100%), SMP (100%)	Jlh dana triwulan 1 SD (100.63%), SMP (99,94%)	triwulan 1 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 1 SD Rp 2.654.115.615.175 (100%), 26.701.267 siswa SMP Rp1.337.265.900.980 (100%), 9.364.983 siswa		
			triwulan 2 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 2 SD (100%), SMP (100,08%).	triwulan 2 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 2 SD Rp 2.613.975.710.105 (100%), 26.297.446 siswa SMP Rp 1.317.041.564.850 (100%), 9.223.350 siswa		
			triwulan 3 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 3 SD, (100%), SMP(100%) Dana BOS untuk triwulan 3 tingkat	triwulan 3 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 3 SD Rp 2.527.457.941.735 (100%), 25.427.049 siswa	Status per 19 Desember 2011	

				SMP, dari target dana sebesar Rp1.337.372.925.750 yang telah tersalurkan adalah Rp 1.337.372.925.750 atau 100%.		SMP Rp 1.273.449.921.440(100%) 8.918.074 siswa	
--	--	--	--	---	--	---	--

Tabel 3.27 Capaian Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (Lanjutan...)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja Waktu	Tahun 2010	Tahun 2011			Status per 19 Desember 2011
			Target	Realisasi	Target	Realisasi (sementara)	
			triwulan 4 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 4 •SD (100%), *1) •Penyaluran dana BOS Triwulan 4 tingkat SMP, *2) > Monitoring penyaluran dana BOS triwulan 3 dan 4 di tingkat SD dan SMP telah selesai dilaksanakan (100%), *3)	triwulan 4 SD (100%), SMP (100%)	triwulan 4 SD Rp 906.628.921.300 (100%), 9.694.421 siswa SMP Rp 485.520.717.985 (100%), 3.400.142 siswa	
	Penurunan harga buku standar di SD dan Sekolah Menengah 30-50%	2012	220 judul	Tersedianya data jumlah siswa tahun 2010/1011 hasil Workshop Pendataan sejumlah 26.630.889 siswa (capaian 100%) >Jml siswa tahun ajaran baru disosialisasikan pada bulan Oktober.	Tercapainya 100% (300 judul) buku teks pelajaran SD/SMP/SMA/SMK sederajat, dan yang dibeli hak ciptanya	Juknis BOS sebanyak 173.000 eksemplar dari nilai Rp.1.073.750 menjadi Rp. 952.580.	pencapaian <50%

	Penyediaan Internet ber-content pendidikan di Sekolah Menengah dan terus diperluas hingga SD		20% SMP dan 40% SMA		Tercapainya 30% (setara 8.960 sekolah) dari SMP dan 60% (setara 6.682 sekolah) dari SMA yang telah menerapkan TIK, Desember 2011	pencapaian 76-100%;
<p><i>*1) Penyaluran dana BOS mencapai 100% sebesar Rp.2.749.396.114.250,- . Total Pencairan dana BOS tahun 2010 di tingkat SD, dari alokasi Rp.10.801.516.168.000,- sudah tersalur sejumlah Rp.10.800.712.578.177,- atau 99,99%</i></p> <p><i>*2) Dana BOS telah selesai mencapai 100% sebesar Rp.1.349.253.361.288,- . Total Pencairan dana BOS tahun 2010 di tingkat SMP, dari alokasi Rp.5.520.903.802.250,- sudah tersalur sejumlah Rp.5.364.423.149.250,- atau 97,17%</i></p> <p><i>*3) Dengan sasaran seluruh propinsi dan laporan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana BOS triwulan 3 dan 4 telah disusun. (100%)</i></p>						

Tabel 3.27 Capaian Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (Lanjutan...)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja Waktu	Tahun 2010		Tahun 2011		Pencapaian	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi (sementara)		
8	Memastikan peningkatan APK Perguruan Tinggi dari 18% (2009) menjadi 25 % pada tahun 2014	Okt. 2014	22,8%		25,1%	27.01%		
9	Memastikan penerapan metodologi pendidikan tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem UAN	2011						
10	Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014	2014						
11	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul. ● Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance. ● Mendorong peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan 	Okt. 2014				Pemberian subsidi kepada KS dilakukan oleh Direktorat dan Sekretariat melalui pemberian subsidi, pembinaan terhadap 479 dewan pendidikan tingkat kab/kota dan pemberian bantuan kepada 200 DP Kab/Kota dan 20 DP tingkat Provinsi.	DP tingkat provinsi baru terbentuk di 20 Provinsi dan DP pada tingkat kab/kota baru terbentuk 479 dari 497 kab/kota.	

	dalam proses pembelajaran. <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peran Dewan Pendidikan di Kabupaten. 					Pembentukan DP tingkat pusat masih dalam proses.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.27 Capaian Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (Lanjutan...)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja Waktu	Tahun 2010		Tahun 2011		Pencapaian	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi (sementara)		
12	Penataan ulang Kurikulum Sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah, dengan diantaranya memasukkan pendidikan kewirausahaan: <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Nasional • Kurikulum Daerah • Kurikulum sekolah 	Okt. 2014				Tercapainya 100% pelaksanaan uji coba kurikulum di 250 satuan pendidikan; diterimanya revisi/masukan/perbaikan kurikulum		pencapaian 76-100%;
13	Memastikan peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Remediasi kemampuan mengajar guru. - Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar. - Sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK. 	Okt. 2014				Tercapainya 100% (300.000 guru dan pengawas) TK/SD SMP, SMA/SMK yang sudah mengikuti program sertifikasi, Desember 2011	Tercapainya 100% (310.000 guru dan pengawas) TK/SD SMP, SMA/SMK yang sudah mengikuti program sertifikasi, Desember 2011	pencapaian 76-100%;
	- Membuka luas kerjasama PTN-lembaga pendidikan internasional					48	48	
	- Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES. <ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan guru:murid di SD/MI 1:32 dan di SMP/MTS 1:40. 					5 PT Perbandingan guru:murid di SD/MI 1:20 sampai 1:28 dan SMP/MTS 1:20 sampai 1:32	3 PT - Ada 35.350 SDN yang berada dalam range 1:20 sampai 1:28 atau 28,96% dari jumlah 122.079 SDN.	- Untuk rasio di atas 1:28 ada 3.550 SDN, yang dibawah 1:20 adalah 83.179 SDN.

Tabel 3.27 Capaian Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (Lanjutan...)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja	Tahun 2010	Tahun 2011	Pencapaian
----	-------------------	------------------------	------------	------------	------------

			Target	Realisasi	Target	Realisasi (sementara)	
	Parenting education.	Mulai 2010-2014			10% Kab/kota menyelenggarakan <i>parenting education</i>	15% Kab/Kota telah menyelenggarakan parenting education	<i>pencapaian 100%</i>
15	Memastikan pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang pendidikan yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan pasca konflik.	Paling lambat mulai 2011.			Tercapainya 1.200.000 Siswa TK dan SD yang menerima PMTAS secara teratur	Pemberian PMTAS terhadap 1.200.000 siswa TK dan SD sebanyak 108 hari makan anak (HMA).	<i>Tercapai 100%</i>
16	Memastikan pengentasan daerah tertinggal sedikitnya 50 Kabupaten.	Okt. 2014	7 Kab	7 kab (dalam bentuk semiloka antara Pemda dengan sejumlah Kementerian yg dibawah koordinasi Menkokesra)	3 Kab	3 Kab (idem spt thn 2010)	Beasiswa Miskin Daerah Tertinggal, Tunjangan guru khusus, Rehab, ...? (Dikdas, Dikmen, PAUDNI)
17	Mengkaji ulang dan mengusulkan perbaikan kebijakan, peraturan dan proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan umum.	Paling lambat Juni 2010			Terbitnya SEB yang mendukung adanya pemerataan guru di dalam satu provinsi	Sudah terbit peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru PNS (SKB 5 Kementerian)	Tercapai 100%; Nomor SKB 5 Menteri tahun 2011 yaitu; Nomor 05/X/PB/2011; Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011; Nomor 48 tahun 2011; Nomor 158/PMK.01/2011; Nomor 11 tahun 2011
18	Mencapai sasaran-sasaran RENSTRA 2009-2014	Sesuai target waktu			Mengukur pencapaian IKU dan IKK	Dilakukan pengukuran terhadap IKU dan IKK di setiap akhir tahun.	Dalam proses pengolahan data dan pengukuran terhadap kinerja.

Tabel 3.27 Capaian Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden (*Lanjutan...*)

No	Indikator Kinerja	Target Kontrak Kinerja Waktu	Tahun 2010		Tahun 2011		Pencapaian	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi (sementara)		
19	Pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI	Paling lambat Lap. Keu. 2011			Terciptanya sistem pengawasan atas penyaluran dan	Perubahan ke arah perbaikan terhadap mekanisme	Dalam proses pembahasan.	

					penggunaan BOS dengan pola desentralisasi yang bebas dari korupsi	penyaluran BOS tahun 2012 sebagai hasil evaluasi dari tahun 2011.	
--	--	--	--	--	---	---	--

3. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

Tabel 3.28 Capaian Sasaran Prioritas RKP 2011

No.	Sasaran Prioritas	2011	
		Target	Realisasi
	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 th keatas	7,75 th	
	Menurunnya angka buta aksara penduduk 15 th keatas	5,17%	5,30%
	Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A	95,3%	95,41%
	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A	83,01%	85,58%
	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTS/Paket B	74,7%	75,64%
	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B	56,8%	56,07%
	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C	76,0%	
	Meningkatnya APK SMA/SMK/Paket C		
	Meningkatnya APK PT usia 19-23 th	26,1%	27,01%
	Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		

Tabel 3.29 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas RKP 2011

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2011	
				TARGET	REALISASI
I	PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR				
1	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota	APM SD/SDLB	84,74%	85,58%
			Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran	22,00%	21,6%
2	Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	27.973.000	26.701.267
		Membatkannya gizi siswa TK dan SD melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) terutama di daerah tertinggal,	Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS	1.200.000	1.200.000

		terpencil, perbatasan, dan kepulauan			
3	Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP	Tercapainya Keluasan dan pemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota	APM SMP/SMPLB Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK	60,02% 34,80%	56,07%
4	Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SMP/SMPLB	Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	9.965.000	9.364.983
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM	Persentase komite sekolah yang berfungsi efektif Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui dewan pendidikan	80,00% meningkat	
II		PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH			
1	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	APK SMK Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	29,60% 44,20% 60,00%	
2	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	APK SMA/SMLB nasional Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	37,00% 50,00%	

Tabel 3.29 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas RKP 2011 (Lanjutan...)

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2011	
				TARGET	REALISASI
III		PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI			
1	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi	Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan	APK PT usia 19-23 thn Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES	23,05% 5	25.11 % 3
2	Penyediaan Layanan Kelembagaan	Tersedianya Keluasan dan Kemerataan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya Saing Internasional	Jumlah PT mengembangkan kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri	48	48
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian di lingkungan Ditjen Dikti dan di perguruan tinggi (PT)	Persentase PT BHMN bersertifikat ISO 9001:2008 Persentase PTN (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008 Persentase politeknik negeri bersertifikat ISO 9001:2008	100,00% 54,00% 52,00%	100% 70% 75%

			Persentase PTS (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008	28,00%	10%
			Persentase PTS (politeknik/akademi) bersertifikat ISO 9001:2008	21,00%	15%
IV PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
1	Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota	Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:20 sampai 1:28	51,20%	
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMP 1:20 sampai 1:32	50,50%	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di berbagai bidang	40,00%	29,71%
3	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Tenaga Kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota	Persentase kepala SD yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	30,00%	10,72%
			Persentase pengawas SD yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	50,00%	5,62%

Tabel 3.29 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas RKP 2011 (Lanjutan...)

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2011	
				TARGET	REALISASI
			Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	30,00%	22,88%
			Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	50,00%	11,99%
			Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	30,00%	31,84%
			Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	50,00%	16,68%
4	Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK Bermutu yang merata antar	Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun	20	20
			Jumlah pengembangan standar,	20	20

		Provinsi, Kabupaten dan Kota	sistem, program, bahan dan model diklat bagi tenaga kependidikan per tahun		
			Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi PTK-PNF per tahun	20	20
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN PMP				
1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik			36.75%	
				1.015.288	1.065.564
2	Persentase Kepala Sekolah Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan			25.0%	
				N=60.169	N=10.644
3	Persentase Pengawas Sekolah Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan			100%	
				N=23.588	N=10.472

D. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUD TAHUN 2011

Agenda reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kemdikbud, menekankan pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (layanan satuan pendidikan, layanan peserta didik, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan substansi pendidikan). Tujuan umum pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemdikbud adalah membangun suatu sistem birokrasi yang berintegritas, efisien, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan layanan publik. Adapun tujuan khusus pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemdikbud adalah menghasilkan sistem layanan prima pendidikan kepada semua pemangku kepentingan yang lebih efisien, efektif, dan terbuka melalui pembenahan proses, penguatan organisasi dan budaya kerja, penguatan sumber daya manusia, pengembangan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berikut adalah hasil capaian reformasi birokrasi di lingkungan Kemdikbud selama tahun 2011 yang mencakup 8 (delapan) area perubahan:

- 1) Program Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Tertatanya tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian yang meliputi penataan tugas, fungsi dan organisasi Unit Utama dan UPT;
- b. Teridentifikasinya substansi tugas dan sasaran/objek yang dilayani;
- c. Tersusunnya pembagian kewenangan yang jelas antar unit kerja untuk menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan antar unit kerja;
- d. Tertatanya tugas, fungsi, dan nomenklatur sesuai dengan substansi tugas dan sasaran;
- e. Tersusunnya rancangan tugas, fungsi, dan struktur organisasi UPT yang baru;
- f. Tersusunnya rincian tugas unit kerja Kemdikbud;
- g. Terlaksananya sosialisasi rincian tugas unit kerja Kemdikbud.

2) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a. Terbangunnya sistem rekrutmen pegawai secara *online* untuk seluruh unit kerja di lingkungan Kemdikbud;
- b. Tersusunnya analisis jabatan berdasarkan struktur organisasi baru;
- c. Tersusunnya evaluasi jabatan berdasarkan uraian jabatan, peta jabatan, dan informasi faktor di lingkungan Unit Utama dan UPT;
- d. Tersusunnya peringkat jabatan di lingkungan unit utama pusat dan UPT;
- e. Terlaksananya proses penataan SDM di lingkungan unit utama pusat berdasarkan kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- f. Terbangunnya basis data (*database*) pegawai.

3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. Terciptanya harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan;
- b. Tersedianya pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- c. Terbitnya buku himpunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah);

4) Program Penataan Tata Laksana

- a. Terintegrasinya pelayanan informasi pendidikan melalui *voice*, *sms* dan *fax* melalui *contact center* 177;
- b. Perbaikan portal layanan prima pendidikan nasional www.kemdiknas.go.id;
- c. Terlaksananya sinkronisasi dan sosialisasi Hasil Kajian Bidang Ketatalaksanaan;
- d. Tersusunnya Sistem Pendokumentasian dan Layanan Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan;
- e. Tersusunnya Sistem Layanan Bantuan Hukum;
- f. Terlaksananya reformasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- g. Terlaksananya reformasi di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;
- h. Terbangunnya CPNS *Online*.

5) Program Penguatan Pengawasan

- a. Tersusunnya rencana strategis Itjen Kemdikbud 2010-2014;
- b. Terumuskannya visi dan misi baru Itjen Kemdikbud;
- c. Tersusunnya paradigma baru pengawasan;
- d. Terbentuknya unit satuan pengawasan intern sebanyak 77 unit;
- e. Terlaksananya beberapa kegiatan pengawasan inovatif, antara lain:
 - Peninjauan ulang (*review*) laporan keuangan Kemdikbud;
 - Pendampingan penyusunan laporan keuangan Kemdikbud;
 - Supervisi pengadaan barang/jasa.
- f. Telah diterbitkannya POS-POS pengawasan;

- g. Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi untuk anggota SPI;
- h. Terlaksananya pelatihan SPIP berstandar internasional di Australia;
- i. Tersusunnya rencana induk pengembangan pegawai;
- j. Tersusunnya kode etik auditor dan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal Kemdikbud;
- k. Terselenggaranya *Training Emotional Spiritual Quotient (ESQ)* bagi semua pejabat struktural dan auditor Itjen Kemdikbud.

6) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Tertatanya sistem dan prosedur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkatkan *internal check*, dan memperbaiki perlindungan aset;
- b. Tersusunnya instrumen kebijakan dan perencanaan pembangunan pendidikan nasional:
 - Tersusunnya rencana strategis kementerian 2010-2014 dan dijabarkan ke dalam renstra unit utama, renstra unit kerja eselon II serta renstra UPT;
 - Tersusunnya rencana kinerja tahunan;
 - Tersusunnya penetapan kinerja.

7) Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik

- a. Peningkatan Layanan Peserta Didik
 - Terlaksananya pengembangan mekanisme kerja antar unit kerja;
 - Tersusunnya kegiatan dan tahapan pencapaian;
 - Tersusunnya *contingency plan*;
 - Teridentifikasinya *existing* program pada setiap unit kerja;
 - Terlaksananya pengembangan sistem penjaminan pelayanan;

- Terselenggaranya sistem pendataan yang akurat dan mutakhir.
- Teridentifikasinya proses pendataan anak usia sekolah dan daya tampung tiap jenjang pendidikan saat ini;
- Verifikasi, evaluasi, perancangan ulang dan penyederhanaan proses pendataan anak usia sekolah dan daya tampung tiap jenjang pendidikan;
- Penentuan kebutuhan teknologi untuk peningkatan kecepatan, jangkauan dan akurasi proses pendataan anak usia sekolah dan daya tampung tiap jenjang pendidikan;
- Pengembangan sistem pendataan daya tampung sekolah.

b. Peningkatan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Terlaksananya reformasi pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan melalui SIMNUPTK;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan PTK;
- Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian tunjangan profesi sebagai tindak lanjut adanya peningkatan profesionalisme guru;
- Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi;
- Perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka memfasilitasi permasalahan-permasalahan guru terkait dengan perlindungan hukum, profesi serta keselamatan dan kesehatan kerja;
- Perluasan akses pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian insentif maupun peningkatan kompetensi dan profesionalisme;
- Sertifikasi guru dalam jabatan yang berstatus PNS dan bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah/ pemerintah daerah maupun masyarakat yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah;
- Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi PTK secara berkelanjutan

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni;

- Peningkatan kapasitas layanan dan akuntabilitas publik melalui peningkatan kapasitas maupun kompetensi pengelola pendidikan.

c. Peningkatan Layanan Satuan Pendidikan

- Perizinan satuan pendidikan tinggi yaitu pemberian izin pembukaan perguruan tinggi dan program studi baru berbasis TIK;
- Prosedur dan panduan pelaksanaan pemberian hibah dari unit-unit pelaksana hibah yang terintegrasi;
- Standar pelayanan minimal pendidikan dasar yang meliputi jenjang SD dan SMP tahun 2011 ini sudah selesai dilatih dan disosialisasikan.

d. Peningkatan Layanan Substansi Pendidikan

- Penerapan pendidikan karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, meliputi konsep nilai-nilai karakter, panduan pelaksanaan pendidikan karakter, konsep kompetensi dasar kreativitas, pedoman pendidikan kewirausahaan di satuan pendidikan dasar menengah dan konsep model kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan pengintegrasian nilai-nilai karakter.
- Penerapan awal model sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman (rumah belajar).
 - (a.1) Teridentifikasinya sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman yang ada saat ini.
 - (a.2) Teridentifikasinya fungsi sistem berbagi analisis proses sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
 - (a.3) Penentuan kebutuhan teknologi untuk peningkatan kecepatan, Jangkauan dan akurasi proses bisnis sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
 - (a.4) Penentuan beban kerja, jumlah dan kualifikasi SDM untuk tiap tahap proses pembangunan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.

- (a..5) Penentuan indikator kinerja sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (a..6) Analisis proses sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (a..7) Pembangunan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (a..8) Tersusunnya kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (a..9) Terlaksananya sosialisasi fungsi sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (a..10) Terlaksananya sosialisasi proses bisnis sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (a..11) Terlaksananya sosialisasi kebijakan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (a..12) Instalasi sistem hasil rancangan dan pengembangan, termasuk pengadaan dan instalasi perangkat keras, Implementasi sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (a..13) Peningkatan kapabilitas SDM pengelola Sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.

- Konsep awal sistem pembelajaran dan berbagi materi.

- (a..1) Teridentifikasinya kebutuhan visualisasi dan interaksi untuk pembelajaran secara elektronik di tiap jenjang pendidikan.
- (a..2) Tersusunnya pola dan format standar untuk materi dan metode pendidikan serta manajemen lembaga pendidikan.
- (a..3) Tersusunnya pola keterhubungan antar modul materi maupun metode serta modul evaluasinya.
- (a..4) Tersusunnya standar tingkat kesulitan modul materi dan modul evaluasi yang digunakan untuk perhitungan skor pencapaian pengguna.
- (a..5) Konversi Buku Sekolah Elektronik ke format modul standar.
- (a..6) Peletakan modul-modul dalam kerangka kurikulum.
- (a..7) Pengisian keterhubungan antar modul BSE yang relevan.
- (a..8) Penilaian tingkat kesulitan untuk masing-masing modul.

- (a..9) Konversi metode pendidikan yang menjadi standar pembelajaran di sekolah formal dan non formal ke dalam format modul standar.
- (a..10) Pemantauan umpan balik dan masukan pengguna atas modul-modul yang tersedia.
- (a..11) Evaluasi keterdukungan kurikulum oleh respon modul-modul materi pendidikan yang ada dalam sistem.
- (a..12) Analisis kebutuhan modul untuk diprioritaskan pada pengisian konten gelombang kedua dengan memperhatikan keterdukungan kurikulum secara merata serta minat pengguna.
- (a..13) Pembuatan modul-modul materi dan metode pendidikan untuk gelombang kedua.
- (a..14) Pemberian penghargaan atas kontribusi modul oleh PTK yang mendapatkan rating/dukungan yang tinggi dari pengguna yang tersebar secara geografis.
- (a..15) Terumuskannya klasifikasi, kriteria dan aturan lomba kontribusi.
- (a..16) Pengumuman dan sosialisasi lomba.
- (a..17) Penjurian dan pengumuman hasil lomba.
- (a..18) Terumuskannya kriteria yang dapat menjamin kesinambungan jejaring, untuk dipakai sebagai dasar pemberian penghargaan secara periodik ke depan, informasi awal sejumlah hasil penelitian pendidikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, jaringan penelitian (jarlit) di 32 Provinsi pada 270 Kabupaten/Kota.
- (a..19) Konsep model pengembangan/pembangunan pangkalan penelitian pendidikan (*clearing house*).

8) Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Terhimpunnya program kerja RBI dari manajer program;
- b. Terkoordinasikannya penyusunan program kerja Tim Kerja;
- c. Tersusunnya konsep rencana monitoring;
- d. Finalisasi desain/instrumen monitoring program;
- e. Tersusunnya desain sistem monitoring;
- f. Terbangunnya sistem aplikasi monitoring, evaluasi, dan pengendalian program-program area perubahan RBI Kemdikbud;

- g. Terlaksananya uji coba desai dan penelaahan serta perbaikan sistem monitoring;
- h. Tersusunnya buku panduan monitoring.

9) Program Manajemen Perubahan

- a. Terlaksananya pelatihan pelayanan prima bagi pegawai di lingkungan Kemdikbud;
- b. Terlaksananya *workshop* budaya kerja bagi pegawai di lingkungan Kemdikbud;
- c. Terlaksananya penerapan budaya kerja di lingkungan UPT Kemdikbud.

Analisis dari hasil capaian reformasi birokrasi di lingkungan Kemdikbud tahun 2011, sebagai berikut:

1. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Penataan tugas, fungsi dan susunan organisasi di lingkungan Kemdikbud perlu terus disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat menjadi birokrasi ideal yang sehat dan dinamis serta berorientasi pada kebutuhan publik.
 - b. Implementasi penataan dan penguatan organisasi UPT akan dilakukan pada tahun 2012 dengan berlandaskan pada hasil perancangan sistem organisasi dan prosedur kerja tahun 2011.
2. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan SDM perlu diikuti dengan kegiatan penilaian kinerja individu berdasarkan kompetensi serta pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai, sehingga tercipta SDM yang kompeten, memiliki tata nilai dan etika kerja.
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Dengan berubahnya peta organisasi kementerian, maka harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mencakup bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
 - b. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk menyebarluaskan informasi mengenai perundang-undangan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan kepada masyarakat.

4. Program Penataan Tata Laksana

Rekayasa proses, simplifikasi, dan integrasi prosedur dengan pemanfaatan TIK menjadi program kegiatan utama guna memberikan layanan birokrasi yang responsif, informatif, mudah dijangkau, terbuka, serta efisien.

5. Program Penguatan Pengawasan

Inspektorat Jenderal harus menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting* dalam pengawasan internal, sebagai salah satu kunci pembentukan sistem birokrasi yang berintegritas dan terbuka dalam menghasilkan sistem layanan prima pendidikan kepada semua pemangku kepentingan.

6. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, harus lebih terintegrasi antara unit-unit terkait.

7. Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Peningkatan kualitas layanan publik perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar efisien, transparan, akurat, mutakhir, serta terintegrasi.

8. Program Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan menjadi pilar utama reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penerapan budaya kerja serta program hasil reformasi birokrasi harus menyentuh setiap elemen di kementerian, sehingga menciptakan komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan memiliki tata nilai serta etika kerja.

Quick Wins RBI Ditjen Pendidikan Tinggi

a.i.1. Layanan e-administrasi: Layanan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Berbasis TIK

- Dengan penyetaraan ijazah *online*, pengguna jasa akan dimudahkan karena dapat menyampaikan permohonan dan kelengkapan syarat-syarat secara *online*.
- Simplifikasi prosedur dengan memanfaatkan TIK:
 - a. Bila gelar, nama program studi, dan nama Perguruan Tinggi sudah ada pada laman Ditjen Dikti, penyetaraan dilakukan langsung oleh pengguna lulusan;
 - b. Bila gelar, nama program studi, nama Perguruan Tinggi belum terdapat pada laman Ditjen Dikti, maka penyetaraan dilakukan oleh Ditjen Dikti.
- Data telah terintegrasi dengan PDPT

a.i.2. Layanan e-learning: Pengembangan Sistem Pengelolaan Materi, Metode, dan Manajemen Lembaga Perguruan Tinggi Berbasis TIK:

- 17 PTN, 7 PTS, dan laman e-learning UNESCO telah bergabung dengan laman <http://e-learning.dikti.go.id> ;
- Setiap perguruan tinggi memiliki laman e-learning masing-masing yang didaftarkan pada laman e-learning Dikti;
- Mahasiswa yang dapat mengunjungi laman e-learning Dikti adalah mahasiswa yang terdaftar pada Perguruan Tinggi yang memiliki laman e-learning tersebut.

3. Sistem Pengelolaan Bantuan Siswa dan Mahasiswa Miskin melalui program beasiswa BIDIK MISI (tepat waktu, tepat sasaran, tepat penggunaan)

- Layanan pengelolaan Beasiswa BIDIK MISI sudah berbasis TIK, antara lain sistem pendaftaran sudah online dengan cara mengakses pada program layanan yang tersedia pada web: <http://bidikmisi.dikti.go.id>

E. PEMULIHAN PROSES PEMBELAJARAN DI DAERAH BENCANA DAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS

Guna menyediakan ketersediaan akses layanan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan daerah terdepan/daerah perbatasan serta untuk mempercepat penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2011 telah melakukan pembangunan pada daerah-daerah tersebut. Selain itu, Kemdikbud juga melakukan pemulihan proses pembelajaran pada daerah yang terkena bencana. Kesemua kegiatan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk menjangkau bagi mereka yang tidak terjangkau layanan pendidikan.

1. Pemulihan proses pembelajaran di daerah bencana

a.i.2.a. Pendidikan Masyarakat, yaitu pendidikan keaksaraan melalui pembelajaran dan atau pelatihan relawan, agar dapat melepaskan diri dari permasalahan yang sedang terjadi, atau dapat memiliki pengetahuan tentang tindakan pencegahan dan penyelamatan. Program keaksaraan untuk daerah bencana diperuntukkan untuk:

- Berbagai daerah di Indonesia yang merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi.
- Bencana yang dikarenakan ulah manusia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran.
- Bantuan dari berbagai sumber yang berbentuk material semata, terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik warga masyarakat korban bencana yang belum dapat menyelesaikan masalah lain yang berat, yakni dalam hal menyiapkan diri dan untuk menekan risiko buruk yang terjadi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang sebagai akibat bencana yang dialaminya.
- Bantuan dana program pendidikan keaksaraan untuk daerah bencana bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan di daerah melalui pembelajaran dan atau pelatihan relawan, yang dapat memberikan penguatan sikap, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat korban bencana, agar dapat segera terlepas dari trauma karena adanya bencana dan dapat bertindak mengurangi risiko buruk akibat bencana dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

a.i.2.b. Pada tahun 2011 Direktorat Pembinaan PAUD mengalokasikan untuk Bantuan Pasca Bencana dan Tanggap Darurat sebesar Rp 1.500.000.000 dan yang terealisasi sejumlah Rp 1.400.000.000 di beberapa titik yang terkena bencana alam. Bantuan ini diberikan kepada lembaga yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana disebabkan bencana alam pada tahun bersangkutan maupun pada tahun sebelumnya. Daerah yang mendapat bantuan pasca bencana dan tanggap darurat pada tahun 2011 terdapat di Provinsi Sumatera Utara pada Kabupaten Tapanuli Utara; Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Padang; Provinsi Jambi di Kota Jambi; Provinsi Jawa Barat di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Garut, Bandung, Ciamis, dan Tasikmalaya; Provinsi DIY di Kabupaten Sleman, Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Magelang; Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Probolinggo; Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa dan Bima; Provinsi Maluku di Kota Ambon; Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Selatan; serta di Provinsi Gorontalo di Kabupaten Boalemo.

a.i.2.c. Untuk menjaga kesinambungan kegiatan belajar mengajar di daerah yang terkena bencana alam, pada tahun 2011, Kemdikbud melalui Ditjen Dikdas telah melaksanakan bantuan penanganan dan tanggap darurat pendidikan di 14 provinsi yang terdiri dari 52 kabupaten untuk 938 sekolah (1.303 SD dan 329 SMP). Bantuan yang diberikan untuk penanganan pendidikan pada daerah bencana alam antara lain disebabkan oleh; letusan gunung berapi dan gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Selain itu juga, diberikan bantuan pendidikan akibat terjadinya tanah longsor dan banjir di Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya. Pelaksanaan kegiatan bantuan ini diperuntukkan guna membangun ruang kelas yang hancur dan rehabilitasi berat.

Selain kegiatan fisik yang berupa pembangunan kembali ruang kelas yang hancur, selama tahun 2011 Kemdikbud melalui Badan PSDMP dan PMP juga telah melakukan kegiatan pemberian bantuan di daerah yang telah terkena bencana. Pemberian bantuan langsung tersebut ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan formal dan nonformal yang terkena dampak bencana alam di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dan kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara akan dilaksanakan pada bulan Juli s.d November 2011.

Sasaran kegiatan pemberian bantuan langsung adalah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki kriteria dengan ketentuan nama PTK sesuai dengan nama yang tertuang dalam usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat dan Kepala Dinas pendidikan dan Olah Raga Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara. Total PTK yang menerima bantuan subsidi sebanyak 639 PTK formal dan informal. Dengan rincian sebagai berikut.

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan PSDMP dan PMP Kemdiknas Nomor 22189/J1/KP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Penerima Pemberian Subsidi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal di Daerah Terkena Bencana Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat, telah tersalurkannya bantuan bagi 140 PTK Formal dan Non Formal
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan PSDMP dan PMP Kemdiknas Nomor 23642/J1.1/KP/2011 tanggal 4 Nopember 2011 tentang Penetapan Penerima Pemberian Subsidi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal di Daerah Terkena Bencana Kota Tomohon, Propinsi Sulawesi Utara, telah tersalurkannya bantuan bagi 100 PTK Formal dan Non Formal
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan PSDMP dan PMP Kemdiknas Nomor 21910/J1/KP/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Penerima Pemberian Subsidi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal di Daerah Terkena Bencana Kabupaten Mentawai, Propinsi Sumatera Barat, telah tersalurkannya bantuan bagi 399 PTK Formal dan Non Formal.

2. Layanan pendidikan khusus

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Untuk daerah tertinggal dan pesisir, pada tahun 2011 telah mengalokasikan dana APBNP pada daerah kluster IV (nelayan di 12 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat dengan rincian daerah sesuai dengan Tabel berikut. Pemberian dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan PAUD di sekitar daerah tertinggal.

3.30 Dana APBN-P untuk daerah tertinggal dan pesisir

NO	PROVINSI/ KABUPATEN KLAster 4	BOP	Bantuan APE PAUD
		Anak	Lbg
1	Sumatera Barat	2,430	32
2	Lampung	4,660	48
3	Jawa Barat	13,770	80
4	Dki. Jakarta	3,720	30
5	Jawa Tengah	4,840	70
6	Jawa Timur	8,430	99
7	Nusa Tenggara Barat	5,430	68
8	Kalimantan Barat	3,910	18
9	Sulawesi Selatan	9,140	127
10	Maluku	1,200	9
11	Papua	870	6
12	Papua Barat	1,600	13
	Jumlah	60,000	600

b. **Kursus dan Pelatihan**

Pada tahun 2011 ini, telah dialokasikan dana bantuan sosial penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup untuk daerah khusus. Daerah khusus sasaran PKH tersebut meliputi daerah bencana/pasca bencana, daerah terpencil, daerah konflik, dan daerah perbatasan dengan negara lain.

Tujuan program PKH-DK ini adalah memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental agar mampu memanfaatkan potensi lokal di daerah bencana, daerah tertinggal, daerah konflik, dan daerah perbatasan sehingga memberikan dampak: 1) mengurangi pengangguran, 2) menciptakan lapangan kerja, 3) mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota, 4) mengurangi masalah sosial-ekonomi, 5) memberikan terapi bagi korban bencana agar kembali termotivasi dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana.

Jumlah alokasi peserta program PKH ini sebanyak 10.800 orang dan terealisasi sebanyak 11.271 orang. Sebaran jumlah peserta dan anggaran program PKH-DK sebagai berikut:

Tabel 3.31 Jumlah Peserta dan Anggaran Program PKH-DK

Sasaran utama dari program ini adalah masyarakat yang terkena dampak bencana maupun sasaran khusus lainnya. Jenis keterampilan yang diselenggarakan cukup bervariasi, diantaranya budidaya hasil pertanian, pertukangan, perikanan darat dan laut, tata boga, pariwisata, perbengkelan, teknologi informasi, dan berbagai bidang pengolahan.

Daerah-daerah yang menjadi sasaran utama diantaranya daerah pasca bencana Gunung Merapi (Sleman, Jogjakarta, Klaten, Magelang, Boyolali), pasca bencana tsunami di Mentawai, tanah longsor Wasior, pasca bencana Gunung Sinabung Sumatera Utara, daerah perbatasan NTT dengan Timor Leste, pasca gempa di Nias, pasca gempa Tasikmalaya, dan berbagai daerah terpencil lainnya. Penyelenggara program PKH-DK ini terdiri dari lembaga kursus dan pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya

4. Pelayanan pendidikan untuk daerah perbatasan, tertinggal, dan terpencil

Salah satu prioritas program prioritas Kemdikbud pada tahun 2011 adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal dan terpencil termasuk daerah nelayan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Memperhatikan daerah-daerah tersebut, Kemdikbud melalui Ditjen Dikdas telah memberikan bantuan pengembangan sarana

prasarana pendidikan kepada 335 sekolah di daerah perbatasan dan tertinggal serta 45 sekolah di daerah nelayan. Bantuan yang diberikan antara lain dipergunakan untuk rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru serta ruang penunjang lainnya.



5. Pelayanan pendidikan untuk anak TKI

Penyebaran anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia yang bersekolah di Kabupaten Nunukan jumlahnya mencapai 2.189 siswa. Mengingat kondisi orangtua mereka di Sabah hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Pemerintah memberikan pelayanan khusus untuk membantu anak-anak tersebut dengan memberikan bantuan biaya individual siswa sebesar Rp. 30.000--40.000/siswa per bulan guna memenuhi perlengkapan sekolahnya.

Sementara itu, anak TKI yang berada di Sabah kurang lebih berjumlah 52 ribu anak. Untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak tersebut, Kemdikbud akan meningkatkan daya tampung Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sebagai satu-satunya sekolah formal yang diharapkan dapat melayani pendidikan anak TKI yang berada di sekitar Kota Kinabalu. Jumlah siswa pada sekolah tersebut sebanyak 416 siswa yang terdiri dari siswa kelas I sampai dengan kelas VIII. Pada tahun 2011 telah dimulai pembangunan gedung SIKK di atas tanah milik pemerintah Republik Indonesia dengan lahan seluas 1,6 hektare yang diharapkan selesai pembangunannya pada April 2013. Dengan dibangunnya sekolah tersebut

diharapkan dapat menampung lebih banyak siswa yang berasal dari anak-anak TKI di Sabah, Malaysia.

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) memiliki peran strategis sebagai pusat layanan pendidikan di Kota Kinabalu dan sekitarnya di wilayah Sabah, Malaysia yang diharapkan menjadi center pendidikan untuk memfasilitasi 52 ribu anak-anak Indonesia yang tersebar di Sabah.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai *Centre Point* pendidikan, SIKK tidak hanya melaksanakan program pendidikan formal karena sejak tahun 2009, SIKK telah menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan melalui program paket A, B dan C. Sampai dengan sekarang, lebih dari 1.000 peserta didik telah lulus ujian pendidikan kesetaraan.

Sejak tahun pelajaran 2010/2011, SIKK telah menjadi Sekolah Induk bagi 13 *Learning Centre* (SMP Terbuka) di seluruh Sabah dengan jumlah siswa 826 orang dan juga menjadi koordinator bagi 15 *Learning Centre* setingkat SD.

Selain itu pemerintah juga memberikan perhatian khusus berupa insentif bagi pendidik yang mengajar di SIKK maupun di pusat belajar di daerah perkebunan di Sabah, Malaysia. Diharapkan, anak-anak TKI tersebut tetap mendapatkan haknya guna memperoleh pendidikan yang setara dengan di tanah air. Selain itu, di masa mendatang agar mereka dapat menjadi anak-anak bangsa yang memiliki harapan yang lebih baik dari orangtuanya di Sabah.

6. Program Sinergi Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Tertinggal dan Terpencil Kerjasama dengan Lintas Kementerian Tahun 2011

a. Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditjen PAUDNI memiliki beberapa program yang ditujukan untuk melakukan sinergi pemberdayaan masyarakat di kawasan tertinggal dan terpencil kerja sama dengan lintas kementerian tahun 2011, diantaranya sebagai berikut:

- Program yang diluncurkan di lokasi program pada Desa Undul Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19-21 Juli 2011 yaitu rintisan PKBM sebesar 30 juta dan peningkatan mutu PKBM sebesar 30 juta. Kedua program ini diluncurkan di lokasi program untuk menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan mutu PKBM dan merintis PKBM baru di lokasi tersebut, hal ini disebabkan oleh letak geografis PKBM tersebut memiliki jarak yang cukup jauh.
- Lokasi di Suku Anak Dalam Desa Lubuk Bedoro Kecamatan Limun dan Kecamatan cermin Nan Gadai Kabupaten Sarolangun Provinsi

Jambi, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Oktober 2011, dengan program yang diluncurkan yaitu:

- Rintisan PKBM sebesar 30 juta
Latar belakang program ini adalah masih banyaknya anak-anak di pedalaman Jambi masih perlu diberdayakan baik pembelajarannya maupun untuk pemberdayaan penggalian potensi alam dan sumber daya manusianya. Hal ini terbukti dengan adanya Suku Anak Dalam yang melanjutkan pendidikan
- Peningkatan mutu PKBM sebesar 30 juta
Program ini dikhususkan bagi PKBM yang berada di Kecamatan Limun dan Kecamatan Cermin Nan Gadai yang memiliki komunitas Suku Anak Dalam yang akan menyelenggarakan program dan pendampingan PKBM yang dirintis di lokasi tersebut.

- Desa Noelelo Kecamatan Mutis kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 27-30 September 2011. Program yang diluncurkan adalah rintisan PKBM sebesar 30 juta dan peningkatan mutu PKBM sebesar 30 juta. Kedua program ini ditujukan bagi lokasi program yang belum memiliki PKBM sedangkan untuk program peningkatan mutu PKBM dikhususkan bagi lembaga yang berada di wilayahnya.

- b. Pada tahun 2011 Direktorat Pembinaan PAUD juga telah melakukan ujicoba PAUD Terpadu di 10 (sepuluh) lokasi daerah kluster IV (daerah tertinggal pesisir/nelayan), dengan memberikan bantuan berupa : pelatihan dan magang bagi pendidik, pengelola, dan Penilik PAUD (5 orang per lokasi) selama 2 minggu; bantuan rintisan program PAUD; serta bantuan bangunan gedung sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

4. **Tunjangan Khusus Untuk Guru TK/TKLB**

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, mengalokasikan dana pemberian tunjangan khusus guru TK/TKLB untuk daerah khusus. Dana tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan dalam DIPA Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia.

Tunjangan khusus tersebut diberikan kepada guru yang ditugaskan di daerah khusus oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai bentuk

penghargaan dalam melaksanakan tugas baik Guru TK/TKLB yang berstatus PNS atau bukan PNS yang memenuhi kriteria.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dimaksud daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Jumlah dana Subsidi Tunjangan Khusus Guru TK/TKLB sebesar Rp. 26.400.000,- per orang per tahun, dipotong Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu 15%. Program pemberian tunjangan khusus Guru TK/TKLB ini memiliki jumlah sasaran sebanyak 676 orang. Realisasi yang telah dicapai selama tahun 2011 adalah sebesar Rp. 16.711.200.000 atau sebanyak 633 orang. Sebaran untuk program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.32 Program pemberian tunjangan khusus Guru TK/TKLB

NO	PROVIN SI	DIPA	REALISASI			
		SSR	DANA	SSR	DANA	%
1	DKI Jakarta	0	26.400.00 0	0	-	0
2	Jawa Barat	31	818.400.0 00	29	765.600.0 00	58
3	Jawa Tengah	0	580.800.0 00	0	-	0
4	DI Yogyakart a	30	792.000.0 00	30	792.000.0 00	77
5	Jawa Timur	88	2.323.200. 000	88	2.323.200. 000	0
6	NAD	52	1.372.800. 000	53	1.399.200. 000	0
7	Sumatra Utara	4	105.600.0 00	4	105.600.0 00	77
8	Sumatra Barat	32	844.800.0 00	25	660.000.0 00	24
9	Riau	7	184.800.0 00	6	158.400.0 00	33
10	Jambi	4	105.600.0 00	4	105.600.0 00	0
11	Sumatra Selatan	17	448.800.0 00	18	475.200.0 00	77
12	Lampung	39	1.029.600. 000	57	1.504.800. 000	146
13	Kalimanta n Barat	14	369.600.0 00	15	396.000.0 00	0
14	Kalimanta n Tengah	11	290.400.0 00	2	52.800.00 0	14
15	Kalimanta n Selatan	10	264.000.0 00	10	264.000.0 00	77
16	Kalimanta n Timur	3	79.200.00 0	2	52.800.00 0	51
17	Sulawesi Utara	5	132.000.0 00	5	132.000.0 00	100
18	Sulawesi Tengah	40	1.056.000. 000	40	1.056.000. 000	100
19	Sulawesi Selatan	57	1.504.800. 000	54	1.425.600. 000	95
20	Sulawesi Tenggara	42	1.108.800. 000	48	1.267.200. 000	114
21	Maluku	5	132.000.0 00	0	-	0
22	Bali	2	52.800.00 0	2	52.800.00 0	77
23	NTB	38	1.003.200. 000	35	924.000.0 00	24
24	NTT	19	501.600.0 00	19	501.600.0 00	77
25	Papua	12	316.800.0 00	11	290.400.0 00	0
26	Bengkulu	16	422.400.0 00	11	290.400.0 00	53
27	Maluku	5	105.600.0	5	132.000.0	0

	Utara		00		00	
28	Banten	12	316.800.00	0	-	0
29	Bangka Belitung	4	105.600.00	7	184.800.00	175
30	Gorontalo	24	633.600.00	24	436.506.00	77
31	Kepulauan Belitung	2	52.800.00	2	52.800.00	0
32	Irian Jaya	3	79.200.00	0	-	0
33	Sulawesi Barat	20	528.000.00	27	712.800.00	135
Total		648	17.688.000.000	633	16.514.106.000	93

Tujuan utama dengan adanya program ini adalah : Sebagai penghargaan kepada Guru TK/TKLB yang berlokasi di kecamatan pada daerah khusus; (2) Meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan Guru TK/TKLB yang berlokasi di kecamatan pada daerah khusus; (3) Mendorong dan memotivasi Guru TK/TKLB untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya dalam melaksanakan tugasnya; (4) Meningkatkan kebanggaan, dedikasi, dan pengabdian Guru TK/TKLB untuk memberikan yang terbaik dalam mencapai pendidikan berkualitas.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemdikbud tahun 2011 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK), sebagai pengembalian amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dunia pendidikan. PK yang disusun merupakan bagian dari usaha Kemdikbud dalam pencapaian Renstra Kemdikbud tahun 2010--2014 (visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan program). Dalam LAKIP Kemdikbud tahun 2011 masih melaporkan capaian kinerja dari 9 (sembilan) program Kemdikbud, yang tersebar di sembilan unit utama. LAKIP ini belum melaporkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan, karena Ditjen tersebut baru bergabung ke dalam Kemdikbud pada akhir tahun 2011 dan sampai sekarang masih dalam proses penggabungan.

“Laporan akuntabilitas kinerja Kemdikbud Tahun 2011 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Mendikbud terhadap Penetapan Kinerja”

Secara umum pada tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa 9 (sembilan) unit utama yang melaksanakan program tersebut telah dapat merealisasikan target IKU yang ditetapkan. Pencapaian IKU tersebut dapat memberikan kontribusi langsung dalam pencapaian tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2010--2014. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja Kemdikbud pada tahun 2011 telah berhasil merealisasikan IKU beserta target program, yang merupakan penjabaran dari 5 (lima) misi Kemdikbud, yaitu: 1) Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan; 2) Meningkatkan **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan; 3) Meningkatkan **Kualitas/Mutu dan Relevansi** Layanan Pendidikan; 4) Meningkatkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh

Layanan Pendidikan; dan 5) Meningkatkan **Kepastian/Keterjaminan** Memperoleh Layanan Pendidikan.

Dalam kaitan dengan ketercapaian 5 (lima) misi tersebut, Kemdikbud telah melaksanakan program-program yang dititikberatkan pada penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, penyediaan tenaga pendidikan yang berkompeten dan merata, penyediaan manajemen satuan pendidikan yang berkompeten, penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan, penyediaan data dan informasi serta akreditasi yang handal, dan penataan struktur organisasi untuk menjamin terlaksananya layanan prima dalam bidang pendidikan.

Dari seluruh IKU yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 61 sasaran strategis di sembilan program pendidikan, Kemdikbud telah berhasil merealisasikannya dengan rincian, 57 IKU telah melebihi target, 31 IKU mencapai target dan sebanyak 45 IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan. Selain capaian dalam PK, Kemdikbud juga telah berhasil merealisasikan target yang ada dalam Kontrak Kinerja yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penanganan layanan pendidikan di daerah bencana, Kemdikbud telah menunjukkan keberhasilan melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi gedung/kampus serta perumahan bagi guru/dosen, bantuan bagi guru, pemberian beasiswa, pengadaan bahan dan media pembelajaran.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun kedua dari Renstra Kemdikbud tahun 2010—2014, merupakan dasar berpijak yang kuat bagi Kemdikbud untuk dapat melaksanakan program-program yang telah dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Kemdikbud akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin perwujudan tekad dalam melakukan reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.

Daftar Pejabat di lingkungan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Prof. Dr. Mohammad Nuh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.
Wakil Menteri Bidang Pendidikan



Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D.
Wakil Menteri Bidang Kebudayaan

Staf Ahli Menteri



Prof. Kacung Marijan, Ph.D.
Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional



Dra. Harina Yuhetty, M.Pd.
Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan



Prof. Dr. Anna Eriyana, SH., MH.
Plt. Staf Ahli Bidang Hukum



Prof. Ir. Abdulah Aikaff, MSc., Ph.D.
Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen



Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.
Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan

Sekretariat Jenderal



Prof. Dr. Ainun Na'im, Ph. D.
Sekretaris Jenderal



Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc., Ph.D.
Kepala Biro PKN



Hindun Basri Purba, S.H., M.Si.
Kepala Biro Umum



Drs. Subagyo, M.Si., Ak.
Kepala Biro Keuangan



Muslikh, SH.
Kepala Biro Kepegawaian



Dr. Andi P. Moenta, SH., MH,DFM.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Dr. Ibnu Hamad.
Kepala Pusat Informasi dan Humas



Dr. Ir. Ari Santoso, DEA.
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan



Dr. Bastari
Kepala Pusat Data dan Statistik

Inspektorat Jenderal



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.
Plt. Inspektur Jend



Abdul Apip, M.Pd.
Sekretaris Itjen



Suharyanto, S.H., M.M.
Inspektur



Jauhari Sembiring, S.H., M.Si.
Inspektur II



Marhusa Pandjaitan, S.H. M.A.
Inspektur III



Dr. Amin Priatna, M.Si.
Inspektur IV



Drs. Yanto Sugianto
Inspektur Investigasi

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal



Dr. Lydia Freyani Hawadi
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal



Dr. Gutama
Sekretaris Ditjen PAUDNI



Dr. Erman Syamsuddin, SH, M.Pd.
Direktur Pembinaan PAUDNI



Dr. Warfanto, MM.
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan



R. Ella Yulaelawati Rumindasari, M.A., Ph.D.
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat



Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar



Prof. Suyanto, Ph.D.
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar



Dr. Bambang Indriyanto, M.Sc.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M. Pd.
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar



Didik Suhardi, SH., M.Si.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama



Drs. Mudjito AK, M.Si.
Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus



Sumarna Surapranata, Ph.D.
Direktur Pembinaan dan Tenaga Kependidikan Dikdas

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah



Hamid Muhammad,
M.Sc., Ph.D.
Plt. Direktur
Jenderal
Pendidikan
Menengah



M. Mustaghfirin Amin, MBA
Sekretaris
Ditjen
Pendidikan
Menengah



Dr. Surya Dharma, MPA.
Direktur
Pembinaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Dikmen



Ir. Totok Suprayitno,
PhD.
Direktur
Pembinaan
Sekolah
Menengah Atas



Dr. Trijadi
Direktur
Pembinaan
Pendidikan
Khusus dan
Layanan Khusus



Dr. Joko Sutrisno
Direktur
Pembinaan
Sekolah
Menengah
Kejuruan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Prof. Dr. Djoko Santoso
Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi



Ir. Harris Iskandar, Ph.D.
Sekretaris Ditjen
Pendidikan
Tinggi



Dr. Illah Sailah,
MS.
Direktur
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan



Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D.
Direktur Penelitian
dan Pengabdian
kepada
Masyarakat



Prof. Dr. Achmad Jazidie, M.Eng.
Direktur
Kelembagaan dan
Kerjasama



Prof. Dr. Supriadi,
M.si.
Direktur Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Balitbang



Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodipuro, M.S.
Kepala Balitbang



Dr. Burhanuddin Tola, M.A.
Sekretaris
Balitbang



Hendarman, M.Sc., Ph.D.
Kepala Pusat
Penelitian
Kebijakan
Pendidikan



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.
Kepala Pusat
Penilaian
Pendidikan



Dra. Diah Harianti, M.Psi.
Kepala Pusat
Kurikulum dan
Perbukuan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan



Prof. Dr. Syawal Gultom, M. Pd.
Kepala Badan PSDMP
dan Penjaminan Mutu
Pendidikan



Ir. Giri Suryatmana
Sekretaris BPSDM
da PMP



Dr. Abi Sujak, M.Sc.
Kepala Pusat
Pengembangan
Tenaga Kependidikan



Dr. Muhammad Hatta
Kepala Pusat
Penjaminan Mutu
Pendidikan



Dr. Unifah Rosyidi,
M. Pd.
Kepala Pusat
Pengembangan
Profesi Pendidik

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D.
Plt. Kepala Badan
Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa



Dra. Yeyen Maryani, M. Hum.
Sekretaris Badan
Pengembangan
dan Pembinaan
Bahasa



Dr. Sugiyono
Kepala Pusat
Pengembangan dan
Perlindungan



Mohammad Qudrat Wisnu Aji, S.E., M.Ed.
Kepala Pusat
Pembinaan dan
Pemasarakatan

